

Pengukuran Modal Sosial

by Alfitri Alfitri

Submission date: 07-May-2023 09:23AM (UTC+0700)

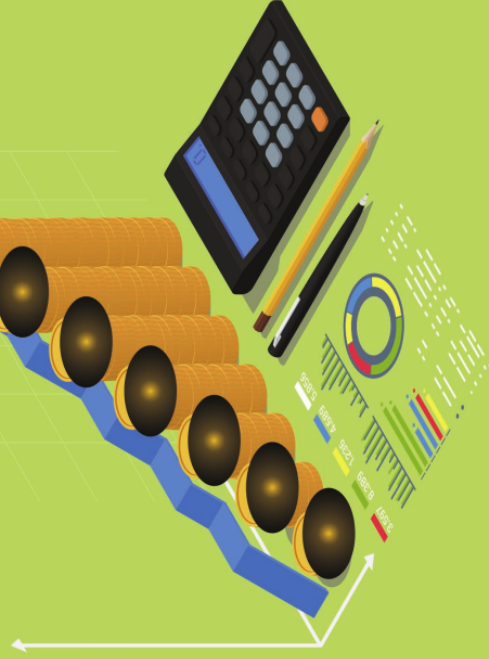
Submission ID: 2086179395

File name: 1._Buku_PENGUKURAN_MODAL_SOSIAL.pdf (2.05M)

Word count: 39234

Character count: 258225

PENGUKURAN MODAL SOSIAL



Prof. Dr. Alfritri, M.Si.

Prof. Dr. Alfritri, M.Si.

PENGUKURAN MODAL SOSIAL

PENGUKURAN MODAL SOSIAL

Modal sosial merupakan sumber daya vital bagi individu, kelompok dan masyarakat. Modal sosial digambarkan sebagai pelumas yang memfasilitasi penyelesaian suatu masalah karena memungkinkan individu - individu untuk mengakses manfaat dari hubungan dan jejaring sosial. Bagi individu, modal sosial merupakan sumber kekuatan penting untuk yang membantu orang untuk bertahan dan maju. Sementara itu, bagi kelompok dan organisasi modal sosial memfasilitasi. Kerjasama dan inovasi karena setiap organisasi yang tidak mempertimbangkan pentingnya modal sosial akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki organisasinya dan mempertaruhkan inefisiensi organisasinya. Bagi suatu masyarakat, modal sosial memungkinkan masyarakat tetap eksis dan menjaga koherensi. Termasuk di dalamnya adalah memfasilitasi Kerjasama dan kolaborasi berbagai kelompok di dalam masyarakat.

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.

PENGUKURAN
MODAL
SOSIAL

Editor:
Anang Dwi Santoso, S.Ap.,MPA
Maryati, A.Md



Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.

Pengukuran Modal Sosial --Prof. Dr. Alfitri, M.Si.-- Cet 1- Idea Press
Yogyakarta, Yogyakarta 2023-- x+ 166--hlm--15.5 x 23.5 cm
ISBN: 978-623-484-xxx-x

1. Ekonomi 2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral
dan melawan hukum.

Pengukuran Modal Sosial

Penulis: Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
Editor: Anang Dwi Santoso, S. Ap., MPA
Maryati, A.Md
Setting Layout: Agus Suroto
Desain Cover: Aldo Pradipta
Cetakan Pertama: Januari 2023
Penerbit: Idea Press Yogyakarta

Diterbitkan oleh:
Penerbit IDEA Press Yogyakarta
Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Email: ideapres.now@gmail.com/ idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY
No.140/DIY/2021

Copyright @2023 Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved.

CV. IDEA SEJAHTERA

KATA PENGANTAR

Modal sosial secara sederhana dapat didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh dari “menjadi sosial”. Modal sosial menekankan pentingnya hubungan dan jaringan sosial dan dimanifestasikan sebagai aset berharga. Sebagai konsekuensinya bersosialisasi dan bekerjasama sebagai proses untuk mendapatkan hubungan dan jaringan sosial adalah penting. Modal sosial sebagai suatu modal memiliki manfaat produktif yang di antaranya adalah solidaritas dan niat baik antara orang dan sekelompok orang.

Modal sosial merupakan sumber daya vital bagi individu, kelompok dan masyarakat. Modal sosial digambarkan sebagai pelumas yang memfasilitasi penyelesaian suatu masalah karena memungkinkan individu-individu untuk mengakses manfaat dari hubungan dan jejaring sosial. Bagi individu, modal sosial merupakan sumber kekuatan penting untuk yang membantu orang untuk bertahan dan maju. Sementara itu, bagi kelompok dan organisasi modal sosial memfasilitasi Kerjasama dan inovasi karena setiap organisasi yang tidak mempertimbangkan pentingnya modal sosial akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki organisasinya dan mempertaruhkan inefisiensi organisasi. Bagi suatu masyarakat, modal sosial memungkinkan masyarakat tetap eksis dan menjaga koherensi. Termasuk di dalamnya adalah memfasilitasi Kerjasama dan kolaborasi berbagai kelompok di dalam masyarakat.

Mempertimbangkan pentingnya modal sosial baik di tingkatan individu, kelompok dan masyarakat, buku ini hadir untuk melengkapi diskusi modal sosial di Indonesia. Buku ini terdiri dari Sembilan bab tentang modal sosial. Pada Bab 1, penulis menyampaikan relevansi modal sosial dalam tata Kelola kehidupan saat ini. Bab 2, berisi tentang definisi komprehensif tentang modal sosial, dan pada Bab 3, penulis mendiskusikan kearifan lokal dan kaitannya dengan modal sosial. Di bab 4 penulis menegaskan pentingnya modal budaya dan modal sosial dalam pembangunan bangsa. Pada Bab 5, penulis menyajikan tentang manifestasi kearifan lokal dalam masyarakat Indonesia. Pada Bab 6, penerapan pendidikan karakter melalui pembelajaran berbasis lokal dikemukakan dan di bab 7 penulis menyampaikan tentang Indonesia sebagai the next global power house. Di Bab 8, penulis memberikan diskusi yang lebih teknis tentang pengukuran modal sosial dan di Bab 9, penulis menyajikan satu studi kasus tentang pengukuran modal sosial sebagai predictor dari resiliensi masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19.

Buku ini secara akademis penting untuk mengisi ruang yang kosong dalam diskusi modal sosial di Indonesia terutama dengan menyajikan bagaimana modal sosial dapat diukur dan bagaimana alternatif pengukuran serta konsekuensi dari pengukuran-pengukuran tersebut. Buku ini secara praktis dapat dimanfaatkan oleh berbagai macam organisasi baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah untuk Kembali meninjau modal sosial yang dimilikinya untuk membangun berbagai macam hal baik.

Semoga buku yang berjudul Pengukuran Modal Sosial ini dapat menambah wahana perpustakaan yang ada dan dapat dijadikan referensi dan informasi serta menambah wawasan/ pengetahuan tentang modal sosial yang ada di Indonesia. Saya mengharapakan penulis terus berkarya menerbitkan buku dan dimana perlu dilanjutkan dengan pemyempurnaannya.

Akhirnya, saya menyatakan pengharapan kiranya rekan-rekan dan rekan sejawat lainnya selaku tenaga pengajar, baik yang senior

mapun yang lebih muda, bergairah membuat karya tulis-karya tulis terutama dalam bidang ilmu yang diasuh dan ditekuninya, karena hal tersebut merupakan pengejawantahan ketertarikan minatnya secara khusus dibidang ilmu yang digelutinya. Atas usaha dan kontribusi penulis dalam menyelesaikan buku ini, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi dalam rangka mempersiapkan generasi penerus dimasa yang akan datang.

Palembang, Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| BAB 2 MODAL SOSIAL..... | 5 |
| A. Pengertian Modal Sosial | 5 |
| B. Norma, Kepercayaan dan Jaringan..... | 17 |
| C. Kategori Modal Sosial..... | 24 |
| BAB 3 KEARIFAN LOKAL | 27 |
| A. Pengertian Kearifan Lokal..... | 27 |
| B. Pembangunan dan Kearifan Lokal | 29 |
| C. Transformasi Kearifan Lokal | 33 |
| BAB 4 MODAL BUDAYA DAN MODAL SOSIAL | |
| DALAM PEMBANGUNAN BANGSA | 37 |
| A. Perbedaan Modal Budaya dan Modal Sosial..... | 37 |
| B. Peran Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial | |
| dalam Penyelesaian Konflik Nelayan di Daerah | |
| Kabupaten Situbondo..... | 40 |
| C. Masyarakat Indonesia Multikultural | 41 |
| D. Indonesia Negara Agraris..... | 42 |
| E. Model Budaya Standar Indonesia..... | 43 |
| F. Tantangan dan Kompetensi Global Indonesia | 46 |
| G. Mengembangkan Profesionalisme Global Indonesia | 58 |

| | |
|---|-----|
| BAB 5 MANIFESTASI KEARIFAN LOKAL DALAM | |
| MASYARAKAT INDONESIA..... | 63 |
| A. Kembali kepada Kearifan Lokal Lingkungan Indonesia | 63 |
| B. Kearifan Lokal Sebagai Penata Lingkungan..... | 64 |
| C. Contoh Kasus Kearifan Lokal di Indonesia Budaya Mitigasi Bencana Alam Gempa Bumi di Nias..... | 65 |
| D. Kearifan Lokal Dalam Budaya Batak | 66 |
| E. Kearifan Lingkungan Masyarakat Gunung Kidul Dalam Mengelola Sumberdaya Air..... | 67 |
| F. Kearifan Masyarakat Sumatera Selatan Dalam Penentuan waktu Pelaksanaan Kegiatan Penanaman..... | 69 |
| BAB 6 PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER | |
| MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS | |
| KEARIFAN LOKAL..... | 79 |
| A. Adat dan nilai budaya local..... | 79 |
| B. Pendidikan Karakter | 83 |
| C. Landasan Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal | 85 |
| D. Penerapan Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal | 87 |
| E. Melalui Kegiatan Pengembangan Diri..... | 89 |
| F. Tantangan Kearifan Lokal | 93 |
| G. Fungsi dan Bentuk Kearifan Lokal Dalam Masyarakat..... | 99 |
| H. Contoh Kearifan Lokal Dalam Masyarakat Indonesia | 105 |
| BAB 7 PROLOG: INDONESIA THE NEXT GLOBAL | |
| POWER HOUSE..... | 109 |
| A. Indonesia The next Global Power House | 109 |
| B. seluk Beluk Budaya dan Perilaku Manusia..... | 114 |
| C. Indonesia di Tengah Budaya Global..... | 116 |
| D. Budaya sebagai Perangkat lunak Benak Manusia | 116 |

| | |
|---|-----|
| E. Budaya, Bahasa yang Tersirat..... | 118 |
| F. Budaya adalah Pemecatan Masalah | 119 |
| G. Studi Globe: Budaya Kepemimpinann..... | 120 |
| H. Budaya standar sebagai sistem orientasi dan Karakteristik Inti | 122 |
| BAB 8 MENGUKUR MODAL SOSIAL: ALTERNATIF | |
| PENGUKURAN DAN TANTANGANNYA | 125 |
| A. Pengantar | 125 |
| B. Pengukuran Modal Sosial di Level Individual, Kelompok dan Komunitas | 127 |
| C. Determinan, Struktur dan Konsekuensi Modal Sosial | 128 |
| D. Konteks dalam Studi Modal Sosial | 130 |
| E. Pengukuran Modal Sosial | 131 |
| F. Pengukuran Modal Sosial dengan Perspektif Jaringan | 131 |
| G. Pengukuran Modal Sosial Dengan Perspektif Struktur Sosial..... | 132 |
| H. Level Analisis | 133 |
| I. Level Komunitas Atau Nasional..... | 133 |
| J. Pengukuran Modal Sosial di Level Organisasi dan Kelompok | 134 |
| K. Pengukuran Modal Sosial di Level Individu..... | 135 |
| BAB 9 MODAL SOSIAL DAN RESILIENSI | |
| MASYARAKAT PERKOTAAN | 139 |
| A. Latar Belakang..... | 139 |
| B. Tinjauan Literatur Dan Pengembangan Hipotesis Penelitian..... | 141 |
| C. Kesimpulan | 145 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 151 |

Bab 1

PENDAHULUAN

Ketika bangsa kita menghadapi perubahan sosial dikarenakan krisis-krisis yang ada seperti politik, kepercayaan, dan lainnya maka karakter sosial dalam diri kita sebagai manusia yang selalu dibangga-banggakan perlahan lenyap dan bahkan kita mampu menunjukkan karakter sosial yang buas dan menyeramkan. Hal-hal tersebut paling terlihat secara jelas pada perbuatan manusia yang bersifat destruktif terhadap sesamanya seperti, benturan, kekerasan, pembakaran, pembunuhan, penjarahan, penculikan, terorisme, dan lainnya.

Perbuatan-perbuatan yang bersifat destruktif akan berpengaruh pada modal sosial (social capital) yang telah dimiliki oleh manusia. Modal sosial yang mencakup norma-norma sosial yang sepatutnya terjaga telah tercerai-berai diakibatkan oleh segala jenis aktivitas manusia yang lebih tidak bermoral. Kehadiran Otonomi Daerah yang berfungsi sebagai pemupuk modal sosial pada kenyataannya belum berperan banyak untuk menumbuhkan rasa solidaritas, keadilan, Kerjasama, dan sebagainya. Oleh karena itu, mulai detik ini sepatutnya ada usaha untuk melahirkan kembali modal sosial yang terus menerus terkikis dalam institusi lokal yang merupakan awal-mula terbentuknya institusi global.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sudah menciptakan peluang bagi daerah yang dalam ini merupakan kabupaten dan kota dalam rangka membangun daerah dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman yang ada di daerah tersebut untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada untuk melahirkan kemandirian.

Pada kenyataannya, akhir-akhir ini tetap saja marak kejadian benturan-benturan sosial, dalam bentuk konflik maupun kekerasan hingga terorisme yang mampu membuyarkan modal sosial (*social capital*) yang menyebabkan kita kehilangan banyak nilai-nilai yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan kita sebagai manusia seperti, kejujuran, solidaritas, persatuan, dan lainnya.

Hal yang dapat kita lakukan sebagai upaya menata kembali modal sosial yang telah kita miliki sebagai bangsa, sesuai dengan peran kita yang ada dalam institusi lokal, dengan harapan secara lambat laun dapat merambat ke institusi yang lebih luas seperti institusi global.

Masyarakat yang berasal dari kondisi geografis berbeda akan mengembangkan kultur-kultur dan kelembagaan yang sesuai dengan kondisi geografis yang dimiliki oleh masing-masing individu sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam bereproduksi dan memproduksi. Oleh sebab itu, tahap pengenalan tiap unsur sosial budaya yang dimiliki masyarakat sangat penting sebagai proses pemberdayaan dan pembangunan. Perlu diingat bahwasanya tiap masyarakat memiliki potensi swadaya yang berbeda satu sama lain disebabkan oleh latar belakang sosial budaya mereka yang unik dan khusus antar satu sama lain serta kondisi ekologi dan geografis tiap tempat yang berbeda-beda (lihat Mubyarto, 1994).

Budaya lokal dianggap penting dalam sebuah proses pembangunan juga dikemukakan oleh Colletta (1987), terdapat tiga alasan yang melandasi pemanfaatan unsur-unsur yang terdapat pada budaya lokal dalam pengadaan pembangunan masyarakat setempat. Pertama, legitimasi tradisional yang dimiliki budaya lokal dapat menjadi sasaran dari program pemberdayaan dan pembangunan oleh masyarakat. Kedua, secara simbolis unsur budaya digunakan sebagai komunikasi yang berharga bagi penduduk setempat. Ketiga, fungsi dari unsur budaya sendiri yang sangat beragam, baik yang nampak maupun tidak nampak, dinilai berguna karena dapat dijadikan sebagai sarana perubahan jika disandingkan dengan yang tampak permukaan saja (lihat juga Dive, 1985).

Kearifan lokal (*local wisdom*) adalah salah satu bagian dari sebuah sistem budaya, yang jika dijabarkan terdiri dari larangan-larangan yang mengatur hubungan sosial (hubungan antar manusia) maupun hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Seringkali kearifan lokal difungsikan sebagai dasar untuk melestarikan dan menjaga keberlangsungan hidup “aset” yang dimiliki masyarakat setempat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya turun-temurun dari generasi satu ke generasi lainnya. Oleh karena itu, kearifan lokal secara konsisten dijadikan sebagai pedoman atau landasan utama manusia untuk bertindak maupun berperilaku dalam praksis kehidupannya sehari-hari. Tindakan itu merupakan bentuk dari kesadaran akan hukum kausalitas dan pemahaman hubungan dengan sifat mutualisme.

Bab 2

MODAL SOSIAL

A. Pengertian Modal Sosial

Semua kelompok masyarakat (suku bangsa) di Indonesia pada dasarnya memiliki kemampuan-kemampuan sosial budaya yang dinilai efektif dan dapat menjadi penunjang dalam pelaksanaan pembangunan (Berutu, 2002). Kemampuan ini seringkali dilupakan begitu saja oleh kelompok masyarakat tersebut sehingga tidak dapat dimaksimalkan dalam fungsinya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selain itu, juga terdapat kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran akan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok mereka sendiri sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik untuk keperluan pribadi kelompok masyarakat tersebut. Salah satu contoh dari kemampuan sosial budaya yang dimaksud adalah modal sosial. Sederhananya, modal sosial dapat diartikan sebagai kemampuan mengorganisir diri sendiri dalam memperjuangkan tujuan masyarakat itu sendiri.

Dengan kata lain, modal sosial merupakan sumber daya sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Sebagai salah satu sumber daya, modal sosial dipergunakan sebagai pemberi kekuatan akan kondisi-kondisi sosial yang ada dalam sebuah masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat ada beberapa jenis modal yang dikenal, yaitu *natural capital*, *human capital*, *physical capital* dan *financial*

capital. Modal sosial berfungsi sebagai pendorong modal tersebut agar dapat berjalan dengan optimal. Modal sosial akan dapat mendorong keempat modal di atas dapat digunakan lebih optimal lagi. Modal sosial pada mulanya dipahami sebagai suatu bentuk di mana masyarakat menaruh kepercayaan terhadap komunitas dan individu sebagai bagian di dalamnya. Mereka membuat aturan kesepakatan bersama sebagai suatu nilai dalam komunitasnya. Di sini aspirasi masyarakat mulai terakomodasi, komunitas dan jaringan/agen/institusi lokal melakukan proses adaptasi dan tergabung dalam kerangka modal pengembangan komunitas dan pemberdayaan masyarakat.

Modal sosial adalah sumberdaya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumberdaya (*resources*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan, dan diinvestasikan. Sumberdaya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Dimensi modal sosial cukup luas dan kompleks. Modal sosial berbeda dengan istilah populer lainnya, yaitu Modal Manusia (*human capital*). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Pada Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antarindividu dalam suatu kelompok dan antarkelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antarsesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok.

Konsep modal sosial merupakan suatu bentuk jaringan, kepercayaan, norma-normadan nilai-nilai. Ketiga elemen atau unsur-unsur pembentuk modal sosial tersebut sangat penting dan saling berhubungan satu sama lainnya dalam pembentukan modal sosial.

Bourdieu, sebagai sosiolog yang secara sistematis menganalisis modal sosial untuk pertama kalinya mendefinisikan bahwa modal sosial merupakan gabungan dari sumber daya

potensial dan atau aktual yang terkait dengan kepemilikan jaringan kerja dalam jangka waktu tertentu dari hubungan pokok terlembaga dari saling kenal dan saling mengakui. Dalam kelompok, keanggotaan merupakan bentuk kemudahan yang diberikan kepada anggota kelompok dengan cara mendukung modal sosial yang dimiliki perseorangan secara kolektif. Kewajiban sosial atau koneksi juga dapat membuat modal sosial dapat dipertukarkan yang dalam kondisi tertentu dapat menjadi modal ekonomi bagi kelompok masyarakat.

Bourdieu juga memberikan pernyataan soal ketergantungan dari ukuran jaringan koneksi-koneksi yang dapat bermobilisasi dan muatan modal-ekonomi, kultural, dan simbolik yang dimiliki seseorang yang menjadi koneksinya terhadap muatan modal sosial yang dimiliki oleh seseorang. Maka dari itu, menurut pendapat Bourdieu modal sosial disusun kembali menjadi dua unsur: pertama, hubungan sosial, dengan kemungkinan individu akan klaim sumber daya yang dipunyai secara kolektif, dan, kedua, kuantitas dan kualitas dari sumber daya-sumber daya tersebut (Portes, 1998). Pada akhirnya, Bourdieu menganggap bahwa modal sosial merupakan investasi dari pihak dominan sebagai bentuk menjaga dan mereproduksi solidaritas kelompok dan mempertahankan posisi dominan kelompok. Gagasan ini muncul dilengkapi dengan kajian singkat mengenai konsep dari modal kultural, habitus, dan field. Modal kultural dapat terwujud pada tiga keadaan: terkandung (pembawaan dari pikiran dan badan), terungkap secara objektif (melalui benda-benda kultural), dan terlembaga (kualifikasi pendidikan). Modal kultural satu dan yang lainnya akan berbeda dan dapat menciptakan penilaian bahwa beberapa modal menduduki posisi lebih tinggi daripada modal lainnya, dan tiap orang membawa kerangka disposisi yang berbeda-beda (habitus) ke lapangan (field) interaksi. Ruang sosial diartikan sebagai lapangan bagi kekuatan dan usaha agen-agen yang memiliki cara dan tujuan berbeda (Bourdieu, 1998). Lapangan ini memiliki ciri aturan permainan yang eksplisit maupun teratur atau sistematis. Lapangan juga bersifat dinamis, sehingga nilai-

nilai yang ada membentuk modal kultural dan modal sosial yang bersifat dinamis dan arbitrer (dapat dipertukarkan).

Modal sosial umumnya dapat didekati menggunakan dua perspektif. Pertama, melakukan kajian terhadap modal sosial dari perspektif pelaku (*actor's perspective*) yang dibentuk oleh Bourdieu, di mana ia melihat bahwa modal sosial berisikan sumber daya-sumber daya yang mana pelaku individu menggunakan dikarenakan adanya kepemilikan eksklusif (*exclusive networks*) terhadap jaringan. Kedua, mengamati modal sosial dari perspektif masyarakat (*society's perspective*) yang dikonsepsikan oleh Putnam, di mana ia melihat modal sosial sebagai barang publik yang dapat diatur oleh organisasi dan jaringan horizontal yang nampak dalam masyarakat. Coleman secara langsung mengamati kedua sudut pandang yang ada dengan cakupan lebih luas (*wider range*) mengenai bentuk-bentuk modal sosial, yang di dalamnya termasuk ekspektasi, norma, dan sanksi. (Rosyadi, 2003).

Coleman pertama kali menjadikan konsep modal sosial sebagai fokus kajian (Portes, 2000) ia mendefinisikan aspek-aspek yang terdapat dalam struktur hubungan antar individu memungkinkan individu-individu tersebut untuk menciptakan nilai-nilai yang baru. Kemudian, Putnam *dalam* (Lubis, 2001) juga menyatakan modal sosial mengacu pada aspek-aspek utama yang dimiliki oleh organisasi sosial, seperti kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jaringan-jaringan (*networks*) yang dinilai dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat.

Modal sosial sebenarnya memiliki dua artian yang berbeda secara individu dan kolektif (Portes, 2000). Menurut Portes, individu juga dapat memiliki modal sosial yang memiliki fungsi bagi aktualisasi dirinya, begitu juga dengan kelompok masyarakat yang memiliki modal sosial, dapat digunakan untuk mengoptimalkan potensi terbaiknya. Putnam *dalam* Lubis (2001) menjabarkan soal modal sosial yang mengacu kepada organisasi sosial yang memiliki jaringan sosial, norma-norma dan kepercayaan sosial

yang menjembatani terciptanya kerjasama dalam komunitas sehingga terjalin kerjasama yang menguntungkan satu sama lain.

Dalam temuan Putnam dalam Lubis (2001), modal sosial memiliki korelasi positif terhadap kehidupan demokrasi di negara Amerika Serikat. Norma-norma dan jaringan sosial yang disetujui serempak memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas kinerja lembaga-lembaga sosial. Baiknya mutu sekolah, pembangunan ekonomi yang pesat, penurunan tingkat kejahatan yang tercipta akibat hubungan sosial berpengaruh terhadap kinerja pemerintah sebagai representasi komunitas masyarakat setempat.

Menurut pandangan dari segi ekonomi, modal merupakan segala sesuatu yang menciptakan keuntungan atau menghasilkan. Modal sendiri terbagi menjadi (1) modal yang berbentuk materi seperti uang, gedung, atau barang; (2) modal budaya yang berbentuk kualitas pendidikan; kearifan budaya lokal; dan (3) modal sosial yang berbentuk kebersamaan, kewajiban sosial yang diinstitusionalisasikan dalam bentuk kehidupan bersama, peran, wewenang, tanggungjawab, sistem penghargaan dan keterikatan yang kemudian menghasilkan tindakan kolektif. Sebagai perekat bagi setiap individu dengan bentuk norma, kepercayaan dan jaringan kerja, modal sosial bersifat saling menguntungkan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Modal sosial adalah sebuah kekuatan yang dapat membangun *civil community* yang berfungsi meningkatkan pembangunan partisipatif, dengan demikian dasar dari modal sosial adalah *trust*, ideologi, dan religi. Modal sosial sendiri dapat dicirikan sebagai bentuk kerelaan individu untuk mengutamakan keputusan milik komunitas yang memiliki dampak tumbuhnya interaksi kumulatif yang menghasilkan kinerja yang mengandung nilai sosial.

Francis Fukuyama (1995) membuat ilustrasi modal sosial dalam *trust*, *believe*, dan *vertrauen* yang artinya pentingnya kepercayaan yang mengakar dalam faktor kultural seperti etika dan moral. Ketika *trust* muncul maka komunitas akan

membagikan nilai moral sebagai jalan pengharapan kejujuran. James S. Colement (1998) menegaskan modal sosial merupakan alat yang digunakan untuk memahami aksi sosial secara teoritis yang mengkombinasikan perspektif sosiologi dan ekonomi. Yang kemudian dipertegas kembali oleh Ismail Serageldin (1998) dengan pernyataan bahwa masyarakat selalu terlibat dalam modal sosial dan muncul bukan hanya dikarenakan dari interaksi pasar dan nilai ekonomis yang ada.

Ismail Serageldin memberikan klasifikasi modal sosial antara lain:

- Modal sosial dalam bentuk interaksi sosial yang tahan lama tetapi hubungan searah, seperti pengajaran dan perdagangan sedang interaksi sosial yang hubungannya *resiprokal* (timbal balik) seperti jaringan sosial dan asosiasi.
- Modal sosial dalam bentuk efek interaksi sosial lebih tahan lama dalam hubungan searah seperti kepercayaan, rasa hormat dan imitasi sedang dalam bentuk hubungan timbal balik seperti gosip, reputasi, *pooling*, peranan sosial dan koordinasi, semua ini mengandung nilai ekonomi yang tinggi.

Douglass North (1990) terkait hal tersebut menyebutkan relasi modal sosial diformulasikan dalam berbagai struktur, misalnya pemerintah, rezim politik, aturan hukum dan sistem peradilan. Berangkat dari jalannya pemerintahan, rezim politik, aturan hukum, dan sistem peradilan akan memiliki dampak pada munculnya sikap-sikap demokratis dari masyarakat lokal.

James Colement (1990) menyebutkan modal sosial merupakan inheren dalam struktur relasi individu satu dengan lainnya. Struktur relasi ini akan membentuk jaringan sosial yang menciptakan berbagai ragam kualitas sosial seperti kepercayaan, keterbukaan, kesatuan norma, dan menetapkan berbagai jenis sanksi bagi anggota. Putnam (1995) mengartikan modal sosial sebagai "*features of social organization such as networks, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit*". Modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu, dalam bentuk

norma, kepercayaan dan jaringkerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama.

Di samping itu, modal sosial juga dapat dimengerti sebagai bentuk pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki Bersama oleh komunitas, serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan kegiatan yang bersifat produktif. Bank Dunia (1999) mengemukakan modal sosial diartikan sebagai dimensi institusional yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial juga dapat diartikan sebagai perekat (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok dalam satu kesatuan yang tetap.

Modal sosial dianggap sangat penting bagi komunitas karena (1) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi; (2) menjadi media *power sharing* atau pembagian; (3) media pengembangan solidaritas; (4) memungkinkan mobilisasi sumber daya yang dimiliki; (5) memungkinkan pencapaian bersama; dan (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas (Lesser, 2000). Modal sosial yaitu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, percaya, dan memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilih oleh dirinya untuk berperan sesuai dengan tanggungjawab yang telah diberikan. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus tanggungjawab akan kemajuan bersama.

Tidaklah dapat disebut sebagai manusia apabila seseorang tidak berada di dalam suatu masyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial. Pada hakikatnya, manusia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara sepenuhnya tanpa campur tangan masyarakat. Dari proses kelahiran manusia hingga dewasa dan kemudian meninggal (dan dikubur) manusia selalu membutuhkan satu sama lain. Sifat mandiri yang dimiliki oleh manusia tidak dapat diartikan secara gamblang bahwa manusia dapat hidup secara tunggal, melainkan hidup secara harmonis dan adaptif dalam tatanan kehidupan bersama. Fairchild (1980) mengemukakan bahwa kelompok manusia yang memadukan diri

dilandaskan dengan adanya kepentingan bersama, ketahanan dan kekekalan/kesinambungan dapat dikatakan sebagai masyarakat.

Modal sosial yang tidak dapat lepas dari masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut, kebersamaan, solidaritas, toleransi, semangat bekerjasama dan kemampuan berempati. Jika modal sosial tersebut lenyap, maka kesatuan masyarakat, bangsa, dan negara akan terancam, setidaknya akan muncul masalah-masalah kolektif yang penyelesaiannya hampir tidak ditemukan. Kebersamaan sendiri dianggap dapat meringankan beban melalui pembagian pemikiran, dari hal itu dapat dipastikan semakin tinggi daya tahan, daya juang, dan kualitas kehidupan suatu masyarakat dipengaruhi oleh kuatnya modal sosial yang ada. Kehidupan bermasyarakat akan mudah diintervensi atau bahkan dihancurkan oleh pihak luar jika tidak memiliki modal sosial.

Pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh suatu komunitas secara bersama dan pola hubungan yang membuat sekelompok individu memiliki kemungkinan melakukan kegiatan yang produktif merupakan salah satu pemahaman dari modal sosial. Modal sosial dianggap penting dalam keberlangsungan suatu komunitas karena, (1) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas; (2) menjadi media pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3) mengembangkan solidaritas; (4) memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas; (5) memungkinkan pencapaian bersama; dan (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas (Lesser, 2000). Komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi orang pilihannya untuk berperan sesuai tanggung jawab yang ada merupakan bentuk dari modal sosial. Hal tersebut dapat menghasilkan *output* berupa kebersamaan, kesetiakawanan, sekaligus tanggungjawab akan kemajuan bersama.

Jamaluddin Ancok menyatakan, ketiadaan kerukunan dan kerja sama yang sinergistik dalam masyarakat akan memengaruhi perkembangan ekonominya. Secara umum, modal sosial

dikategorikan dalam dua kelompok. Pertama, menekankan pada jaringan hubungan sosial (*network*) yang diikat oleh kepemilikan informasi, rasa percaya, saling memahami, dan kesamaan nilai serta saling mendukung. Kedua, lebih menekankan pada karakteristik (*traits*) yang melekat (*embedded*) pada diri individu manusia yang terlibat dalam interaksi sosial sebagai kemampuan orang untuk bekerja bersama untuk satu tujuan bersama di dalam grup dan organisasi.

Dua jenis modal sosial di atas telah ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam bentuk gotong royong dan solidaritas kolektif. Apabila analisisnya dilanjutkan kepada dimensi yang lebih dalam lagi, modal sosial tersebut dapat menciptakan ketahanan pangan dalam masyarakat untuk menghadapi problematika kemiskinan dan kelemahan ketahanan pangan. Konsep tersebut selama ini kurang dimengerti oleh berbagai introduksi kebijakan pembangunan yang ada.

Pada era globalisasi (*globalization*) ini dan perekonomian dunia yang pro pasar bebas (*freemarket*), lambat laun tampak semakin jelas bahwa peranan *non-human capital* di dalam sistem perekonomian cenderung semakin berkurang oleh Coleman (Portes, 2000). Para stakeholder yang bekerja di dalam sistem perekonomian semakin yakin bahwa modal tidak hanya berwujud alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, alat-alat, dan mesin-mesin, akan tetapi juga berupa *human capital*. Sistem perekonomian dewasa ini mulai didominasi oleh peranan *human capital*, yaitu 'pengetahuan' dan 'keterampilan' manusia.

Selain pengetahuan dan keterampilan, *human capital* juga memiliki 'kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi satu sama lain'. Kemampuan ini menjadi modal penting terutama bagi aspek eksistensi sosial yang lain, di samping kegunaannya bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Coleman (Portes, 2000) mengatakan, modal yang demikian disebut dengan 'modal sosial' (*social capital*), yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok

dan organisasi. Oleh karena itu, dibenarkan apabila Bourdieu mengemukakan kritiknya terhadap terminologi modal (*capital*) di dalam ilmu ekonomi konvensional. Ia menyatakan bahwa modal bukan hanya sekedar alat-alat produksi, akan tetapi memiliki pengertian yang lebih luas yang kemudian diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: (a) modal ekonomi (*economic capital*), (b) modal kultural (*cultural capital*), dan (c) modal sosial (*social capital*). Modal ekonomi, berkaitan dengan kepemilikan alat-alat produksi. Modal kultural, terinstitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Modal sosial, merupakan bentuk dari kewajiban - kewajiban sosial.

Fukuyama (2002) menjelaskan bahwa kejanggalan dan kegagalan yang timbul di permukaan masyarakat disebabkan oleh para ekonom penganut mazhab neo-klasik yang menganggap faktor-faktor kultural dari perilaku (*behavior*) manusia sebagai makhluk rasional dan memiliki kepentingan diri (*self interested*) menjadi sesuatu yang dapat dikesampingkan. Kebudayaan tidak terpisahkan dengan tingkat kehidupan ekonomi, karena kebudayaan merupakan pembentuk aspek-aspek yang dimiliki oleh manusia, termasuk di dalamnya perilaku ekonomi. Smith menegaskan motivasi ekonomi merupakan suatu hal kompleks yang tertancap dalam kebiasaan-kebiasaan serta aturan-aturan yang lebih luas.

Oleh karena itu, aktivitas ekonomi merepresentasikan bagian yang krusial dari kehidupan sosial dan diikat bersama oleh varietas yang luas dari norma-norma, aturan-aturan, kewajiban-kewajiban moral, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang bersama-sama membentuk masyarakat (Muller, 2002). dan organisasi (Coleman, 2009). Burt (2002) secara komprehensif memberikan definisi bahwa modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk berhubungan antar satu sama lain yang selanjutnya dapat menjadi kekuatan penting bagi kehidupan ekonomi serta aspek eksistensi sosial lainnya.

Definisi lain dari modal sosial adalah sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara anggota kelompok yang kemudian menjadi kemungkinan akan terjalinnya kerjasama di antara satu sama lainnya (Fukuyama, 2005). Adapun Cox (2005) mendefinisikan, modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam koordinasi dan kerjasama untuk mencapai keuntungan bersama.

Sejalan dengan Fukuyama dan Cox, Partha dan Ismail S. (2009) mendefinisikan, modal sosial sebagai hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Kemudian Solow (2009) memberikan definisi tentang modal sosial, yaitu sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku yang dapat mendorong kemampuan dan kapabilitas bekerjasama serta berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlangsungan produktivitas.

Cohen dan Prusak L. (2001), mendefinisikan modal sosial sebagai tiap-tiap hubungan yang terjadi dan terikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), saling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk melakukan aksi bersama secara efisien dan efektif. Sejalan dengan dengan pernyataan di atas, Hasbullah (2006) menyatakan bahwa modal sosial merupakan segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan kerja sama di dalam masyarakat dalam rangka mencapai kapasitas hidup lebih baik, yang bersamaan dengan itu didorong oleh adanya nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur utama, seperti rasa saling percaya (*trust*), timbal balik, aturan kolektif dan sejenisnya.

Modal sosial yang lemah mengundang munculnya pertentangan nilai dan menonjolnya rasa saling tidak percaya.

Akan tetapi bila modal sosial yang tidak dikaitkan dengan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), bisa berakibat perhatian terhadap pentingnya kelangsungan hidup bersama dalam masyarakat menjadi terabaikan. Modal sosial dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemampuan masyarakat, tidak sekedar jumlah tetapi kehidupan masyarakat yang lebih berarti. Dengan dimensi yang ada dalam modal sosial, persatuan, budaya/adat istiadat, kepercayaan dan partisipasi.

Modal sosial merupakan hasil dari kerja sama, mengembangkan kepercayaan, dan membangun rangkaian sosial. Membangun modal sosial untuk menyusun lingkungan sosial yang kaya akan partisipasi dan peluang. Seperti suatu lingkungan yang memungkinkan pelaku untuk kerap bertemu, di mana berbagi nilai dan norma sosial dapat terus dipelihara. Hal ini lalu mendorong kemungkinan atas keberlanjutan interaksi berulang ke depan, kemudian mengurangi ketidakpastian dan memperkecil risiko (Ramstrom dalam Yustika, 2008). Bourdieu (dalam Yustika, 2008) memandang modal sosial sebagai aset produktif yang dibangun melalui investasi pada hubungan sosial; memerlukan waktu, usaha, bahkan uang untuk mengakumulasinya. Sekali terbangun, seperti modal lainnya (fisik maupun manusia), modal sosial kembalian, terdepresiasi oleh waktu, dan harus terus dijaga agar tidak berhamburan dan menjadi usang. Suatu investasi individual atas modal sosial tergantung pada karakteristik sosio-ekonomi perseorangan, pada usia tertentu, latar belakang keluarga tertentu, tingkat modal manusia (pendidikan dan pekerjaan), serta pendapatan (Coleman, 1988).

Dalam ekonomi, konsep modal sosial digunakan untuk menjelaskan fenomena ranging dari adopsi teknologi kelembagaan baik formal maupun informal. Pada level mikro, *social capital* memiliki dampak terhadap agribisnis, perdagangan internasional, pendapatan rumah tangga, transaksi keuangan, dan pengetahuan pertukaran antara pemodal dengan perusahaan. Shideler dan Kraybill (2009) mengemukakan modal sosial merupakan konsep

dari kekuatan yang menjelaskan tentang fenomena ekonomi jika didasarkan pada bukti empiris dan teori yang ada.

B. Norma, Kepercayaan dan Jaringan

Modal sosial dapat dibedakan menjadi dimensi kognitif dan struktural (Jones, 2005). Menurut pandangan Liu et.al (2014) modal sosial kognitif merupakan mediator yang menghubungkan antara manfaat ekonomi dan penduduk yang berperilaku pro-lingkungan. Sedangkan modal sosial dalam dimensi struktural meliputi komposisi, praktek, kelembagaan formal dan informal yang membantu memfasilitasi saling memanfaatkan dalam tindakan kolektif. Dari segi kognitif maupun struktural menurut Jones (2010), modal sosial secara positif berhubungan dengan aktifitas dan lingkungan masyarakat.

Pretty dan Smith (2013) dalam penelitiannya menyatakan adanya hubungan antara kepercayaan, timbal balik dan pertukaran, peraturan biasa, norma dan sanksi dan keterkaitan dengan masyarakat merupakan hal penting dalam pencegahan tindakan individual, sehingga dapat tercipta *outcome* yang baik secara positif. Tridico (2013) menyatakan bahwa modal sosial dibagi menjadi beberapa nilai yaitu kepercayaan, kerjasama, masyarakat sipil yang melibatkan diri dalam urusan publik, kesadaran dalam peraturan, jaringan sosial, reputasi, dan norma sosial anti korupsi. Kemudian Putnam (dalam Tridico, 2013) menyatakan bahwa modal sosial merupakan fitur organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang dapat memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk manfaat bersama. Dengan demikian atribut pokok modal sosial terdiri dari norma (*norm*), kepercayaan (*trust*), jaringan (*networking*). Frick et.al (2012) menjelaskan bahwa modal sosial dapat dilihat sebagai penghubung dalam menciptakan norma dan kepercayaan dalam struktur jaringan.

1. Norma

Norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial

tertentu. Hasbullah (2006) menjelaskan aturan-aturan kolektif tersebut kebanyakan berbentuk tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakat dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam hubungan sosial masyarakat. Menurut Fukuyama (2000), norma merupakan bagian dari modal sosial yang terbentuknya tidak diciptakan oleh birokrat atau pemerintah. Norma tidak terbentuk secara formal, melainkan terbentuk akibat adanya tradisi, sejarah, tokoh kharismatik yang membangun tata cara perilaku seseorang atau kelompok masyarakat, yang kemudian di dalamnya timbul modal sosial secara spontan dalam kerangka menentukan tata aturan kepentingan pribadi maupun kelompok. Liu et. al (2014) menyatakan tingkah laku modal sosial penduduk secara langsung digambarkan melalui norma, nilai dan aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Norma merupakan pemahaman, nilai, harapan, dan tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang dilengkapi sanksi yang bertujuan mencegah individu melakukan perbuatan menyimpang dalam masyarakat. Sebagian besar norma hanya dipahami tanpa ditulis, sehingga menentukan tingkah laku masyarakat dalam berhubungan sosial. Yustika menyatakan bahwa kerja sama yang dilengkapi dengan sanksi sosial dapat berfungsi sebagai komplementer untuk merangsang mekanisme efek modal sosial terhadap kinerja ekonomi. Dari kegiatan ekonomi tersebut, pelaku dapat mengakumulasi laba, upah, dan pengembalian modal sehingga terdapat insentif untuk memproduksi (2008: 201). Norma yang kuat memungkinkan setiap anggota kelompok atau komunitas saling mengawasi sehingga tidak ada celah bagi individu untuk berbuat menyimpang' (Yustika, 2008: 196). Menurut Putnam dan Fukuyama, norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerja sama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerja sama (Suharto: 4). North mengungkapkan bahwa norma merupakan sebuah 'institusi' yang mengatur interaksi sosial antar manusia. Norma terbentuk oleh interaksi nilai-nilai yang dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat di dalamnya dan sifatnya selalu harus

memberikan manfaat positif bagi setiap anggotamasyarakat itu. Saat norma tidak bermanfaat atau bahkan merugikan, norma akan hilang dan mati (Leksono: 2009: xxxvi).

2. Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosialnya yang didasari keyakinan bahwa orang lain akan melakukan sesuatu seperti harapannya dan senantiasa bertindak sesuai dengan pola Tindakan saling mendukung, atau setidaknya-tidaknya dalam kelompok tidak akan bertindak merugikan diri sendiri maupun anggota kelompoknya (Putnam, 1995). Menurut Fukuyama (2001), *trust* merupakan sikap saling mempercayai di masyarakat dengan sikap bersatu antar individu dan memberikan kontribusi dalam peningkatan modal sosial. Sedangkan menurut Francois (2003) *trust* adalah komponen ekonomi yang relevan melekat pada kultur yang membentuk kekayaan modal sosial. Selain itu, menurut Setiawati dan Alam (2010) kepercayaan mampu memfasilitasi masyarakat untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong. Kepercayaan dibagi menjadi dua, yaitu kepercayaan terhadap individu yang kita kenal dan kepercayaan terhadap individu yang tidak kita kenal (Pretty dan Ward, 2000). Rasa saling percaya dapat menimbulkan harapan untuk partisipasi lebih bagi sebuah komunitas untuk memecahkan masalah lingkungan yang ada.

Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan setiap kelompok, dibutuhkan 4 (empat) hal yang mendasar, yaitu:

a. Penerimaan

Sejak hubungan dimulai, maka setiap individu yang ada memerlukan jaminan akan diterimanya diri mereka secara penuh, termasuk di dalamnya rasa aman dalam mengemukakan pendapat dan berkontribusi dalam kegiatan kelompok. Suasana saling menghargai sangat dibutuhkan dalam penerimaan kelompok, sehingga kelompok tersebut dapat bertumbuh menjadi sebuah komunitas yang kuat. Saling mengenal dengan baik antar satu sama

lain merupakan awal tumbuhnya komunitas dalam perkembangan ikatan sosialnya. Sebuah kepercayaan tidak tumbuh begitu saja kepada orang baru, karena diperlukan pembuktian sikap dan perilaku masing-masing dengan waktu yang cenderung lama. Jika salah satu dari anggota melakukan kecurangan, maka kepercayaan yang dibangun oleh lainnya akan luntur seiring waktu. Maka dari itu, sikap dan perilaku yang dilandaskan kepada nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, kesetiaan dan saling melindungi sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan antar individu.

b. Berbagi Informasi dan Kepedulian

Setiap orang yang berhubungan dalam satu komunitas, agar bisa memecahkan masalah bersama, membutuhkan informasi mengenai :

- Kehidupan, pengalaman, gagasan, nilai masing-masing.
- Masalah-masalah yang dianggap penting dalam kehidupan mereka.

Untuk menumbuhkan kepercayaan, diperlukan pertukaran informasi yang jujur dan terbuka. Kepedulian akan berpengaruh terhadap informasi yang akan diberikan dalam hubungan-hubungan tadi. Setiap warga yang berhubungan dalam masyarakat akan menggunakan dan terlibat untuk memecahkan masalah di lingkungannya apabila ada kepedulian di antara mereka. Apabila warga masyarakat mempunyai kemampuan dan kemauan saling berbagi, saling peduli, maka kepentingan-kepentingan individu akan mengalah kepada kepentingan-kepentingan komunitas kelompok.

c. Menentukan Tujuan

Kebutuhan yang ketiga adalah untuk menentukan tujuan bersama. Setiap anggota (warga) tidak akan tertarik untuk memberikan komitmen yang dibutuhkan apabila tidak terlibat dalam perumusan tujuan. Maka perlu diikutsertakannya anggota dalam proses pengambilan keputusan sebagai bentuk penentuan komitmen warga itu sendiri untuk melaksanakan pemecahan masalah secara bersama-sama.

d. Pengorganisasian dan Tindakan

Di dalam organisasi, kelompok, ataupun komunitas pada mulanya akan menentukan tujuan bersama yang hendak dicapai oleh anggota-anggotanya, kemudian keseluruhan anggota akan memastikan adanya orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah dibentuk di awal. Oleh karena itu, dalam komunitas atau warga masyarakat, sangat diperlukan peranan dari pemimpin sebagai penumbuh kepercayaan anggota masyarakat. Pemimpin yang memiliki sikap jujur, adil, peduli dan melindungi seluruh anggotanya akan dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari seluruh unsur komunitas yang dipimpin.

Tindakan-tindakan kolektif yang dilandaskan rasa percaya yang tinggi antar anggota masyarakat akan meningkatkan partisipasi tiap individu dalam berbagai macam kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan dan kemajuan bersama. Apabila rasa saling percaya yang dipupuk itu hancur, maka akan mudah timbul problematika sosial di dalam masyarakat. Hal itu disebabkan oleh sulitnya menghindari situasi kerawanan sosial dan ekonomi yang mengancam karena perasaan percaya yang kurang antar individu. Semangat dan kemauan kolektifitas masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan demi tercapainya tujuan dan kemajuan bersama secara perlahan akan menghilang kemudian masyarakat akan cenderung apatis, akibatnya biaya pembangunan akan membengkak karena hanya menunggu gerakan dari masyarakat setempat. Selain itu, apabila rasa percaya telah luntur antar individu, maka sikap-sikap yang menyimpang dari norma dan nilai sosial akan tumbuh. Tindakan kriminal seperti aksi destruktif dan anarkis dengan mudah timbul di permukaan, kekerasan dan kerusuhan massa akan cepat tersulut dan sulit diredam yang pada akhirnya menimbulkan perasaan terisolasi dari masyarakat. Pada akhirnya situasi tersebut akan menyebabkan masyarakat yang mudah terkena penyakit kejiwaan seperti kecemasan, putus asa yang kemungkinan besar

dapat melakukan Tindakan fatal bagi dirinya sendiri, masyarakat, maupun bagi negara (Putnam, 1993).

Kepercayaan tidak akan bekerja dengan optimal jika salah satu spektrum yang penting yaitu rentang rasa mempercayai (*the radius of trust*) diabaikan begitu saja. Di dalam kelompok, aosisasi, maupun bentuk grup lainnya yang memiliki orientasi *inward looking* cenderung memiliki *the radius of trust* yang sempit. Hasbullah (2006) menyatakan bahwa kelompok ini memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih kecil dalam pengembangan modal sosial yang kuat dan dapat menjadi keuntungan bagi mereka ke depannya. Jadi, *trust* atau rasa percaya (mempercayai) merupakan sebuah bentuk keinginan seseorang untuk mengambil resiko di dalam hubungan sosialnya dengan manusia lain dilandaskan perasaan yakin akan timbal balik yang sesuai dengan harapannya. Setidaknya orang yang dipercayainya akan bertindak dengan pola saling mendukung (tidak menjatuhkan) dan tidak merugikan diri sendiri maupun anggota kelompoknya yang lain.

3. Jaringan

Aspek ketiga dalam modal sosial adalah jaringan. Mawardi (2007) menyatakan modal sosial dibangun tidak hanya oleh satu individu. Sebuah modal sosial juga terletak pada tedensi yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian yang penting dari nilai-nilai yang melekat. Jaringan hubungan sosial ini cenderung sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok dengan warna tipologis yang khas. Biasanya jaringan ini terbentuk atas dasar turun temurun (*repeated social experiences*) secara tradisional dan kesamaan kepercayaan pada dimensi (*religious beliefs*) yang cenderung memiliki kohesif tinggi tetapi memiliki rentang jaringan maupun *trust* yang sempit. Namun sebaliknya, apabila kelompok dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan dengan ciri pengelolaan lebih modern, maka tingkat partisipasi anggotanya akan cenderung lebih baik dan rentang jaringannya lebih luas.

Hasbullah (2006) menjabarkan tipologi kelompok terakhir akan lebih mampu menghadirkan dampak positif bagi kelompok maupun kontribusinya pada pembangunan masyarakat secara luas. Jaringan sosial merupakan bentuk dari modal sosial. Jaringan sosial yakni sekelompok orang yang dihubungkan oleh perasaan simpati dan kewajiban serta oleh norma pertukaran dan *civic engagement*.

Jaringan ini bisa dibentuk karena berasal dari daerah yang sama, kesamaan kepercayaan politik atau agama, hubungan genealogis, dan lain-lain. Jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi sebuah institusi yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut (Pratikno dkk: 8). Dilihat dari tindakan ekonomi, jaringan adalah sekelompok agen individual yang berbagi nilai-nilai dan norma-norma informal melampaui nilai-nilai dan norma-norma yang penting untuk transaksi pasar biasa. Melalui pemahaman ini dapat dijelaskan bahwa modal sosial dapat bermanfaat bukan hanya dalam aspek sosial melainkan juga ekonomi.

Tinsley dan Lynch (2001) menyatakan bahwa kekuatan jaringan tergantung dari sudut apa jaringan tersebut, yaitu pertimbangan asal dan berada pada tingkat mana jaringan tersebut. Jaringan masyarakat paling kuat dan paling tebal pada tingkat tujuan dan berlanjut menjadi lemah ketika melihat pada tingkatan daerah, nasional dan internasional. Menurut Tridico (2013) jaringan dan koneksi baik dibangun pada grup kecil dan suku dominan di Rusia. Menurut Fields (dalam Tridico, 2013) jaringan dan koneksi memiliki sisi gelap yaitu ketika dibawa pada lingkungan untuk hal-hal yang tidak terlihat dalam menjelaskan modal sosial.

Keseluruhan bentuk dari “kapital/modal” dapat diasosiasikan sebagai aset-aset dari berbagai macam hal dan ia dapat diciptakan. Aset diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengalirkan manfaat untuk membuat proses produktif di masa mendatang menjadi

lebih efisien, efektif, inovatif dan dapat diperluas/disebarkan dengan mudah. Akumulasi dari beragam tipe sosial, psikologis, budaya, kognitif, kelembagaan, dan aset-aset yang terkait yang dapat meningkatkan manfaat bersama dari kerjasama yang ada disebut sebagai modal sosial. Di sini, perilaku memiliki makna positif seperti yang dilakukan untuk orang lain dengan yang diperuntukkan bagi diri sendiri.

Modal sosial membutuhkan penekanan pada hal-hal seperti:

- a) Apa unsur-unsur yang menyusunnya?
- b) Apa koneksi/yang menghubungkan mereka?
- c) Konsekuensi apa yang dapat dikaitkan dengan unsur-unsur dan interaksi tersebut?

C. Kategori Modal Sosial

Modal sosial dengan mudah dapat dipahami ke dalam dua kategori yang berhubungan satu sama lain. Dua kategori ini sangat mendasar untuk memahami modal sosial. *Pertama*, kategori struktural. Kategori ini berkaitan dengan bentuk dari organisasi sosial, terutama peran-peran, aturan-aturan, preseden, dan prosedur serta beragam jaringan yang mendukung kerjasama yang bermanfaat untuk seluruhnya dari tindakan kolektif, yang mana aliran manfaat tersebut dikatakan sebagai hasil dari modal sosial.

Kedua, kategori kognitif. Kategori ini berasal dari proses mental yang kemudian menghasilkan gagasan/pemikiran yang dimantapkan oleh budaya dan ideologi, norma-norma, nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang memiliki kontribusi atas terciptanya kerjasama.

Kedua kategori modal sosial yang telah disebutkan dan dijabarkan di atas terkait secara intrinsik. Meskipun jejaring, peran, aturan, preseden dan prosedur dapat diamati, mereka tetap datang dari hasil proses kognitif. Aset modal struktural memiliki sifat ekstrinsik dan dapat diamati, sementara kognitif tidak dapat

diamati. Namun, keduanya tetap memiliki keterkaitan di dalam praktiknya dan di dalam teori sosial.

Pada saat yang sama, ekspektasi akan menciptakan peran. Selanjutnya peran tersebut akan menciptakan harapan. Dapat dimaknai bahwasanya orang bertindak berdasarkan peran yang diterimanya dan orang-orang dengan peran yang sama akan saling berinteraksi. Dikatakan bahwa peran dan aturan bersifat subjektif sebab adanya sanksi dan insentif yang menguatkan mereka, tetapi semua akan bergantung kepada efektivitas “harapan bersama” yang dimiliki mereka. Pada akhirnya, hal yang objektif akan dipengaruhi oleh penilaian yang bersifat subjektif.

Sudah sepatutnya dibuktikan bahwa norma-norma, nilai, sikap dan keyakinan menciptakan harapan tentang tindakan seseorang, dengan implikasi menciptakan harapan tindakan seseorang sebagai contoh, apakah ada kerjasama antar satu sama lain? Apakah dilakukan atas dasar kedermawanan? Hal-hal tersebut merupakan alasan faktor subjektifitas e cara jelas dapat memengaruhi konsekuensi objektif.

Grootaert (2001) menyatakan konsep dan interpretasi terkait modal sosial memiliki keberagaman, tetapi tampaknya muncul sebuah consensus bahwa modal sosial berarti kemampuan para pelaku (aktor) untuk mengamankan manfaat (*benefits*) yang ada melalui nilai-nilai luhur keanggotaan dalam jejaring sosial. Dalam konteks ini, Grootaert menekankan peran penting berbagai perkumpulan atau asosiasi lokal. Bagi Grootaert, berbagai perkumpulan atau asosiasi lokal tersebut memainkan peran dalam tiga cara. Pertama, berbagi informasi di antara para anggota perkumpulan; kedua, mengurangi berbagai perilaku oportunistik; dan ketiga, memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif.

Hasbullah (2006: 8) menyatakan masing-masing tokoh yang mempopulerkan konsep modal sosial mempunyai perbedaan penekanan terhadap unsur pembentuknya. Perbedaan tersebut termasuk hal pendekatan analisis. Namun, intinya konsep modal sosial selalu memberikan penekanan pada kebersamaan

masyarakat dalam mencapai tujuan bersama guna memperbaiki kualitas hidup dan terus melakukan perubahan secara berkesinambungan. Masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak dan bertingkah laku serta berhubungan dengan pihak lain dalam melakukan proses perubahan. Acuan nilai dan unsur yang merupakan ruh dari modal sosial antara lain yaitu, sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling mempercayai, dan diperkuat lagi dengan nilai-nilai dan norma yang mendukungnya. Selain itu, unsur kemauan masyarakat juga memegang peran penting dalam upaya melakukan perubahan secara terus menerus, mempertahankan nilai, membentuk jaringan-jaringan Kerjasama, hingga penciptaan kreasi dan ide-ide baru yang menjadi jati diri sesungguhnya dari modal sosial.

Bab 3

KEARIFAN LOKAL

A. Pengertian Kearifan Lokal

Di dalam kamus, kata kearifan lokal dipisah dan diartikan sebagai: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Sedangkan, dalam kamus Inggris Indonesia karya John M. Echols dan Hassan Syadily *wisdom* atau kearifan diartikan sebagai kebijaksanaan dan *local* atau lokal berarti setempat. Kearifan lokal dapat diartikan juga secara umum yang merujuk sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, keberagaman, positif, serta diikuti dan didalami oleh anggota masyarakat. *Local wisdom* ini dalam disiplin antropologi disebut dengan istilah *local genius*.

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya (Suhartini, 2009).

Masyarakat lokal yang hidup seimbang berdampingan dengan alam memiliki pengetahuan yang diwariskan turun-temurun tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak alam. Hal ini didukung oleh pendapat Nygrin (1999)

dalam Shohibuddin “a local community who lives in ecological balance with nature, is regarded as an environmental expert and the keeper of the wisdom of an equitable and sustainable traditional resources management system” Kearifan tradisional yang bersifat lokal sesuai dengan daerahnya masing-masing merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh kelompok masyarakat bersangkutan.

Lampe (2009) mengatakan kearifan lokal sebenarnya merupakan modal sosial dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan kiranya penting untuk digali, dikaji, dan ditempatkan pada posisi strategis untuk dikembangkan menuju pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kearah yang lebih baik (Siswadi,2010), Kearifan lokal dibangun dari persepsi masyarakat akan kehidupan di masa lalu yang selaras dengan alam kemudian tertuang di dalam tingkah laku, pola hidup dan kebiasaan sehari-hari serta mendatangkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan membentuk ikatan yang kuat antara masyarakat dengan kearifan lokal yang dianut.

Local wisdom atau kearifan lokal diartikan oleh Gobya (2003) sebagai kebenaran yang telah menjadi kebiasaan dalam suatu daerah. Kearifan lokal ini juga ialah perpaduan gabungan dari berbagai nilai yang ada serta nilai-nilai suci firman Tuhan. Suatu kearifan lokal terbentuk atas budaya yang unggul dalam masyarakat setempat ataupun permukaan bumi dalam arti luas. Produk budaya ini berasal dari masa lalu yang harus terus dijadikan pegangan hidup. Nilai yang terkandung juga bukan hanya nilai lokal namun terdapat nilai yang dianggap sangat menyeluruh.

Menurut Caroline Nyamai-Kisia (2010), kearifan lokal merupakan sumber pengetahuan yang selalu berubah-ubah, berkembang, dan dilestarikan oleh populasi tertentu dalam kesatuan pemahaman mereka terhadap alam dan budaya yang ada disekitarnya. Kearifan lokal ini bisa menjadi dasar suatu pengambilan kebijakkan dalam level lokal di berbagai bidang, misalnya, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan

dan kegiatan masyarakat pedesaan. Kearifan budaya lokal yang terkandung ialah pengetahuan lokal yang telah menyatu dengan sistem kepercayaan, budaya, norma dan dikomunikasikan dalam sebuah tradisi serta mitos yang dipercayai dalam waktu yang lama.

B. Pembangunan dan Kearifan Lokal

Hal pertama yang harus dikenal oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di suatu daerah adalah pola pikir dan apa saja yang ada di daerah menjadi sasaran pembangunan itu. Pemborosan biaya dan tenaga jika tempat wisata yang dibangun tanpa adanya binaan kepada masyarakat sekitarnya. Tempat wisata sebagai “ikon” atau sumber pendapatan dapat menyejahterakan masyarakat, untuk itu akan menjadi sia-sia jika pemerintah tidak mengetahui kebudayaan masyarakat ataupun potensi yang ada di daerah tersebut.

Pranata dan kelembagaan yang ada di dalam masyarakat yang berbeda geografisnya akan dikembangkan dengan strategi adaptasi dalam memproduksi. Jadi, mengenali unsur-unsur sosial budaya merupakan hal yang sangat krusial dalam sebuah proses pemberdayaan dan pembangunannya. Setiap masyarakat memiliki potensi swadaya sendiri dengan kondisi ekologi dan geografis yang berbeda-beda dilandasi latar belakang sosial budaya yang unik dan khusus (lihat Mubyarto, 1994).

Adapun tiga alasan pokok pentingnya budaya lokal dalam pembangunan bagi masyarakat setempat dikemukakan oleh Coletta (1987). Pertama, secara unsur budaya lokal yang berlandaskan legitimasi tradisional dimata masyarakat binaan menjadi sasaran pokok program. Kedua, komunikasi berharga bagi penduduk dalam suatu unsur budaya secara simbolis. Ketiga, keberagaman unsur-unsur budaya menjadi sarana yang paling bermanfaat bagi perubahan apabila dibandingkan dengan visualisasi permukaan jika hanya dilihat dalam keterkaitan fungsinya saja (lihat Dive, 1985).

Kearifan lokal sebagai “aset” berfungsi menjaga kesinambungan dan kelestarian sehingga masyarakat mampu

memenuhi kebutuhan dari generasi ke generasi seterusnya, tanpa merusak atau mengurangi “aset” tersebut. Kearifan lokal menjadi sebuah pedoman dalam masyarakat berperilaku yang mewujudkan kesadaran terhadap hukum kausalitas dan simbiosis mutualisme.

Masyarakat akan mengembangkan kearifan lokal menurut kondisi lingkungan sosial dan alam serta pengetahuan yang ada. Contoh kearifan lokal dapat dilihat pada beberapa etnis di Bengkulu, misalnya: etnis Rejang yang merupakan moyang di tepian hutan menggunakan zonasi hutan (imbo-lem/hutan dalam-imbo u'ai atau hutan muda – penggea imbo atau hutan pinggiran), peraturan terkait penanaman dan penebangan kayu serta pembukaan ladang (lihat Tjahjono, dkk, 1999).

Lainnya, etnis Serawai yang berupa masyarakat peladang mengembangkan kearifan lokal dalam pembukaan ladang. Awalnya terdapat 20 jenis pantangan (*celako humo* atau cacat humo), dewasa ini hanya bertahan 7 jenis pantangan, yaitu: ulu tulang buntu, sepelancar perahu, kijang ngulangi tai, macan merunggu, sepit panggang, bapak menunggu anak, dan nunggu sangkup. Alasan celako humo oleh bangsa Serawai dilatarbelakangi yang dipahami secara transendental dalam bentuk hukum: bahwa bagi siapapun yang melanggar pantangan akan terkena penyakit atau gagalnya hasil ladang.

Isi norma dalam celako humo bukan hanya berisikan aturan terkait penjagaan kelestarian lingkungan yang bersifat ekologis, namun juga terdapat etika sosial yang memposisikan kedudukan seseorang dalam sosialnya. Sama halnya etnis Enggano yang menduduki wilayah berekosistem pesisir memiliki kearifan lokal dalam pemberdayaan sumberdaya hutan dan kelautan. Pengelolaan tersebut yaitu berupa aturan cara penangkapan ikan, teripang, keong laut (lola²), dan pelestaraian terumbu karang (lihat Tjahjono, 1995).

Bersamaan, suatu modal sosial dan modal budaya yang saling berkaitan haruslah dipelajari. Masyarakat sebagai wadah kebudayaan dipelajari dengan satu istilah yaitu sosial budaya.

Manusia menciptakan dan menyebarkan sebuah dimensi kebudayaan yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Orang tidak melihat sebuah kebudayaan dan yang tampak merupakan perilaku (behaviour) berupa interaksi antar sesama menurut aturan yang berlaku membentuk suatu tradisi budaya (culture tradition), dengan warisan budaya lokal yang diterima dari generasi sebelumnya. Adanya kebutuhan zaman dan kondisi lingkungan sehingga sebuah tradisi budaya diubah. Kebudayaan itulah, membuat manusia menafsir segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai pengalaman hidup yang dialaminya.

Segala macam kerja dilakukan masyarakat pada lapangan hidupnya, konsep dan resep kelompoknya adalah kearifan budaya dan digunakan untuk mencipta serta berinovasi. Harus dipahami bahwa wujud kebudayaan sebagai suatu sistem pengetahuan, kepercayaan dan konsep yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini memberi sebuah pedoman pada masyarakat dalam berperilaku dan bersikap atas hubungan lingkungan sosial dan alam tempat mereka berada.

Modal sosial yang dikendali oleh sistem pengetahuan akan kalah jika dibandingkan dengan modal budaya yang dimiliki masyarakat. Modal budaya yang memiliki kekuatan abstrak mampu mengharuskan dan mengarahkan penduduk untuk tunduk berperilaku dalam berhubungan dengan lingkungan alam dan sosial ditempat mereka tinggal sesuai sistem pengetahuan tersebut.

Kebudayaan sebagai suatu sistem dapat diperoleh melalui proses belajar oleh masyarakat dari ia lahir sampai akhir hayatnya. Kebudayaan secara tidak sadar melakukan tekanan untuk mengikuti dan membentuk suatu perilaku dari pendahulu yang telah menciptakannya. Penjelasan terkait dimensi kebudayaan ini tercantum dalam buku C. Kluchhohn, berjudul *Mirror For Man, The Relation Of Antrhoplogy to Modern Life*, 1949:23-29. Pandangan bahwa kebudayaan adalah “warisan” tidak perlu diganggu, cukup dijalankan, merupakan kenyataan yang sudah tercipta dan dilembagakan.

Jika kebudayaan dilihat sebagai warisan sosial dan lainnya lagi menjadi sebuah modal sosial seperti segala sesuatu yang tampak, berupa perilaku dan benda-benda produk, maka aktivitas penelitian terhadapnya merupakan ide yang telah terbentuk dalam kelompok etnik. Pandangan ini menyatakan bahwa setiap kebudayaan ialah susunan teknik beradaptasi terhadap ekosistem dalam mendapatkan *input* dari luar. Strategis adaptif lahir dari masyarakat melalui lembaga yang berfungsi evaluatif, selektif dan dinamis mengembangkan segala aspek kebudayaan dan memproduksi *output* berupa perilaku pemangku kebudayaan.

Semua itu ialah hasil perpaduan modal budaya yang didalamnya terdapat *local knowledge* (pengetahuan lokal) dengan *local wisdom* (kearifan lokal), menjadi sumber perkembangan budaya secara dinamis melalui proses transformasi. Apabila ilmuwan Sosial mengandalkan penelitian terhadap fase perubahan masyarakat dan kebudayaan, maka yang menjadi perhatian utama adalah perubahan bentuk, fungsi dan peranan dari yang lama kepada yang baru, misalnya pembaharuan ide, pergeseran nilai dan perilaku, perubahan fisik benda yang sudah ada atau yang sedang terjadi.

Kebudayaan memunculkan berbagai kebutuhan dan kepentingan serta cara-cara penyediaannya. Selain kebutuhan yang bersifat primer, terdapat biaya kebutuhan kebudayaan yang lebih besar seperti gengsi sosial, perilaku konsumtif dan berpenampilan mewah yang hedonistis atas dasar keinginan memperoleh prestise atau derajat. Sedangkan kebudayaan yang dilihat dari segi waktu, memiliki sebuah pancaran sejarah masa lalu dalam bentuk yang telah dilakukan selesai, berkembang dan berubah, dan akhirnya sampai pada suatu masyarakat. Pengembangan sejarah dari berbagai warisan sosial akan dilanjutkan oleh anak sebagai suatu warisan yang telah mengalami penyesuaian kondisi lingkungan dan kemajuan dalam masyarakat.

C. Transformasi Kearifan Lokal

Hampir seluruh unsur-unsur kehidupan telah mengalami perubahan atas waktu, terjadinya penemuan baru dan terjadi pengembangan unsur budaya asing yang berasal dari luar. Berdasarkan teori transformasi, terdapat beberapa unsur budaya yang hilang karena tidak diperlukan lagi dan lainnya mengalami perubahan tertentu. Namun, adakalanya sebuah unsur budaya yang telah hilang tersebut muncul kembali sebagai suatu konsep yang menjadi agenda untuk diperbaharui dan interpretasi yang baru juga. Unsur lainnya yang berlanjut dianggap penting oleh sebagian anggota masyarakat atas nilai dan gagasan yang dimilikinya. Perubahan bisa membawa kepada pembaharuan dan mungkin juga membawa kepada kemunduran, yang mana dipengaruhi oleh selektivitas.

Perubahan tradisi, disebut demikian karena sejak kehidupan manusia ditentukan oleh alam yang secara perlahan manusia tersebut menciptakan dan memajukan kebudayaan yang telah dimilikinya. Pewarisan budaya secara simbolis, lisan/tulisan, kultus, ritus dan kepercayaan dipercayai dan dipelajari oleh masyarakat sekarang.

Timbul pertanyaan, apakah masih perlu dianut sebuah teori transformasi dalam masyarakat yang dinamis dan mengandalkan ilmu pengetahuan serta teknologi modern seperti sekarang ini. Kondisi dalam suatu pemerintah dan kehidupan bermasyarakat telah mengalami perubahan mendasar yang memengaruhi budaya bangsa. Selain perkembangan globalisasi dan modernisasi dalam bidang-bidang kehidupan, merupakan dampak yang berpengaruh terhadap kebudayaan.

Revolusi pengetahuan terkait masalah mendasar telah berjalan di negara maju atau negara industri. Hal ini menyebabkan kemajuan ekonomi industri membuat negara makin maju dan kaya, semestara negara berkembang akan terlambat dan semakin miskin. Kemajuan negara menimbulkan kekuatan sosial sebagai akibat inovasi dan investasi atas pengetahuan melalui berbagai penelitian

berencana dan mendalam. Kemajuan tersebut mengubah kehidupan manusia kepada paruh kedua pada abad ke-20, sedangkan pada abad 21, negara maju melaju dengan pembuatan barang-barang sintetis, penyaringan air laut untuk irigasi, pengolahan bahan menjadi bahan siap pakai dan kemajuan lainnya.

Inovasi dalam unsur-unsur kehidupan membawa perubahan besar secara berencana dan diterima secara sukarela, maka budaya inovasi sudah tertuang. Daya cipta dibangun dengan revolusi pengetahuan dengan melakukan penelitian dan peningkatan kreativitas secara berkala, sampai pada titik yang dapat dirasakan sesuai kebutuhan, maka daya cipta telah menjadi bagian dari kebudayaan. Inovasi dan daya cipta saling berhubungan diantara keduanya yang mengajukan perkembangan terhadap kebudayaan.

Masyarakat yang tidak menganut paham individualisme akan menganggap sebuah kompetisi suatu hal yang negatif. Masyarakat ini menganggap bahwa kemajuan dan pembaharuan tidak perlu adanya kompetitif, cukup bekerja sama dan bergotong royong menghasilkan kebermanfaatan. Maju dan menikmati bersama adalah hal yang penting. Paham ini menyamakan sebuah kompetisi sebagai konflik. Pengalaman Pembangunan Lima Tahun Pertama dan Kedua, suasana dalam masyarakat mampu dikendalikan dengan konsep “stabilitas sosial” sehingga kompetisi berhenti dan konflik terjaga tanpa mengganggu stabilitas.

Kompetisi merupakan tujuan masih adanya kehidupan, keinginan dan kebutuhan. Sebagai gejala kemanusiaan, kompetisi membawa kelompok manusia di dalamnya mengetahui apakah kompetisi menggejala atau tidak. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas berbagai suku bangsa dan identitas kebudayaannya masing-masing.

Setiap kebudayaan mempunyai tingkatan, kuantitas, dan kualitas kompetisi yang berbeda serta cara pengendaliannya. Sejauh mana kompetisi setiap kebudayaan membawa kepada kemajuan dan perubahan. Rupanya kebudayaan yang meletakkan “harmonisasi” dalam hubungan Sosial dan lingkungan, kompetisi

muncul dari adanya aset sosial yang diperlombakan sehingga yang tampil dipermukaan ialah menyusul pemenuhan kebutuhan dan kepentingan, biasanya pemuasan diri terhadap benda material dan posisi sosial. Bukanlah kompetisi dalam arti kompetisi pada kesanggupan ilmu dan teknologi yang didukung oleh sikap logis, kritis dan analitis.

Pra-syarat sikap kompetitif adalah menjunjung tinggi martabat manusia sebagai perseorangan dengan nilai-nilai demokratis serta hak asasi manusia, agar gerak hidup berlangsung secara dialektik. Keberlangsungan kompetisi yang rasional dan sehat diatur oleh norma sosial dan nilai budaya. Kompetisi tertuju pada kegiatan produktif dan etos kerja tinggi dan bukan sifat “kecemburuan sosial”. Pada umumnya kebudayaan yang dimiliki suku bangsa menempatkan “harmonisasi” lebih utama demi menjaga sebuah keseimbangan hidup. Lainnya, ditandai dengan sikap kompetitif yang tidak rasional, tetapi pendekatan simbolik dengan melampirkan perasaan. Memiliki kemampuan adaptasi yang cukup dimengerti, dengan dinamikanya terlihat pada kemampuan peleburan (asimilasi) dan daya serap yang tinggi yang datang dari arah sekitarnya.

Uraian ini dimaksudkan untuk membuka cerita budaya dalam mencari konsep pembangunan kebudayaan nasional. Masyarakat transisi seperti Indonesia, antara inovasi dan kompetisi saling berhubungan dan tidak akan menemukan ujung kemajuan yang diharapkan. Kompetisi hanya berputar pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan sesaat. Inovasi menjadi lambat dipengaruhi oleh limpahan persaingan. Gelora kompetitif berasal dari pemimpin organisasi, elite sosial, pemimpin masyarakat hingga kalangan bawah memanfaatkan kesempatan kompetitif tersebut.

Baik inovasi dan kompetitif, keduanya hal yang mendasar bagi gejala kemanusiaan dari segi kebudayaan. Jika dibarengi dan didukung oleh kondisi sosial, keduanya mampu membawa kepada kemajuan dan modernisasi. Modal sosial terlihat dalam keseharian misalnya seperti sifat kekeluargaan, tolong menolong,

saling membantu, setia kawan, kooperatif, saling percaya, semua itu tampak pada perilaku dan tindakan sosial. Sedangkan, watak dan karakter terlihat pada rasa malu atau *shame culture*, rasa bersalah atau *guilt culture*, rasa bangga dan emosi keagamaan yang tinggi.

Pelaksanaan kearifan lokal dalam modal sosial berbentuk mencari dan memanfaatkan untuk melindungi masyarakat miskin dan bermasalah, menciptakan kesadaran kesertaan masyarakat dalam organisasi sosial, mengendalikan pertentangan dan kekerasan, memelihara sumber daya alam dan sosial. Kearifan lokal turun dari pengetahuan budaya lokal yang membentuk kecerdasan pada seseorang atau kelompok untuk mengelola kehidupannya dari generasi ke generasi. Kearifan lokal tercakup berbagai mekanisme penyesuaian diri dan cara untuk bersikap, berperilaku, dan bertindak kedalam tatanan sosial.

Dimensi kearifan lokal merupakan tata cara pengambilan keputusan, keterampilan, sumber daya, dan tipe pada solidaritas sosial. Rupa atau bentuk tampak pada kecerdasan lokal yang dialihkan pada daya cipta, inovatif dan kreativitas demi kemandiriannya. Sukma dan nilai-nilai budaya yang telah disepakati bersama diambil oleh kearifan lokal. Individu yang mengambil sukma dalam masyarakat disebut *indigenouse local* atau pribumi lokal. Kearifan dan budaya lokal adalah cara berpikir dan bertindak masyarakat dalam ruang lingkup budaya, kelompok antar kelompok dan dalam interaksinya dengan pemerintah. Nilai kearifan dan budaya lokal ini bersifat cepat berubah, tidak memiliki status, perubahan dan perkembangan yang mengikuti masa. Diperlukannya sebuah identifikasi berlanjut untuk mendeteksi nilai kearifan dan budaya lokal ini dalam sebuah konteks dunia politik dan pemerintahan.

Bab 4

MODAL BUDAYA DAN MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN BANGSA

A. Perbedaan Modal Budaya dan Modal Sosial

Institusi lokal dapat dijadikan dasar berpijak masyarakat lokal oleh karenanya modal sosial dapat berkembang dan mengalami erosi dan melemah serta menguatnya modal sosial pada masyarakat dapat dipotret melalui institusi lokal.

Potret positif modal sosial dapat digambarkan dalam formulasi kepercayaan (*trust*) yang meliputi kohesi sosial, empati, transparansi, militan (*inklosif*) yang kesemuanya itu akan berdampak pada memunculkan kontrol sosial baru, revitalisasi modal sosial baru, perlu membangun kerjasama dengan pihak luar, demokrasi dan desentralisasi. Normaharus diwujudkan dalam bentuk kesetaraan dan kemitraan sehingga tidak muncul perbedaan perlakuan antarwarga, dalam alokasi ini akan muncul kendala kebudayaan luar, anomali primordialisme dan *vested interest* sehingga perlu dipersiapkan jawaban kedepan guna membenteng tantangan yang akan muncul.

- Potret negatif modal sosial dapat digambarkan dalam formulasi melemahnya modal sosial sehingga modal sosial mengalami erosi dalam bentuk: interaksi sosial, ditandai dengan pelanggaran norma, krisis kepemimpinan,

kerenggangan hubungan sosial dan dehumanisasi. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya kontrol sosial, sentimen kelompok, meningkatnya semangat individualisme dan merebahnya nilai budaya material. Bila kondisi ini dibiarkan maka akan berakibat pada anomali, pembangkangan, konflik dan perilaku menyimpang. Komunitas, muncul sikap baru dari komunitas dalam bentuk apatis, pragmatis, pengingkaran dan budaya potong kompas (menerobos). Sikap ini muncul karena disebabkan oleh tidak ada kepercayaan, rendahnya rasa handarbeni, egoisme, menghalalkan segala cara dan pelayanan birokrasi yang rendah. Jika kondisi ini tidak segera diantisipasi, maka yang muncul adalah stagnan (kemandegan), menurunkan partisipasi, pelanggaran nilai sosial dan dimungkinkan terjadi KKN.

- Apabila erosi modal sosial dalam interaksi sosial dan komunitas benar-benar terjadi, maka institusi lokal akan kehilangan *social trust* yang ditandai dengan rasa kecurigaan, rasa tidak aman, menurunnya rasa kebersamaan, pembangkangan, dan akan menyebabkan rendahnya keterbukaan sehingga intensitas komunikasi rendah, tingginya manipulasi publik dan dampak yang paling parah adalah disintegrasi sosial.

| MODAL BUDAYA (<i>CULTURE CAPITAL</i>) | MODAL SOSIAL (<i>SOCIAL CAPITAL</i>) |
|--|--|
| 1. Pengetahuan Lokal (<i>Local Knowledge</i>) a. Hukum dan adaptasi hukum serta ketentuan yang menjadi pedoman perilaku, sifat dan sikap dalam tindakan sosial bagi suku bangsa tertentu atau suatu kelompok. | 1. Modal sosial secara luas terdiri atas norma-norma sosial dan hubungan antara individu dan kelompok. Dalam norma, terlihat aksi sosial dan rekan yang saling memperkuat dan menguntungkan. |

-
- b. Aturan dan peraturan yang bersumber dari nilai adat dan agama, dilaksanakan dan tercermin dalam perilaku individu masyarakat.
- c. Cita-cita, gambaran, serta struktur yang didapat dari warisan dan hasil adaptasi tiap generasi. Bersumber dari mitologi dan legenda serta cerita rakyat.
2. Kearifan Lokal (*Local Wisdom*)
- a. Kearifan ini turun dari pengetahuan budaya lokal yang membentuk kearifan individu atau kelompok untuk mengembangkan kehidupannya secara turun-temurun.
- b. Kearifan lokal tercakup berbagai cara kerja yang bersifat adaptif dan cara-cara untuk bersikap, berperilaku dan bertindak dalam tatanan sosial.
- c. Dimensi kearifan lokal adalah; cara pengambilan keputusan; keterampilan dan sumber daya lokal; model kesetiaan sosial.
- d. Perwujudannya tampak pada kecerdasan lokal yang ditransfer pada daya cipta, pembaruan dan kreatifitas untuk kemandirian lokal.
- e. Kearifan lokal mengambil jiwa dan semangat dari nilai budaya yang telah disepakati bersama.
2. Hubungan atas didasarkan aturan dan peraturan, sehingga tampak adanya sistem yang bentuknya lebih abstrak adalah sebuah struktur sosial.
3. Hubungan teretentu yang memiliki aturan biasanya berwujud sebuah lembaga sosial, di dalamnya terjadi tindakan sosial dan interaksi antara individu dan kelompok untuk memenuhi tujuan, kebutuhan, kepentingan dan harapan lembaga.
4. Modal sosial berisi lembaga-lembaga sosial; etika sosial dan lingkungan. Kearifan lokal merupakan bagian kecil dari modal sosial, sedang etos sosial merupakan sifat, sikap, perilaku dan karakter sosial sesuai *world view* masyarakat lokal tersebut.
5. Modal sosial tampak dalam keseharian, seperti; sifat kekeluargaan, sifat saling menolong, setia kawan; bentuk-bentuk kerja sama; saling percaya; semua tampak dalam perilaku dan tindakan sosial.
6. Kepribadian dan karakter sosial, tampak dari sifat dan sikap sebagai; memiliki rasa malu, bersalah, bangga dan perasaan keagamaan yang tinggi.
-

| | |
|---|--|
| <p>f. Kearifan Lokal adalah suatu kondisi dewasa dan kuat yang terjadi dalam masyarakat tertentu, biasanya dimiliki oleh individu-individu yang mengambil alih sukma dalam masyarakat (indigenous lokal yaitu pribumi lokal).</p> | <p>7. Pelaksanaan kearifan lokal dalam modal sosial adalah menelusuri dan memanfaatkannya untuk; melindungi masyarakat miskin dan bermasalah; membangun keseimbangan dalam organisasi sosial; mengendalikan pertentangan dan kekerasan; menjaga sumber daya alam dan sosial.</p> |
|---|--|

B. Peran Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Dalam Penyelesaian Konflik Nelayan Di Daerah Kabupaten Situbondo

Nelayan di Kabupaten Situbondo mengalami konflik yang berbentuk persaingan kerja antara nelayan besar dan nelayan kecil dan juga nelayan besar dengan nelayan besar. Konflik antara tiga pihak ini memunculkan adanya penentuan seorang pemimpin masyarakat yang dilihat dari kemampuan ekonomi yang dimilikinya, menyebabkan persaingan baru yang menjadikan munculnya konflik lain dalam pemilihan pemimpin pada masyarakat sekitarnya.

Salah satu penyebab konflik di Kabupaten Situbondo yaitu menimbulkan beberapa pelanggaran, pelanggaran seperti pelanggaran jalur melaut dan wilayah mencari ikan, muncul banyaknya pencurian rumpon di tengah laut, perbedaan persepsi menyebabkan perdebatan pemakaian alat tangkap, turunnya hasil tangkapan pada musim paceklik, dan faktor ekonomi yang memaksa mereka melanggar hal-hal tersebut. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo sering kali melakukan sosialisasi dan sidak baik ke perkampungan nelayan dan ke laut tempat nelayan mencari ikan sebagai akibat rendahnya kesadaran akan hukum pemerintah.

Terdapat kearifan lokal sebagai modal sosial berupa upacara *Ojung* dan *Petik Laut* dalam penyelesaian konflik yang timbul ke permukaan. Tradisi adat tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan dan toleransi antar sesama nelayan di Kabupaten Situbondo. Terdapat juga kearifan lokal sebagai modal sosial yang bersifat kelembagaan yaitu Rukun Nelayan yang merupakan lembaga bentukan nelayan lokal, dibentuk dan dijalankan tanpa campur tangan pemerintah.

C. Masyarakat Indonesia Multikultural

Hana Pangabean dkk (2014:45) pernah mempertanyakan tentang “siapa sih orang Indonesia itu?”. Hampir selalu mengemuka tatkala membicarakan tentang orang Indonesia. Lalu adakah yang disebut sebagai orang Indonesia? Kalau kita berbicara tentang orang Indonesia sudah pasti menyebut karakteristik yang merupakan hasil abstraksi ciri pada berbagai etnik yang ada dan secara umum ditemukan ada pada semua etnik yang ada, meski dengan derajat berbeda-beda.

Perasaan asing terhadap karakteristik yang disebutkan juga muncul akibat proses berpikir yang cenderung mengontraskan satu kelompok dengan kategori lainnya (Fiske & Taylor, 2007). Dalam proses berpikir demikian, maka pertama-tama yang menjadi fokus perhatian adalah perbedaan, apa yang tidak sama, dan ini menghambat proses untuk menemukan kemiripan bersama. Kecenderungan demikian selalu muncul lebih dahulu dalam proses berfikir ketika individu bertemu dengan seseorang dari etnik yang berbeda. Dalam pertemuan demikian, segera muncul persepsi terhadap perbedaan yang ada; bukan kesamaan. Bahkan perbedaan ini bisa terasa lebih besar daripada realitas yang sesungguhnya. Jika sudah demikian, maka bukan saja terlihat perbedaan pada berbagai aspek perilakunya, tetapi juga penekanan yang berlebihan terhadap perbedaan tersebut.

Proses mengontraskan membuat kita gagal mengasimilasi karakteristik diri yang boleh jadi lebih banyak kemiripan daripada perbedaannya. Kita menjadi sadar betapa berartinya

peribahasa kita “tak kenal maka tak sayang”. Makin dikenal makin terlihat adanya kesamaan antarkita, dan karenanya perbedaan seolah tereleminasi. Dengan begini, rasanya menarik kalau kita sedikit menoleh pada yang disebut dengan Indonesia: seperti apa dan siapakah masyarakat Indonesia?.

Jika kembali pada apa itu Indonesia, maka dapat dikatakan Indonesia merupakan negara yang dikategorikan sebagai salah satu negara yang paling heterogen di dunia. Dengan lebih dari 300 suku bangsa dan lebih dari 250 bahasa, rasa-rasanya hampir tidak ada bangsa yang lebih beragam daripada bangsa Indonesia. Kita mengenal suku Jawa, Sunda, Batak, Papua, Minang, Dayak dan lain sebagainya. Pada kategori yang lebih besar lagi, kita sering menyebut orang-orang Indonesia Timur etnik yang berdiam di provinsi Indonesia bagian timur. Di sini menyatu suku-suku yang berdiam di Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, maupun Papua.

Di luar dari keragaman suku bangsa dan bahasa, kita juga masih menemukan berbagai agama dan kepercayaan yang tumbuh subur di Indonesia mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha hingga Konghucu. Tentu saja ini menambahkan khazanah keanekaragaman Indonesia. Berbagai kelompok ini masuk ke Indonesia dengan periodisasi dan dengan faktor pendorong yang berbeda serta berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, sekalipun mayoritas Indonesia (lebih dari 85%) beragama Islam, namun kita bisa menemukan pulau atau provinsi di Indonesia. Kompleksitas Indonesia semakin bertambah manakala kita berbicara lokasi tinggal 300 suku bangsa ini yang terentang dari Sabang sampai Marauke, karena variabel keterjangkauan ini, maka tidak mengherankan muncul masalah akan pengenalan yang minim terhadap sejumlah suku bangsa atau kelompok etnik lain yang tinggal di area terpencil.

D. Indonesia Negara Agraris

Dalam pandangan Triandis (2002) budaya merupakan “sistem makna bersama yang dihayati sekelompok orang yang berdiam dalam wilayah geografis dan dalam kurun sejarah yang

sama serta bertutur dengan menggunakan bahasa tertentu”. Merujuk pada pengertian ini, maka tampak tiga aspek yang disyaratkan oleh triandis untuk menyebutkan sebuah masyarakat dengan budaya yang sama adalah penggunaan bahasa, berada dalam wilayah geografis, dan kurun waktu yang sama.

Sepanjang ditemukan penghayatan terhadap hidup dan bermasyarakat dengan pengalaman-pengalaman serupa pada sejumlah orang yang tinggal dalam wilayah geografis yang sama dan berbahasa tertentu maka bisa dikatakan kalau mereka memiliki satu budaya.

Pengertian demikian memungkinkan kita menyebut berbagai kelompok etnik di Indonesia yang tinggal dari Sabang sampai Marauke ini, mengembangkan cara hidup bermasyarakat serupa dan berbahasa Indonesia sebagai bangsa Indonesia. Sikap dan pola perilaku sebuah kelompok sangat erat terkait dengan mata pencaharian utama masyarakat tersebut. Bercocok tanam / bertani sudah tidak lagi merupakan mata pencaharian utama masyarakat Indonesia.

Masyarakat agraris dituntut kerja sama yang sangat tinggi, mulai dari persiapan lahan untuk persemaian benih, membangun pengairan dan lumbung padi bersama, dan juga memanen pada waktu yang sama. Oleh karena tuntutan kerja sama tinggi, maka mau tak mau antarwarga diharapkan rasa toleransi yang tinggi, sikap kooperatif, dan gotong royong demi tujuan bersama, yakni panen melimpah.

E. Model Budaya Standar Indonesia

Menurut Hana Pangabean dkk (2014:53) bahwa dengan memahami budaya asal dan pengaruhnya terhadap cara pikir, cara rasa, dan cara berperilaku pribadi, kita juga akan memahami bias pribadi yang terjadi sebagai akibatnya. Berangkat dari kebiasaan masyarakat agraris yang guyub, maka individu yang otonom dan mandiri akan lebih mudah terkesan egois bagi mata kita. Sebaliknya, bagi yang berangkat dari masyarakat berburu,

perilaku guyub sangat mungkin akan terkesan lamban dan teralu emosional.

Karena itu, tidak keliru jika pembahasan ini tetap diperuntukkan untuk kita semua, bukan hanya orang-orang dari luar di Indonesia. Melalui hasil kajian yang di paparkan dalam buku ini, kita menjadi paham siapa kita. Sementara bagi non-Indonesia, juga Australia dalam ilustrasi tersebut tadi, buku ini jelas sangat penting. Tanpa pemahaman yang baik terhadap budaya sendiri dan budaya orang lain, niscaya sulit mewujudkan kerja sama.

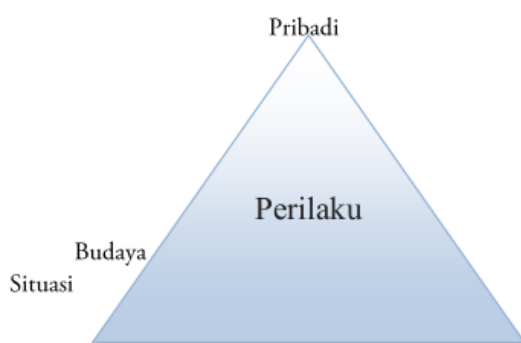
Penetapan fokus budaya sangat penting, karena menentukan dari sudut pandang manakah hal tersebut dicermati. Dari ulasan tadi, kita mengetahui kalau masyarakat Indonesia termasuk kelompok yang pola komunikasinya tidak langsung, dengan kata lain, dalam mengutarakan sesuatu cenderung berputar dan tidak langsung pada inti masalah. Berikut tujuh budaya standar Indonesia, yaitu; 1). Religiusitas; 2). Guyub; 3). *Multiculturality*; 4). Kepemimpinan fasilitatif; 5). Komunikasi tersirat; 6). Nrima (sering ditulis tidak baku: Nrimo); dan 7). *Generalist dan technical (functional) excellence* (Hana Pangabean dkk, 2014:56).

Budaya standar dikembangkan dengan menggali kasus-kasus bersifat kritis (*critical incidents*) yang muncul ketika dua orang dari latar belakang budaya bertemu dan berinteraksi. Contoh sederhana adalah cara menunjukkan respek yang rasanya terdapat pada hampir semua budaya. Dalam budaya “saya” misalnya, memberikan respek berarti menyampaikan secara lugas apa yang sebenarnya terjadi, tanpa ditutup-tutupi. Dengan keterbukaan dan kebenaran seseorang merasa sungguh dihargai oleh pihak lain. Akan tetapi, bagi budaya “orang lain” respek dimunculkan dengan tidak menyertakan sesuatu secara terust terang, karena berpotensi memermalukan orang lain.

Situasi dengan budaya tumpang tindih inilah yang kemudian di analisis, untuk diidentifikasi isu apa yang muncul dalam pertemuan budaya; dan juga masalah apa saja yang sama atau

mirip. Setelah kasus-kasus serupa dikelompokkan, maka kategori ini kemudian diberi nama sesuai dengan tema yang dimunculkan, dan inilah yang dikenal sebagai budaya standar.

Namun demikian, sebelum sampai pada penetapannya sebagai budaya standar sebuah masyarakat, temuan ini divalidasi terlebih dahulu oleh ahli yang memahami betul kedua budaya yang terlibat dalam interaksi. Secara khusus yang dicermati apakah sudut pandang pada masing-masing budaya sungguh mempersentasikan cara pandang kedua budaya tersebut.



Gambar. 4.1: Pengaruh Tiga Aspek Kemunculan Perilaku,

Dalam gambar di atas tampak tiga faktor yang menentukan kemunculan perilaku, yakni faktor internal individu itu sendiri (pribadi), faktor eksternal di luar individu (situasi), dan faktor budaya dimana perilaku itu terjadi. Kalau seseorang tidak sampai pada pemahaman bahwa pokok masalahnya terletak pada kebiasaan-kebiasaan dari budaya, maka penjelasan atas perilaku umumnya ditujukan pada aspek pribadi.

Pada perilaku “respek” yang sudah penulis jelaskan tadi misalnya, penjelasan perilaku di alamatkan pada itensi personal orang tersebut untuk mempermalukan lawan bicaranya dengan penilaian langsung, terbuka, dan tanpa tedeng aling-aling. Oleh sebab itulah muncul rasa tersinggung karena faktor personal ini. Akan tetapi, seandainya individu paham kalau lawan bicaranya memang besar dan tumbuh dalam budaya yang mementingkan

nilai keterusterangan dalam menyampaikan sesuatu, tentu rasa tersinggung ini tidak muncul.

Pemahaman tentang dinamika kompetisi antarbangsa dalam era global dan kaitannya dengan kondisi indonesia diharapkan membuka cakrawala baru bagi pembaca. Tantangan global sudah di depan mata, potensi SDM indonesia tidak kalah untuk menanggapi tantangan tersebut. Yang menjadi pertanyaan apakah potensi ini hanya sekedar wacana dan harapan, atautkah sudah teruji dalam dunia kerja?. Nah, pembaca yang budiman, bagian yang selanjutnya akan mencoba menggali dan semoga menjawab pertanyaan tersebut.

F. Tantangan dan Kompetensi Global Indonesia

1. Religiusitas

Masyarakat indonesia adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama. Religiusitas masyarakat didukung penuh oleh negara, hal itu eksplisit ditunjukkan dengan ditempatkannya nilai religiusitas sebagai sila pertama pancasila. Pendidikan agama sudah diberikan sejak usia dini di sekolah dan menjadi pelajaran wajib dan penting. Terlepas dari agama yang dianut, nilai agama dipandang sebagai salah satu nilai terpenting untuk masyarakat indonesia.

Ada dua makna penting dalam religiusitas masyarakat indonesia:

1. Budaya standar ini menekankan sikap spiritual individu untuk menghayati agama yang dipeluknya dengan sungguh-sungguh, namun pada saat yang sama juga tidak terlalu menekankan jenis agama yang dianutnya. Singkatnya, seorang indonesia akan selalu bersedia mengapresiasi religiusitas pemeluk agama yang berbeda. Tentunya ini menjadi modal sosial yang penting dalam menghidupi keberagaman agama yang menjadi salah satu pilar utama dalam kemajemukan masyarakat indonesia.

2. Religiusitas mengandung makna kedua yang memastikan kepercayaan orang Indonesia kepada Tuhan. Jadi, ateisme bukanlah sesuatu yang secara normatif diterima dalam masyarakat Indonesia, selain memang secara legal dilarang.

Dalam dunia bisnis, baik lokal maupun global, adanya nilai religiusitas pada diri orang Indonesia menjadi salah satu perhatian penting. Konsep SQ dengan inti *bekerja adalah ibadah* menunjukkan peran religiusitas dalam dunia kerja di Indonesia. Religiusitas dalam dunia kerja di Indonesia. Religiusitas mengindikasikan integritas manusia dan merupakan salah satu kompetensi terpenting yang harus dimiliki. Religiusitas dijadikan sebagai pegangan atau petunjuk apa yang harus dilakukan karena adanya kepercayaan akan Tuhan semesta alam, terutama saat mengalami masa-masa sulit.

Dalam konteks kerja sama internasional, religiusitas menunjukkan pentingnya menghargai dan menghormati agama sesama rekan kerja. Hal itu perlu dilakukan jika ingin bekerja efektif dalam bekerja sama dengan orang Indonesia. Religiusitas dipandang sebagai suatu ciri yang pada umumnya terlihat pada setiap pemimpin bisnis Indonesia. Pendekatan religiusitas akhirnya memberikan sisi positif dan kekhasan tersendiri bagi para pemimpin Indonesia di mata masyarakat global yang jarang atau bahkan tidak ditemukan pada pemimpin bangsa lain.

2. Guyub

Budaya standar “guyub” menjadi ciri kuat masyarakat Indonesia. Dari maknanya, kata ini menggambarkan suasana kelompok yang nyaman dan harmonis karena semua komponen yang ada dalam keadaan selaras. Mengenai hal ini, Suseno (1996) mendeskripsikannya sebagai “semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima, dalam suasana tenang dan sepakat”.

Situasi selaras ini yang disebut sebagai harmoni, dan merupakan elemen kunci dalam interaksi sosial masyarakat Indonesia. Konsep harmoni di ambil dari kosmologis Jawa yang menggambarkan keseimbangan elemen-elemen di alam semesta, dalam diri, dan antara diri dan alam, dan antara diri dan Tuhan (Suseno, 1996; Mulder, 2001). Keselarasan alam dan diri lahir batin ini yang member energy positif pada kehidupan yang berjalan di sekitarnya. Para ahli budaya Jawa sepakat bahwa harmoni bukanlah sesuatu yang dicapai (achieved) tetapi sesuatu yang sudah ada dan harus dijaga (preserved) (Suseno, 1996; Mulder, 2001).

Dalam konteks masyarakat Indonesia, guyub berasosiasi dengan kelompok; bukan individu. Karena itu, saat berbicara tentang guyub ini terbayang sudah kecenderungan yang kuat dari orang Indonesia untuk menjadi guyub. Bagi orang Indonesia, penting sekali untuk mengetahui apakah pertemuan tersebut akan menjadi guyub. Jadi pertama-tama adalah *dengan siapa dia akan beraktivitas disana, bukan dalam acara apakah dia akan melibatkan diri*. Selama bersama dengan lingkungan orang-orang yang akan membuat situasi menjadi guyub, maka apapun acaranya, orang Indonesia bisa menjalaninya. Hal ini sejalan dengan hasil identifikasi Triandis (1995) bahwa orang Indonesia mengalami kesulitan apabila hidup terlepas dari kelompoknya.

Budaya standar guyub sudah jelas mewadahi kecenderungan masyarakat Indonesia untuk berorientasi pada relasi. Lalu bagaimana dengan dunia keranya ? jika mengacu pada variasi budaya yang dikemukakan Hall (1976), masyarakat Indonesia tergolong masyarakat dengan batas yang tumpang tindih antara dunia pribadi dan dunia tegas. Dengan dekatnya kehidupan pribadi dengan kehidupan kerja, nilai guyub juga dikenal di tempat kerja yang biasanya disebut sebagai suasana kekeluargaan. Tentunya budaya guyub ini memiliki dampak positif. Lingkungan kerja dengan suasana kekeluargaan menjadi penting. Saling mengenal dan saling berbagi akan memunculkan kedekatan,

sebagaimana tergambar pada pepatah *tak kenal maka tak sayang*. Namun demikian, dampak negatif dari budaya guyub juga ada. Kita bisa menemukan banyak kasus ketika relasi ditempatkan di atas urusan kerja. Dalam lingkungan kerja yang seharusnya bisa disikapi secara professional, kita boleh saja berharap bahwa urusan pribadi atau keluarga tidak boleh menghalangi. Tapi pada kenyataannya tidak begitu. Dampak lanjutan dari budaya guyub adalah kesediaan untuk saling menolong dalam bekerja, dikenal dengan istilah gotong-royong.

Suasana guyub dipertahankan dengan menjaga kerukunan melalui upaya menghindari konflik. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki beragam teknik untuk menghindari konflik. Dalam konteks dunia kerja, teknik menghindari konflik cukup dapat diterima khususnya dalam kelompok kerja domestik. Namun demikian, kecenderungan menghindari konflik berpotensi menjadi kerikil bagi kinerja global orang Indonesia. Ciri tersebut dapat dinilai negatif karena dipandang tidak berani berpendapat atau memiliki opini tersendiri, sehingga dianggap kurang memiliki kualitas. Selain itu, sikap menghindari konflik sering tidak efektif untuk pemecahan masalah dalam konteks global yang lebih impersonal dan berorientasi pada tugas. Catatan ini menjadi penting bagi orang Indonesia yang akan memupuk karier global, yaitu dengan berusaha melatih keberanian untuk membicarakan konflik secara terbuka disertai pengendalian emosi sehingga tetap berkepala dingin saat membicarakan konflik.

Sebaliknya nilai guyub adalah kearifan lokal yang dapat menjadi keunggulan global orang Indonesia. Selama tidak mengedepankan sikap pasif dan menghindari konflik, nilai guyub berorientasi pada *group harmony* ternyata efektif untuk mencapai target dan kinerja bagi orang Indonesia. Praktik guyub juga dihagai dan mendapat apresiasi penting dari rekan kerja asing orang Indonesia. konkritnya, sejumlah praktik guyub yang dimunculkan pemimpin Indonesia dan dihargai rekan kerja asingnya adalah; kesediaan memberikan kepercayaan, membuka komunikasi

dua arah, melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan, berkompromi dalam menyelesaikan konflik, memaafkan/member toleransi terhadap kesalahan bawahan, hingga menunjukkan kesalahan disertai dengan perbaikan. Karena membangun rasa percaya bawahan juga menjadi salah satu kekuatan pemimpin indonesia dalam konteks global.

3. Keberagaman (*Multiculturality*)

Keberagaman menjadi salah satu budaya standar yang mencirikan orang indonesia. budaya ini ditandai dengan kesediaan mental untuk menerima perbedaan. Perilaku yang sering kali muncul adalah sikap yang cepat mengenali perbedaan, diikuti dengan perilaku yang menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Menariknya, upaya menghargai di sini muncul dalam perilaku yang menahan diri, menjaga agar relasi sosial tidak terganggu karena perbedaan budaya yang biasanya ditunjukkan dengan sikap tidak terlalu membesar-besarkan perbedaan tersebut. Selintas perilaku ini sepertinya pasif namun sebetulnya didasari oleh upaya dan kendali yang kuat untuk menjaga keselarasan relasi sosial.

Satu hal yang pasti, cirri keberagaman orang indonesia tidak pernah dimaknai untuk menyatukan perbedaan ke arah keseragaman. Sepertinya, orang indonesia merasa keberagaman adalah sebuah realitas sosial yang memang sudah terberi, bukan untuk diubah tetapi untuk dijalani dan dihidupi. Maka, pertanyaanya adalah bagaimana keberagaman itu dikelola dan bagaimana individu beradaptasi dengan keberagaman tersebut.

Nilai budaya Indonesia sangat kuat diwarnai oleh nilai dan norma yang menunjukkan pentingnya menghargai keberagaman. Nilai tenggang rasa terus menarik perhatian para ahli hingga beberapa decade kemudian setelah Geertz (bisa dibaca dalam Mulder,2001;Magnis-Suseno,1996;dan Anderson,1996). Para ahli ini mengulasnya dalam konteks budaya jawa. Namun demikian, kita semua tentunya ingat bahwa tenggang rasa menjadi salah satu butir penting dalam pengalaman pancasila yang disosialisasikan

dengan sangat kuat, terutama pada zaman orde baru. Tenggang rasa tampaknya konsep yang akrab untuk telinga kita dan kala kita mendengar ini, memang benak kita langsung mengarah pada keberagaman yang ada di Indonesia. Namun demikian, apakah kita pernah benar-benar paham makna dari tenggang rasa itu sendiri?

Selanjutnya, pembahasan di lanjutkan dengan konsep *tepa salira* dalam budaya Jawa. Nilai ini juga menjadi penting dalam menyikapi keberagaman. Mulder (2001) membahas nilai ini sebagai nilai penting dalam interaksi sosial masyarakat Jawa yang menekankan pengendalian diri dan sikap 'tahu diri' yaitu menempatkan diri sendiri dalam suatu tatanan sosial. Sejalan dengan tenggang rasa, implementasi nilai ini bermuara pada keselarasan sosial. Dalam bukunya, Tjitra (2001) menggali makna konsep *tepa salira*. Meskipun berawal dari khasanah Jawa, nilai *tepa salira* kemudian mendapatkan bentuknya yang lebih nasional, dikenal dengan konsep 'mawas diri'. Mawas diri menekankan pada upaya untuk lebih bersikap hati-hati sebelum bertindak dan tidak 'judgemental'.

Tidak dapat dipungkiri, tenggang rasa dan *tepa salira* adalah nilai yang penting dalam budaya Indonesia yang menggambarkan nilai dalam menyikapi keberagaman. Namun jika kita cermati dengan kritis, keberagaman Indonesia sudah ada jauh sebelumnya. Keberagaman Indonesia berkembang melalui proses berabad-abad. Berawal dari konteks geografisnya sebagai jembatan jalur perdagangan antar bangsa, wilayah kepulauan Nusantara mulai menerima pengaruh budaya asing yang membuatnya berkembang menjadi masyarakat majemuk. Perubahan budaya seperti ini dikenal sebagai proses akulturasi, yaitu proses perubahan budaya yang terjadi karena pertemuan yang berkesinambungan antar kelompok budaya yang berbeda (Berry, 2002).

Persoalan keberagaman masuk kedalam dimensi *intercultural sensitivity* (ICS), yaitu kompetensi global orang Indonesia yang berfokus pada kemampuan mengenali dan mengelola perbedaan.

Dari hasil studi dimensi ICS yang melibatkan 775 responden dari berbagai profesi dengan membandingkan aspek keberagaman yang dimunculkan orang Indonesia dalam tim lokal dan juga tim internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa orang Indonesia memunculkan keberagaman secara menonjol saat berada dalam tim lokal dan tim internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang Indonesia membawa ciri keberagaman domestik dalam konteks internasional (Pangabean, 2002). Keberagaman domestik yang intens dalam masyarakat Indonesia diubah menjadi suatu kekuatan keberagaman di dunia internasional. Konteksnya kembali lagi pada kesediaan untuk dapat menerima perbedaan budaya.

Satu hal yang kemudian menjadi menarik terkait keberagaman orang Indonesia adalah keunggulan dalam mengelola relasi di kancah global. Apakah kemudian pengalaman masyarakat Indonesia yang terbiasa menyikapi perbedaan akan membantu dalam memasuki keberagaman global? Meskipun perbedaan budaya bukan lagi hal baru bagi orang Indonesia, namun fakta yang ada saat ini menunjukkan para pemimpin atau profesional Indonesia masih kurang terdengar gaungannya dalam kancah global.

4. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitating Leadership*)

Kepemimpinan yang memfasilitasi adalah ciri budaya standar yang paling dekat untuk menggambarkan peran pemimpin Indonesia. Dalam pengertian ini, seorang pemimpin diharapkan mengayomi dan dekat dengan bawahan, meskipun bukan berarti tanpa jarak. Pemimpin di Indonesia diharapkan melibatkan bawahan namun tetap menampilkan wibawa kekuasaannya dalam bentuk arahan dan pengambilan keputusan yang tegas. Dengan demikian partisipasi bawahan bersifat terarah dan konstruktif, membantu pimpinan untuk mengambil keputusan secara komprehensif. Kepemimpinan fasilitatif bukan berarti membiarkan dominasi bawahan dengan sedemikian rupa sehingga menghilangkan peran pemimpin.

Pada dasarnya, kepemimpinan fasilitatif adalah bagian dari sebuah sistem pengambilan keputusan komunal yang didasari oleh konsensus yang populer yang disebut sebagai *musyawarah untuk mufakat*. Mulder (2001) menyebutkan, *musyawarah* adalah proses konsultasi dan penyampaian pesan secara mutual yang menggambarkan proses demokrasi dan egaliter pada masyarakat pedesaan. Hingga kini, musyawarah diterima sebagai sistem pengambilan keputusan yang paling di dukung di banyak konteks masyarakat Indonesia.

Teknik pengambilan keputusan bermusyawarah bercirikan pelibatan aktif dari semua anggota kelompok dalam memberikan pendapat. Harapannya adalah dengan adanya musyawarah, keputusan kelompok merupakan konsensus yang mencerminkan pendapat tersebut (mufakat). Dan pada praktiknya musyawarah lebih ditekankan pada pelibatan aktif anggota dalam memberikan masukan sedangkan keputusan akhir biasanya diambil oleh pemimpin atau kelompok pemimpin.

Melalui gaya kepemimpinan fasilitatif, para pemimpin Indonesia memiliki suatu kelebihan yang tercermin dalam perilaku kerja kepada bawahannya. Seorang pemimpin Indonesia dalam budaya standar digambarkan berperan seperti layaknya seorang bapak yang menjadi panutan dan diharapkan dapat memotivasi serta megayomi anak buahnya.

Sosok pemimpin Indonesia yang bercirikan pemaaf dan memiliki toleransi yang tinggi dapat menciptakan dua kondisi yang jauh bertolak belakang. Disatu sisi, bagi bawahan, sikap tersebut dianggap memotivasi dan memberikan rasa percaya yang dapat mempererat relasi sosial dan jauh dari kesan otoriter. Sementara di sisi lain, ciri kepemimpinan seperti demikian dapat menimbulkan pandangan bahwa pemimpin tersebut lemah, tidak tegas atau tidak lugas, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya yang mengagungkan kepemimpinan *directive* dan *controlling* seperti di China.

Pola kepemimpinan fasilitatif ini boleh jadi merupakan satu nilai positif yang dapat diterapkan para pemimpin atau profesional Indonesia. Namun sejalan dengan pola tersebut, kualitas dan kompetensi tetap perlu ditunjukkan untuk meningkatkan performa kerja, baik saat bekerja sama dengan para bawahan, rekan kerja, atau rekan bisnis. Konteksnya tidak hanya dalam lingkup lokal tetapi juga lingkup global.

5. Komunikasi Tersirat

Komunikasi tersirat adalah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan gaya komunikasi umumnya orang Indonesia. Budaya standar ini ditandai dengan isi pesan yang syarat dengan simbol dan alur pesan yang tidak langsung alias berputar. Memahami budaya standar komunikasi tersirat akan sangat membantu pemahaman perilaku orang Indonesia, karena budaya standar ini mengarahkan cara orang Indonesia dalam mengartikulasikan dirinya dan menyampaikan pesan.

Menurut Hall (1976), cara berkomunikasi ala masyarakat Indonesia sebagaimana digambarkan sebelumnya, menggambarkan gaya komunikasi *high-context* atau disebut juga sebagai gaya komunikasi tidak langsung (*indirect communication style*). Masyarakat *high-context* berkomunikasi dengan banyak menggunakan bahasa non-verbal seperti gerak tubuh, nada suara, mimik wajah, senyum, hingga kerling mata. Kesemuanya ini dimanfaatkan sebagai pembawa pesan sehingga sifat penyampaian pesan menjadi tidak langsung.

Dalam masyarakat seperti ini, konteks tempat percakapan terjadi memainkan peran yang sangat besar karena justru pada elemen konteks itulah pesan utama biasanya diletakkan. Nada suara pelan, mimik wajah ragu, anggukan yang tidak jelas, semuanya itu membawa pesan yang sebenarnya dibandingkan dengan kata *ya* yang diucapkan. Yang paling penting disini bukanlah apa yang dikatakan (tersurat) melainkan yang tersirat. Maka dari itu, rasanya keliru besar jika seorang hanya berfokus pada kata-kata saja (pesan tersurat/eksplisit), sementara pesan

tidak langsung yang non-verbal (seperti gerak-gerik tubuh dan ekspresi wajah) ditinggalkan dalam pengamatan.

Dalam komunikasi tersirat, ada sebuah instrument kunci yang berperan untuk membantu kelancaran proses komunikasi, yaitu *rasa*. Dalam karya klasiknya tentang budaya jawa, Geertz (1964) menyebutkan makna ganda *rasa*, yaitu *feeling* dan *meaning*. Artinya, *rasa* dapat berarti sensasi fisik dan emosi seperti panas, dingin, sedih, atau gembira. Rasa sebagai makna adalah gaya sugestif dalam komunikasi yang mengindikasikan pesan utama secara tidak langsung, sebagaimana ungkapan Geertz "... *to indicate the between-the-lines looking north and hitting south*. (1964: 238).

Untuk menjamin keberhasilan global, nilai luhur komunikasi tersirat harus ditransformasikan menjadi komunikasi asertif. Gaya artikulasi diri orang indonesia yang santun harus tetap dipertahankan, namun disampaikan dengan percaya diri dan terbuka. Komunikasi asertif juga akan membantu orang indonesia menyampaikan pendapatnya secara lebih terstruktur dan sistematis.

Kearifan lokal komunikasi tersirat membuahakan kepekaan yang tajam terasah, disebut sebagai *active sensitivity*. Kemampuan ini menjadi modal sosial yang penting dalam kancan global karena tidak banyak juga yang berhasil melakukannya. Jika dikembangkan secara optimal, *active sensitivity* dapat menjadi salah satu keunggulan global orang indonesia (*Global Excellence*). Dengan keunggulan ini, orang indonesia dapat menjadi mediator budaya dengan dua peran, yaitu penerjemah budaya dan penjemabatan budaya.

Sebagai penerjemah budaya, seseorang harus bisa menginterpretasikan suatu pesan sesuai dengan pemahaman dari satu budaya ke budaya yang lain yang berbeda. Melalui interpretasi ekspresi lawan bicara dan menyeimbangkan komunikasi di antara pembicara dan penerjemah maka akan mendapatkan pemahaman dari maksud yang ingin disampaikan. Mencapai suatu pemahaman dari dua konteks budaya yang berbeda akan mengurangi kesalahpahaman atau kesalah penilaian dari satu kelompok

budaya tertentu. Dalam hal ini, seorang penerjemah harus dapat “menerjemahkan” pesan yang disampaikan dengan tepat. Di sisi lain, sebagai penjembutan budaya, seseorang harus mampu menangkap simbol-simbol yang ditunjukkan atau disampaikan, baik secara eksplisit maupun implisit.

6. Nrima

Salah satu konsep yang termasuk dalam budaya standar indonesia adalah nrima. Konsep ini ditampilkan dalam sikap yang tenang dan menerima apa yang terjadi di dalam hidup. Nrima pada dasarnya memberikan efek positif dalam kehidupan, terutama dalam menghadapi masalah atau kesulitan dalam hidup. Nrima dapat menjadi sumber kekuatan diri dan memberi ketangguhan sambil menanti peluang yang lebih baik.

Namun, kadang kala konsep ini sering di salah artikan menjadi menerima segalanya. Konsep nrima dan toleransi dapat memberikan pandangan bahwa orang indonesia tidak mau berusaha dan mudah menyerah. Hal tersebut dianggap sebagai suatu kelemahan dalam bekerja sama dengan bangsa lain, khususnya negara-negara yang mengedepankan nilai profesionalitas. Di mata rekan kerj asing, sikap nrima sering dikaitkan dengan kesediaan untuk menoleransi kegagalan pencapaian target dan kualitas kerja yang seadanya, serta daya juang yang rendah.

Dalam bentuk yang sebenarnya, nilai toleransi muncul sebagai reaksi terhadap penekanan kerja sama. Masyarakat indonesia cenderung bergantung pada kerja sama tim dan berorientasi pada pembentukan relasi positif. Berangkat dari penekanan terhadap kerja sama inilah yang kemudian memunculkan nilai toleransi dalam diri masyarakat.

Salah satu kesalahan persepsi yang dapat ditimbulkan dari budaya nrima adalah kecenderungan orang indonesia untuk bertahan pada zona nyaman dan enggan berubah. Dalam konteks kerja sama global, para ekspatriat indonesia

yang sukses menunjukkan bahwa salah satu kunci keberhasilan masyarakat indonesia adalah jika mereka bersedia keluar dari zona kenyamanan.

7. Generalist dan (*Functional*) Excellence

Pilihan untuk menjadi generalis maupun spesialis sama-sama memiliki peran penting dalam perjalanan karier seseorang. Kita bisa saja memilih salah satu di antaranya, atau bahkan mengombinasikan kedua peran tersebut. Yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kita mampu untuk mendalami betul kemampuan teknis (*technical functional excellence*) yang dimiliki sehingga menjadikan diri kita sebagai seseorang yang memiliki spesialisasi dalam suatu bidang, tanpa cepat beralih ke bidang lain terlebih dahulu.

Technical (*functional*) excellence berkaitan dengan fakta persaingan global saat ini yang membutuhkan talenta yang siap menembus dunia internasional dengan keterampilan teknis yang mumpuni. *Technical (functional) excellence* yang dimiliki seseorang akan mendukung kemampuan lain dalam mengelola suatu pekerjaan sehingga dapat dikatakan, tanpa memiliki keterampilan teknis khusus yang kuat, seseorang akan kekurangan kredibilitas dan dapat menghambat kariernya untuk lebih maju.

Dalam menyajikan strategi dan rencana, masyarakat indonesia belum terlatih untuk menyusun argument berdasarkan data dan analisis sehingga menjadi sulit bila ingin menyejajarkan para professional indonesia dengan professional dari bangsa lain. Disinilah nilai pentingnya *technical (functional) excellence*. Generasi muda indonesia mulai perlu diarahkan untuk memiliki suatu keunggulan teknis dan mendalaminya hingga tuntas, sehingga dapat benar-benar menjadi satu spesialisasi atau kekuatan dirinya.

Melihat kepada akar budaya dan kesejahteraan, problem keunggulan teknis orang indonesia lebih disebabkan karena kelemahan sistem-sistem penting di masyarakat, misalnya

sistem pendidikan dan sistem sosial-politik. Pengaruh sistem lingkungan ini tidak dapat dimungkiri, sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa ada kaitan antara sistem sosial masyarakat dengan nilai budayanya. Hofstede, Hofstede & Minkov (2010) misalnya menunjukkan bahwa masyarakat dengan nilai budaya *individualistic* lebih banyak ditemukan di negara dengan sistem pendidikan dan tarat kemakmuran yang baik.

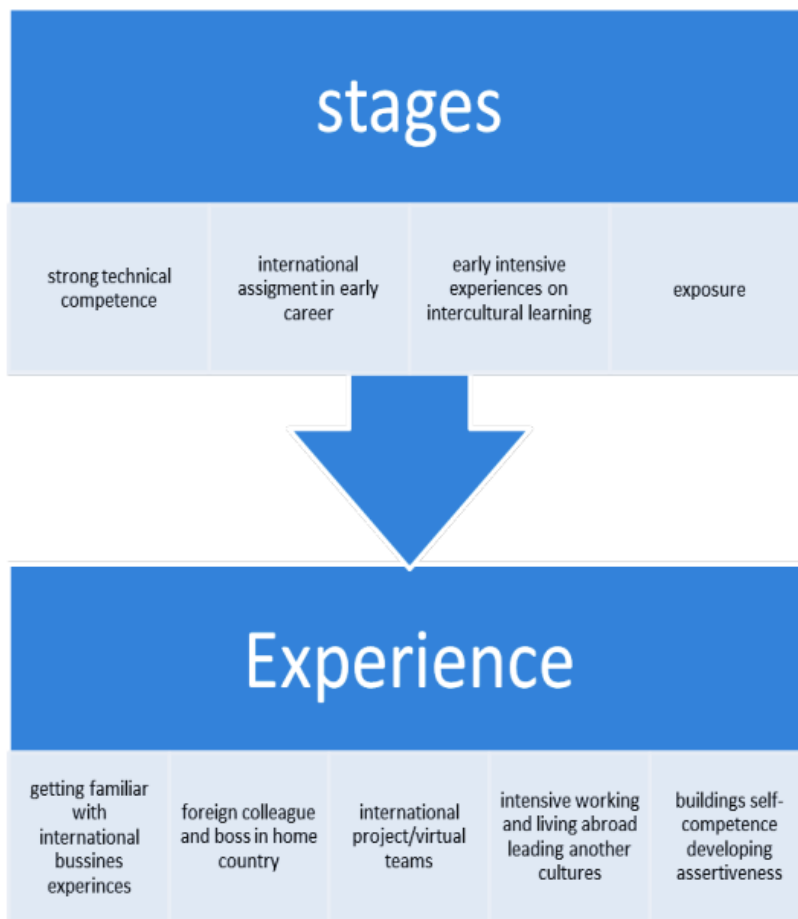
Oleh karena itu, salah satu jalan keluarnya adalah membenahi sistem pendidikan kita di segala bidang. Dunia pendidikan seharusnya mengembangkan kurikulum yang lebih fokus dan dekat dengan dunia kerja disertai dengan peluang untuk melatih pengetahuan yang diperoleh untuk memecahkan masalah di dunia kerja. Dunia kerja menyiapkan sistem pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berjenjang baik dan berkesinambungan untuk mencetak *Talent-talent dengan keunggulan teknis yang mumpuni*.

G. Mengembangkan Profesionalisme Global Indonesia

Keberhasilan *go global* bukan sesuatu yang mustahil bagi orang Indonesia di kancah global menunjukkannya. Ketujuh budaya standar menjadi kearifan lokal yang menjadi dasar berpijak keunggulan global. Untuk memulai langkah, maka pertanyaan penting yang perlu di ajukan: *bagaimana caranya ?*

1. Program pengembangan profesional

Organisasi dapat mengembangkan para talent-talent nya melalui sejumlah langkah sistematis. Pada prinsipnya, paparan pada pengalaman global sebaiknya diberikan sejak awal dan secara bertahap dibangun terus melalui pemantauan dan pembimbingan yang sistematis.



Tahap 1 : Exposure to Diversity

Tahap awal ini adalah upaya untuk member paparan keberagaman global kepada kandidat talent global. Tujuannya adalah agar kandidat mengenal dan memahami ajang pergaulan bisnis internasional. Penguasaan bahasa asing menjadi wajib dan merupakan kunci penting. Pada banyak kandidat , penguasaan bahasa asing yang memadai sudah membantu banyak. Tetapi pada banyak kandidat lainnya, tidak bisa berhenti pada penguasaan bahasa asing saja, karena keterampilan komunikasinya sendiri juga harus dikembangkan.

Tahap 2 : Early Intensive Intercultural Learning Experiences

Pada tahap ini, *talent* global dilibatkan dalam kelompok kerja internasional di dalam negeri. Pengalaman bekerja sama dengan rekan kerja asing atau atasan asing akan memperkaya kandidat dengan dinamika bekerja dalam kelompok global. Organisasi sebaiknya cermat memilih atasan asing yang juga dapat berperan sebagai mentor, karena hal ini terbukti sangat penting dalam membangun kompetensi global para kandidat.

Tahap 3 : International Assignment in Early Career

Pada tahap ini *talent* global mulai berperan sebagai pemimpin yang mengelola kelompok kerja internasional. Tentunya ini merupakan dinamika baru bagi perjalanan karier seseorang dan karena transformasi pengalaman menjadi penting. Organisasi dapat mendukungnya dengan memberikan program pengembangan kepemimpinan global yang memadai.

Tahap 4 : Strong Technical Competence

Di tahap ini, dapat dikatakan *talent* global sudah matang dan sudah siap dari segi kompetensi globalnya. Peran organisasi di sini focus pada penajaman kompetensi diri dan keterampilan komunikasi. Kedua aspek ini akan sangat dibutuhkan oleh talent global karena dalam periode ini organisasi mulai dapat mengarahkannya menjadi mentor bagi kandidat *talent* global berikutnya.

Ketujuh budaya sentral yang digali dari kearifan lokal bangsa telah disajikan. Ketujuh budaya ini akrab ditemui dan tidak lepas dari kehidupan sehari-hari yang menunjukkan kekuatannya sebagai ciri penting orang Indonesia. Karena itulah, ketujuh budaya sentral juga menjadi modal penting masyarakat Indonesia untuk menuju ranah global.

2. Negosiasi Adaptasi Identitas Budaya

Jika kita membicarakan budaya yang kuat, maka sering kali kita terbawa pada pertanyaan: “*bukankah identitas budaya yang kuat dapat membawa kita pada fanatisme kelompok?. Agaknya, pengalaman hidup dalam keberagaman budaya masyarakat kita yang tidak selalu positif, membuat kita awas terhadap kecenderungan negative dari pertemuan budaya.*

Dalam ranah psikologi yang meneropong individu, identitas yang kokoh adalah hal yang positif karena menyumbang banyak pada kematangan psikologis dan kesehatan mental individu. Identitas yang kuat ditandai dengan penerimaan realistis terhadap kekuatan dan kelemahan diri. Begitu pula dengan identitas budaya yang kuat. Hanya individu yang merasa aman dan nyaman dengan identitasnya, dapat menerima perbedaan dan tidak terancam karenanya.

Negosiasi dan modifikasi seperti ini terjadi sebagai dinamika pertemuan budaya yang diikuti dengan proses konfirmasi individu, baik dengan diri pribadi maupun dengan lingkungannya. Melalui proses seperti ini, batas-batas baru identitas budaya terbentuk, mencakup kombinasi budaya baru dan budaya asal. Apabila individu berhasil melalui proses ini dengan tetap sehat mental dan memiliki relasi sosial yang sehat pula, maka penyesuaian diri sudah terjadi.

3. Membangun Keunggulan Global Secara Sistematis

Keunggulan global dibangun melalui kearifan lokal dan karenanya harus direncanakan secara sistematis. Hal ini tentu saja akan selalu ada individu-individu yang berinisiatif dan menjadi berhasil karena usahanya sendiri. Namun dengan begitu, mengandalkan inisiatif individu lebih sulit karena kurang efektif, beresiko kegagalan cukup besar dan membutuhkan waktu lebih lama. Institusi seharusnya sudah lebih lama menyiapkan keunggulan global secara sistematis. Model pengembangan kompetensi global yang diusulkan sedikit banyak bisa ditemukan penerapannya.

Peran pendidikan dalam membangun kompetensi global dapat dilihat dari kemampuan berpikir dasar dan keterampilan teknis individu yang unggul. Dalam dunia global, *talent* indonesia kewalahan saat harus ,menarik inti, berpikir kritis, dan berfikir divergen, jika dibandingkan dengan rekannya dari negara lain. Pola berpikir analitis konvergen memang membantu untuk mencari solusi, tetapi hanya saat permasalahan sudah jelas dan mengarah.

Bab 5

MANIFESTASI KEARIFAN LOKAL DALAM MASYARAKAT INDONESIA

A. Kembali kepada Kearifan Lokal Lingkungan Indonesia

Hampir seluruh suku bangsa di Indonesia memiliki kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup yang ada. Sayangnya, secara perlahan kearifan lokal tersebut mulai memudar, bahkan ditinggalkan menyebabkan kondisi lingkungan hidup menjadi khawatir dan menakutkan.

Kekhawatiran serta ketakutan terhadap rusaknya lingkungan hidup di Indonesia tidak akan terjadi jika kearifan lingkungan atau kearifan lokal masyarakat (*local wisdom*) yang telah ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Sejak zaman pra-sejarah kearifan lingkungan sudah ada dalam kehidupan manusia Indonesia nampak dari perilaku positif manusia purba Indonesia dalam relasinya dengan lingkungan dan alam sekitarnya.

Kehidupan manusia purba Indonesia saat itu bersumber dari nilai-nilai kepercayaan atau agama, adat istiadat, nasihat pendahulu atau budaya yang tumbuh dan berkembang serta terbentuk secara alami pada komunitas masyarakat. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan melakukan penyesuaian dengan lingkungannya serta menjadi

kebudayaan yang berkembang secara turun-temurun pada generasi selanjutnya.

Secara umum, kearifan lokal ini menjadi sebuah budaya lokal atau daerah yang memiliki makna luhur di dalamnya, karena terdapat unsur yang bersumber dari budi luhur masyarakatnya. Seiring berjalannya waktu, nilai luhur tersebut tergusur dengan adanya perkembangan teknologi yang tidak menggunakan unsur budi luhur menyebabkan masyarakat lupa akan jati dirinya untuk hidup dari dan untuk alam. Manusia menganggap suatu tradisi atau kebudayaan dalam mengurus lingkungan dengan budaya lokal tidak selaras dengan kemajuan teknologi.

Pendapat ini tentunya salah dan itulah mengapa sekarang ini pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia lupa akan kearifan lokal suku bangsa Indonesia yang ada. Pihak-pihak yang peduli akan lingkungan, sebagai peninjau, praktisi, ahli hutan, lembaga swadaya masyarakat terus melakukan perjuangan terhadap pengembalian kearifan lokal dalam penataan lingkungan hidup.

Hal yang diperlukan tentu saja adalah komitmen untuk melakukan perjuangan itu. Namun, budi luhur dan hati nurani bangsa Indonesia sendiri telah tersapu berupa sifat kapitalisme melunturkan sifat hakiki masyarakat Indonesia.

B. Kearifan Lokal Sebagai Penata Lingkungan

Mewujudkan sebuah keseimbangan seperti keadaan awal tidak dapat diwujudkan oleh lingkungan hidup sebagai wadah dari kehidupan. Keseimbangan lingkungan tersebut terwujud jika ada sebuah aturan yang dapat diterima oleh masyarakatnya. Nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal tidak terikat secara formal dalam sebuah aturan, namun masyarakat berhubungan dengan aturan berperilaku yang menjaga hubungannya dengan lingkungan dan masyarakat tetap hidup berpegang pada nilai-nilai tersebut.

Hal tersebut itulah yang membuat kearifan lokal disebut sebagai jiwa dari budaya lokal. Ekspresi yang terwujud dalam kearifan lokal di kehidupan sehari-hari telah mendalam dengan

sangat baik. Setiap bagian kehidupan masyarakat diarahkan secara bijaksana berlandaskan sistem pengetahuan, tidak hanya kebermanfaatannya dalam keseharian dan interaksi antar sesama, namun juga dalam keadaan yang tidak terduga seperti misalnya bencana.

C. Contoh Kasus Kearifan Lokal di Indonesia Budaya Mitigasi Bencana Alam Gempa Bumi di Nias

Bencana alam dan dampaknya harus disikapi secara tepat dan bijak. Hal itu juga berlaku untuk bencana yang berasal dari tangan manusia dalam menjaga lingkungan. Jenis-jenis bencana alam yang mungkin terjadi utamanya di Kepulauan Nias adalah gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor.

Bencana yang mungkin itu memerlukan langkah penanganan yang menyeluruh dan efektif. Dalam konteks pencegahan bencana, terdapat usaha yang dilakukan masyarakat dan para pemangku kepentingan belum optimal dan justru mengandalkan pemberian bantuan pada saat tanggap darurat dan perbaikan fisik pasca bencana. Terdapat berbagai upaya efektif pada tahap pra bencana yang dilakukan belum baik. Hal yang sangat diperlukan ialah paradigma mitigasi melalui perhitungan antisipasi bencana demi mengurangi korban dan risiko terdampak pada kawasan rawan bencana. Paradigma mitigasi juga diartikan sebagai penanggulangan bencana berupa upaya pengenalan daerah rentan bencana dan modal pengetahuan dan praktik kesiapsiagaan pada masyarakat. Mitigasi bencana juga berguna untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terkhususnya yang berada pada kawasan rawan bencana untuk menghilangkan atau mengulangi dampak dari ancaman dan tingkat bencana.

Kita mengetahui bahwa sistem peringatan dini yang dimiliki Indonesia belum terlaksana dengan baik dan optimal. Setiap daerah tentunya memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang beragam dan berbentuk bentuknya dengan istilah yang digunakan berbeda dan cara yang sudah turun temurun tidak sama lagi. Hal tersebut tetap menjadi potensi pembangunan mitigasi bencana

yang berlandaskan potensi dari kearifan lokal. Masyarakat Nias memiliki potensi kearifan lokal ini. *Omo bada* atau konstruksi rumah adat yang tahan gempa, adalah salah satu contoh bentuk kearifan tersebut. Untuk kearifan para pelaut dan nelayan Nias, terdapat kemampuan masyarakat tradisional untuk membaca arah angin, bintang di langit dan memahami gerak gelombang laut. Dalam hal pertanian, para petani tradisional mengetahui waktu menanam saat tesa'a dan memahami cara menanam dengan benar. Layaknya *kegyuban* di Jawa, Nias memiliki *falulusa* dan *fabanuasa* dalam bersosial terkait kebersamaan dan gotong royong. Pengelolaan partisipasi masyarakat seperti forum *fondrakö* atau *orabu* juga dimiliki oleh Nias. Masih banyak lagi kearifan lokal yang dimiliki Nias yang pantas untuk disadari dan digali potensi dalam menata dan menjaga berkehidupan. Keberagaman dalam membaca fenomena alam haruslah digali dan disebarluaskan secara efektif kepada masyarakat sebagai bentuk upaya mitigasi bencana.

D. Kearifan Lokal Dalam Budaya Batak

Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa lainnya yang memiliki keterkaitan kearifan lokal dan bahkan menyatu dengan alam. Budaya Batak bagian yang tidak terlepas dari bumi dan bumi Tanah (Tano) Batak dibangun berdasarkan budaya atau kearifan lokal yang ada. Sama dengan suku bangsa lainnya di Indonesia, Menurut suku Batak, bumi adalah rumah, tempat tinggal dan terhadap seluruh isinya dipegang oleh manusia untuk memikul tanggung jawab. Manusia hidup di bumi tanpa adanya pilihan lain untuk itu bumi harus dijaga. Faktanya manusia belum memiliki teknologi yang hebat untuk membuat manusia bisa hidup dan berkembang di planet lain. Walaupun manusia terus berupaya untuk bisa hidup di planet lain ataupun mencoba hidup disatelit bumi yaitu Bulan. Berbagai usaha yang dilakukan belum berhasil, pergi ke Bulan namun tidak dapat bertahan hidup lama, apalagi hidup dan berkembang di Bulan. Dalam bahasa Batak, Bumi *bonapasogit* berarti bumi kampung halaman atau tano Batak.

Kearifan lokal di tanah Batak telah menjamin kelangsungan hidup suku Batak dari dulu hingga masa yang akan datang. Kearifan lokal tersebut telah mendarah daging pada kehidupan nenek moyang suku Batak dan terus diwariskan kepada generasi di bawahnya melalui lisan yang terbukti ampuh. Nenek moyang suku Batak juga dalam sejarah menunjukkan mampu mengatur tata cara penebangan boleh yang didalamnya terdapat aturan untuk tidak menebang pohon sembarangan. Aturan ini membuat kehidupan tata laksana suku Batak berkembang dan lestari terbebas dari bencana. Secara sederhana, suku batak mengatur tata kehidupan masyarakatnya berhubungan sangat erat dengan alam (bumi) dan tidak mungkin terlepas dengan bumi. Contoh sederhananya adalah sebuah rumah Batak dalam pembangunannya semua unsur alam harus ada di dalamnya. Bangunan pada rumah Batak tidak menggunakan paku. Hal tersebut menunjukkan bahwa suku Batak tidak membongkar perut bumi itu mengambil biji besi. Rumah Batak juga tidak menggunakan cat yang terbuat dari bahan kimia melainkan dari sari daunan. Rumah Batak tidak memerlukan seng yang berasal dari perut bumi, rumah Batak cukup menggunakan ijuk untuk atapnya. Semua bahan-bahan untuk membangun rumah ini tentunya dari alam dan tidak merusak alam itu sendiri. Misalnya rumah yang beratap ijuk akan menjadi sejuk, dingin dan nyaman serta tidak merusak lapisan Ozon seperti pada alat Air Condition (AC).

E. Kearifan Lingkungan Masyarakat Gunung Kidul Dalam Mengelola Sumber Daya Air

Sumber daya air menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari terutama pertanian di kawasan Gunung Kidul, banyak cara yang dilakukan masyarakat setempat berupa penjagaan dan pengelolaan secara tradisional diiringi dengan adanya kebutuhan bersama. Pola kehidupan masyarakat berpusat pada daerah yang memiliki sumber daya air seperti danau maupun sungai bawah permukaan ada di dalam gua menciptakan rasa tanggung jawab bersama untuk melakukan pengelolaan

kebermanfaatannya. Pada saat hujan, air akan masuk melalui *sinkhole* atau lubang vertikal yang berada di *doline* atau lembah kars dan terus mengalir ke bawah melalui sungai bawah permukaan serta menggunakan sistem perguaan (*cave system*), sebagian akan keluar melalui mata air ataupun mulut gua dalam satu sistem yang sama. Proses infiltrasi air ini juga akan membawa sedimentasi ke dalam gua dengan aliran yang akan dapat menyebabkan air di bawah permukaan naik di tempat lain. Menjaga sedimentasi perlu dilakukan pengelolaan *sinkhole* dan *doline* dengan baik, hal ini telah dilakukan masyarakat di banyak wilayah *doline* yang memiliki *sinkhole* pada suatu dolena yang ada. Masyarakat telah memahami bahwasanya sedimentasi pada saat infiltrasi air sangat mempengaruhi kualitas air yang keluar, karena pada saat hujan turun yang menggunakan hukum gravitasi membuat air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan terakumulasi pada suatu cekungan dengan membawa material sedimen yang terbawa oleh aliran air. Terbukti, kearifan lingkungan masyarakat ini berupa tata cara mengelola *sinkhole* yang ada, dengan menyusun batu di sekitar bibir *sinkhole* yang berfungsi untuk penyaring sedimen saat musim hujan menghasilkan air yang tidak keruh dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada kawasan Gunung Kidul, *sinkhole* masih terjaga sampai saat ini berupa tertata rapi batuan yang ada diikuti tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya. Kepercayaan masyarakat dengan menjaga *sinkhole* untuk keperluan sehari-hari, juga dapat digunakan untuk melakukan penampungan air yang akan digunakan pada saat musim kemarau tiba. Lainnya, dalam menjaga kearifan lingkungan, terdapat pengelolaan danau-danau kars di kawasan Gunung Kidul, misalnya masyarakat di wilayah Semanu, Kabupaten Gunung Kidul yang mengelola kembali danau kars yang sudah mati dan tidak berfungsi lagi bahwasanya masih memiliki potensi yang besar sebagai penampung air hujan. Hal ini berdasarkan sejarah desa di mana danau pernah menjadi sumber air bagi masyarakat. Membuat susunan batuan sebagai penyaring air masuk pada tepian danau, selanjutnya memberi lapisan tanah

lempung disetiap sisi danau sebagai penahan air yang tidak masuk ke bawah melalui rekahan yang ada dan juga menanam berbagai tanaman sebagai penyerap dan penyimpan air, tanaman tersebut misalnya Jarak, Jati dan lainnya. Membutuhkan waktu selama tiga tahun untuk menjadikan danau mati kembali hidup.

Terdapat aturan pelestarian dan pengelolaan terkait kearifan lingkungan ini karena layaknya danau yang dimanfaatkan bersama, membutuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjaga dan mengelolanya. Masyarakat Gunung Kidul juga percaya bahwa terdapat pertanda buruk jika adanya perusakan sumber-sumber air ini untuk itu diperlukan sebuah aturan-aturan adat yang terbentuk sebagai akibat dari adanya paduan budaya dan kepercayaan yang mengatur tatanan sosial terhadap lingkungannya, seperti adanya sanksi adat bagi anggota masyarakat lokal ataupun luar yang melakukan perusakan sumber air, terdapat kepercayaan bagi mereka yang melakukan perusakan sumber air akan mendapatkan sebuah malapetaka berupa bencana kekeringan, gagal panen ataupun kelaparan.

F. Kearifan Masyarakat Sumatera Selatan Dalam Penentuan waktu Pelaksanaan Kegiatan Penanaman

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini beribukota di Palembang. Secara geografis provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di utara, provinsi Kep. Bangka-Belitung di timur, provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat. Dimana, internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dapat menata lingkungan mereka dan menjadikan keharmonisannya tersendiri. Hal yang dilingkupkan ialah penentuan waktu tanam melalui pengetahuan ke-kean dan penangkapan ikan.

Dari dua hal tersebut kita dapat lihat suatu hasil tatanan yang menempatkan guna pemecahaan masalah menata lingkungan. Keharmonisan dengan lingkunganlah yang dapat menjamin masa depan manusia. Hal itu tentu saja telah dibuktikan lewat proses

panjang kehidupan leluhur dalam komunitas-komunitas lokal dalam mensiasati alam lewat budaya yang arif dan bijak.

Penjelasan ini dikhususkan pada daerah Sumatera Selatan di Desa Meringan, Kabupaten Lahat. Desa ini memiliki kegiatan utama berupa pertanian sawah dan perkebunan kopi. Masyarakat lokal menggunakan pengetahuan Ke-Kean untuk menghitung waktu yang tepat dalam menanam jenis tanaman tertentu yang berkaitan erat dengan ilmu perbintangan.

Di dunia perbintangan masyarakat Desa Meringan berpedoman kepada bintang yang dikenal dengan sebutan mate taun. Penentuan waktu digunakan untuk tanaman yaitu kopi, padi, purun, bambu, dan tebu. Penentuan waktu pelaksanaan kegiatan penanaman dengan menggunakan pengetahuan ke-kean adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan pertama dimulai pada urutan ketiga sekitar yang jatuh sekitar bulan Mei. Penebasan dan penebangan dilakukan untuk membuka lahan pada bulan ini. Setelah itu, dilakukan gantung akar atau membiarkan lahan setidaknya dua bulan.
- b. Urutan keempat yaitu bulan Juni merupakan masa gantung akar
- c. Urutan kelima yaitu bulan Juli juga masih masa gantung akar
- d. Urutan keenam yaitu bulan Agustus. Pada bulan ini dilakukan pembersihan lahan yang telah ditumbuhi rebe. Rebe lalu dibiarkan selama satu bulan yang selanjutnya dilakukan nyujul atau pembakaran. Cuaca pada bulan ini yaitu panas dan banyak angin menyebabkan penyebaran api menjadi sangat baik demi membakar sisa-sisa penebangan dan penebasan. Pembakaran dilakukan membuat sisa penebarang menjadi mutung (terbakar) dan tersisa sedikit. Banyaknya sisa penebangan yang terbakar maka memberikan kemudahan dalam membersihkan lahan dan penanaman bibit kopi juga tidak akan berlangsung lama.

Namun, pada kenyataannya, penanaman kopi sebaiknya tidak dilakukan pada bulan ini, karena biasanya kopi akan mengalami penyakit berupa patahnya dahan kopi oleh lubang di bagian pangkal batang kopi atau yang biasa disebut penyakit tutuhan (istilah setempat). Untuk persawahan juga sudah bisa dilakukan yaitu nyawah sawah.

- e. Urutan ketujuh yaitu pada bulan September, penanaman bibit kopi baik untuk dilakukan, penanam bibit diambil dari anakan yang tumbuh liar atau yang telah disemaikan secara khusus terlebih dahulu. Terdapat alternatif penanaman kopi yaitu pada urutan ke enam, tujuh, sembilan, sebilan dan ke dua. Namun, penanaman pada bulan ini menjadi yang terbaik di mana babi (kaput) sedang membuat sarang (kaput jang jeremuan), tikus bersembunyi (tikus dang besimbun) dan burung mengeram (burung dang bersangka). Berbanding terbalik dengan pertanian, penanaman padi tidak boleh dilakukan pada bulan ini karena akan berakhir padi lama untuk dipanen.
- f. Penanaman padi haruslah dilakukan secara hati-hati jika melihat perhitungan, sering terjadi kekeliruan yang mana perhitungan masih ketujuh tapi sudah memasuki kedelapan. Hal ini mampu mengakibatkan batang dan daun padi sangat subur, tapi berbuah sedikit atau yang biasa disebut dengan istilah mumbe daun.
- g. Kedelapan yaitu bulan Oktober, terdapat larangan penanaman kopi, di mana batang kopi tumbuh subur namun jumlah buahnya kurang memuaskan, di sini juga tunas kopi tumbuh subur. Pada urutan ini dikhususkan untuk menanam jenis daun-daunan misalnya bambu dengan ruasnya yang panjang, purun (mencapai 3 meter) dan batang tebu yang panjang. Untuk padi, sudah dapat dilakukan (nguni). Jenis bibit padi yang digunakan adalah padi lokal berumur 5 bulan 15 hari.

- h. Kesembilan yaitu bulan November, disarankan untuk tidak menanam kopi karena dapat terkena penyakit tutuhan. Angin sangat kencang pada bulan ini yang bisa terjadi selama 9 hari yang biasa disebut dengan angin cekhai rebung palak ayam (angin hendak mematahkan rebung yang akan baru tumbuh), atau angin endak mungka'i rebung pa-lak ayam. Selain kencang, angin ini juga membawa bintik air atau disebut dengan ujan berambai, yaitu hujan yang tidak terlalu deras namun berlangsung sangat lama (bisa sepanjang hari), peristiwa ini juga bisa disebut dengan istilah ujan putih.
- i. Urutan kesepuluh dan sebelas yaitu bulan Desember dan Januari. Larangan kopi untuk ditanam juga terjadi di bulan ini yaitu penyakit tutuhan. Namun, pada bulan ini disarankan menanam bambu, tebu dan purun yang mana tanaman tersebut akan beruas pendek.
- j. Urutan kedua belas pada bulan Februari bermakna masa istirahat atau mengerjakan hal lainnya misalnya bersawah.
- k. Urutan kesatu pada bulan Maret bermakna sama dengan urutan kedua belas
- l. Urutan kedua pada bulan April juga bermakna sama dengan urutan kedua belas ataupun satu.

Nilai-nilai sosial budaya masyarakat nelayan Sungsang dalam kegiatan mereka menangkap ikan tercermin dalam kebiasaan-kebiasan yang dapat dikatakan sampai sekarang masih berlaku. Nelayan tradisional yang berdiam di Sungsang (Sungsang I, II, III dan Sungsang IV) melakukan aktivitas menangkap ikan baik di kawasan perairan laut dan perairan umum, yaitu sungai, rawa/lebak dan jalur-jalur. Kawasan perairan tempat nelayan beroperasi dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu perairan yang bersifat umum, dan yang merupakan objek lelang "lebak lebung".

Secara umum nelayan tradisional Sungsang tidak mengenal pembagian musim penangkapan ikan. Mereka menangkap ikan

setiap waktu yang memungkinkan atau dapat dikatakan sepanjang tahun. Namun, berdasarkan informasi dan keterangan dari para nelayan bahwa mereka menangkap ikan rata-rata delapan (8) bulan dalam setahun, yaitu dari bulan April sampai sekitar akhir November. Masa puncak penangkapan ikan bagi mereka adalah dari bulan April sampai dengan September. Sedangkan dari bulan Desember sampai sekitar pertengahan Maret para nelayan tidak melaut karena angin kencang dan gelombang tinggi.

Dari bulan Desember sampai pertengahan Maret mereka sebut musim barat. Pada musim ini, selain angin kencang dan gelombang tinggi, juga temperatur air laut terasa agak panas dan alat penangkap ikan yang mereka tebar banyak dikotori oleh sejenis ganggang yang disebut agar-agar laut oleh nelayan tradisional dan masyarakat setempat. Setelah bulan September mereka sebut musim mundur, maksudnya hasil tangkapan mereka mulai berkurang atau kurang memuaskan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

Masa antara bulan September sampai Maret merupakan saat yang ditunggu oleh para muda-mudi di desa Sungsang (Sungsang I sampai Sungsang IV). Karena pada masa inilah biasanya banyak pernikahan dan pesta perkawinan dilakukan. Sehingga masyarakat setempat menyebut masa antara September dan Maret dengan musim kawin. Oleh karenanya, para pemuda nelayan yang berencana akan melakukan perkawinan mengumpulkan uang selama masa delapan bulan kerja.

Namun, sekarang kebiasaan para nelayan pergi melaut mengalami pergeseran. Pergeseran disebabkan para nelayan pergi ke laut sudah menggunakan perahu bermotor, maka bila datang gelombang dan angin mereka dengan cepat dapat merapat atau bersembunyi di hutan-hutan bakau di pinggir pantai. Begitu gelombang dan angin berhenti mereka melaut kembali. Keadaan seperti ini oleh para nelayan disebut dengan istilah “kucing-kucingan”. Perbuatan “kucing-kucingan” ini menurut para nelayan tidak dapat dilakukan ketika mereka masih memakai

perahu dayung atau sampan seperti masa-masa sebelumnya (masa sebelum motorisasi). Namun demikian, tetap saja pada masa antara bulan September dan Maret ini kebanyakan nelayan, terutama nelayan yang menangkap ikan di kilung dan tuguk tidak melakukan

Dalam pada itu, berdasarkan keterangan para nelayan Sungsang selama musim nelayan Sungsang tidak pergi ke laut karena gelombang tinggi dan angin kencang, kawasan tempat mereka beroperasi dimanfaatkan nelayan dari daerah lain. Nelayan dari daerah lain ini diduga berasal dari daerah Riau dan Tanjung Balai (Sumut). Mereka memakai kapal yang berukuran besar dan mesin berkekuatan tinggi serta dilengkapi dengan peralatan yang lebih canggih.

Bahkan kegiatan nelayan, tidak seutuhnya dilaksanakan terus menerus. Ada waktu yang merupakan larangan untuk menangkap ikan dan patangan. Segi nilai kearifan lokal, yang merupakan mewujudkan tertatanya lingkungan agar seimbang. Suatu keteraturan yang baik untuk menata lingkungan tersebut, pokok yang akan dideskripsikan larangan, patangan, dan pengaturan jarak alat tangkap.

Larangan dimaksud dapat berupa perbuatan maupun dalam menangkap jenis ikan tertentu. Hal-hal yang dilarang:

1. Nelayan yang memakai tuba (racun) atau yang melanggar larangan ini akan diambil tindakan oleh pemerintah Marga (Pasirah). Larangan pemakaian bahan beracun atau tuba ini tetap berlaku hingga kini.
2. alat yang dilarang untuk dipakai oleh para nelayan adalah empang laut atau sekarang dikenal dengan sebutan “belet” yang ukuran atau jaraknya sangat rapat/kerap, sehingga anak udang/anak ikan tidak dapat meloloskan diri.
3. dalam tradisi nelayan tradisional ini ada jenis ikan tertentu yang tidak pernah dengan sengaja mereka tangkap, yaitu ikan lumba-lumba.

Selanjutnya, masih ada lagi perbuatan yang menjadi pantangan atau larangan bagi para nelayan, ketika melaut atau menangkap ikan, antara lain:

1. Tidak boleh berbuat cabul (sombong, menurut sitilah setempat) , dapat menimbulkan kerusakan, dan
2. Tiang nibung (awangan-awangan/langit-langit) bagan/ rumah tempat kilung (bangunan di laut sebagai tempat menangkap ikan teri) tidak boleh dipotong dan dibiarkan rusak sendiri. Kalau dilanggar dapat menyebabkan penghasilan berkurang.

Pengaturan Jarak alat tangkap. Nelayan memiliki kebiasaan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pengaturan jarak dalam pemakaian atau pendirian alat tangkap, terutama pemakaian atau pendirian “*kilung*” dan “*tuguk*”. Berdasarkan penjelasan dari salah seorang pegawai senior di Kantor Camat Banyuasin II bahwa jarak antara satu “*kilung*” dengan yang lainnya minimal 500 meter. Sedangkan, ukuran besar-kecilnya bangunan “*kilung*” itu sendiri terserah kepada kemampuan pemilik *kilung*. Pendirian *tuguk* dilakukan secara berbaris menyamping mulai dari pantai mengarah ke tengah laut. Barisan *tuguk* tidak harus membentuk garis lurus, tetapi dapat berbentuk garis patah-patah, maksudnya ada yang maju dan ada yang mundur. Ketentuan seperti ini menurut para nelayan tidak hanya berlaku untuk mendirikan *tuguk* di kawasan perairan sungai, tetapi juga di kawasan laut.

Penanaman dengan pengetahuan *ke-kean*, merupakan menata lingkungan yang seimbang. Pada menginginkan keharmonisan, memahami dari pembukaan lahan, penanaman, dan pengembaliannya. Walaupun tanpa sadar merupakan hal yang baik dalam guna pemanfaatan lahan, kekuatan menata lingkungan yang harmonis terlihat. Perlunya terapan dalam pemanfaatan lahan, agar manfaatnya tidak terpakai begitu saja. Nilai-nilai pengetahuan *ke-kean* merupakan contoh bahwa lahan ini merupakan lingkungan yang dimiliki bersama. Walaupun lingkungannya itu telah terpakai sebelumnya, tetapi

guna berkelanjutan lingkungan itu sendiri tetap ada. Pemberian jarak akan pemanfaatan potensi alam, merupakan mengenal alam itu sendiri.

Kegiatan nelayan sungsang, merupakan yang tidak mengerti musim. Tetapi dengan berpegang teguh dan pewarisan akan kearifan lokal, menjadikan keseimbangan dalam menata lingkungan itu sendiri. Dari pengaturan musim yang akhirnya menjadikan pemahaman akan kegiatan melaut baiknya kapan, dan suatu hal unik dari adanya larangan, patangan, pengaturan jarak alat tangkap, dan pengetahuan modern mengenai perikanan. Hal kekinian yang dapat diterapkan untuk kelingkungan kita selajutnya.

Larangan-larang dalam nelayan sungsang ini memiliki rasionalisasi *local wisdom*, seperti larangan penangkapan penggunaan racun untuk menjaga kelangsungan ekosistem laut sebagai sumber pemanfaatan. Bahkan jaring untuk penangkapan tidak diperbolehkan rapat, dan ada standarisasi ukurannya. Aturan inipun mengajarkan agar tidak membunuh bibit perikanan dan anak-anak udang, ajaran ini masih sangat ditaati. Nilai kekinian mengajarkan akan perlunya pembaruan sumber daya, agar tidak mengahabisi seluruhnya potensi laut, dan perlunya regenerasi potensi laut tersebut.

Tujuannya pangaturan jarak alat tangkap ini menurut para nelayan, adalah untuk menghindari agar di antara para nelayan tidak saling mengganggu. Apalagi para nelayan yang mendirikan *tuguk* dalam suatu kawasan perairan baik di perairan sungai maupun di laut, kebanyakan masih mempunyai hubungan keluarga. Mengingat kita ini seluruhnya saudara, suatu hal berbagai dengan nilai yang adil didalam konteks kebersamaan dalam lingkungan.

Nilai-nilai lokal haruslah dipahami oleh semua warga kota bukan hanya seorang penguasa kota. Kota akan berkembang jika kekuatan dan ciri khas warganya bukan hanya berlandaskan gagasan ideal dalam segi perencanaan yang terkadang berbentur

dengan kepentingan tertentu. Nilai-nilai lokal yang menjadi kebutuhan semua masyarakat tersebut mampu menciptakan keberhasilan dalam pembangunan dan penataan kota. Di sisi lain, sebuah pemerintah berkewajiban mendorong, menumbuhkan kearifan budaya lokal, bukan menghambarnya dengan alasan pembangunan yang tidak sejalan dan selaras budaya bangsa Indonesia. Hal tersebut mampu menghancurkan lingkungan hidup yang ada di Indonesia.

Pengelolaan lingkungan berkelanjutan (environmental management) dapat dilakukan dengan baik dan tepat jika diiringi oleh interaksi yang seimbang antara kebutuhan alam dan sistem pengelolaan terpadu, peranan masyarakat ataupun pemerintah juga diperlukan. Budaya masyarakat memberikan bayangan uraian yang nyata bagaimana suatu wilayah yang mempunyai sumber daya akan tetap terjaga asetnya yang berharga serta bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, kearifan lingkungan akan menjadi suatu pegangan masyarakat dan membuat pemerintah perlu menjadikan kearifan tersebut sebagai referensi rencana kerja untuk pembangunan kedepannya dan ujungnya, pembangunan berkelanjutan berjalan dengan sempurna ketika pemerintah dan masyarakat melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Bab 6

PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

A. Adat dan Nilai Budaya Local

Ada banyak adat dan kultur yang masih terjaga atau terawat dengan baik di lingkungan kita, budaya tersebut tidak semuanya bersifat demokratis, bahkan terdapat beberapa budaya yang bersifat feodal yang bertentangan dengan demokratis. Perjalanan sejarah masyarakat kita, masih dijumpai banyak sekali nilai dan budaya lokal yang dijunjung tinggi sebagai modal sifat kebersamaan, kerjasama dan hubungan bersosial dalam suatu masyarakat.

1. Toleransi

Toleransi yaitu menghargai pikiran atau anggapan orang lain adalah sebuah kewajiban yang harus dimiliki seseorang dalam menjalankan kehidupan bermoral ketika hidup bersama orang lain. Sikap ini masuk ke dalam salah satu prinsip demokrasi. Makna toleransi tidak menjadikan perbedaan suatu persoalan, bukan juga diam tidak menyampaikan pendapat. Toleransi bermakna sebagai penghormatan kepada orang lain dengan cara memberikan kesempatan untuk berbicara atau menyatakan pendapat dengan dasar bahwa setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

2. Kesiediaan untuk mendengar

Kehidupan berdemokrasi selain menghargai pendapat orang lain layaknya toleransi, terdapat suatu hal yang harus diingat, yaitu bersedia untuk mendengar pendapat orang lain. Kearifan dalam bernegara seperti mendengar suara rakyat menjadi salah satu bentuk toleransi dan penghargaan pemerintah terhadap rakyatnya. Aspirasi rakyat wajib ditampung, didengar dan dipahami lalu dikaji untuk diambil sebuah keputusan berbentuk kebijakan. Kekuasaan yang tidak mendengar pendapat orang lain adalah kekuasaan yang tidak menjunjung tinggi inspiratif dan kedaulatan rakyat. Diperlukan reformasi untuk kekuasaan seperti ini.

3. Jujur

Jujur menjadi salah satu hal penting untuk terwujudnya keterbukaan atau transparansi. Jujur dalam masyarakat itu telah ada dan suatu sistem sosial yang mendukung perkembangan masyarakatnya menuju arah demokratis berupa menghilangkan titik-titik korupsi dan kebohongan pada adat masyarakatnya.

4. Kearifan lokal dan pengetahuan lokal

Kearifan dan pengetahuan lokal berguna untuk kemajuan dalam masyarakat yang bergerak sebagai pendukung nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Kebersamaan antar anggota masyarakat yang diturunkan pada generasi penerusnya dapat terwujud dengan melakukan penghargaan terhadap nilai lokal.

5. Jaringan & Kepemimpinan Sosial

Suatu kepentingan ataupun ketertarikan yang dilakukan seorang individu secara prinsip atau pemikiran akan membentuk jaringan sosial. Sedangkan pemimpin terbentuk karena adanya kesamaan pada visi, hubungan antar individu atau keagamaan. Pada dasarnya seorang pemimpin sosial dimenangkan atas suatu proses demokrasi. Dominannya adalah pertarungan terhadap konsep rasional dan gagasan untuk suatu kemajuan.

6. Kepercayaan

Suatu kepercayaan timbul didasarkan kepada rasa memiliki dan rasa percaya. Dalam buku Fukuyuma yang berjudul *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* menjelajah suatu modal sosial untuk menjelaskan bagaimana masyarakat yang memiliki modal sosial itu. Terdapat jaminan sukses dalam menjalankan visi dan misi yang didukung oleh kepercayaan yang dimiliki masyarakat (*high-trust society*). Tipe ini memiliki ciri yaitu kesatuan padu masyarakat secara keseluruhan. Terdapat kesediaan seseorang untuk berkorban layaknya zaman revolusi. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan (*low-trust society*) seperti sikap curiga, menaruh rasa kecewa pada unit masyarakat, dan menyimpan cemburu. Fukuyuma mengistilahkan yaitu *zero trust society*, sebelum mengarah kepada hal yang lebih sulit.

7. Kebersamaan dan Kesetiaan

Ikatan yang terbentuk karena ada perasaan saling memiliki dan menjadi bagian dari suatu komunitas.

8. Tanggung jawab sosial

Perasaan empati suatu masyarakat dalam perkembangan lingkungan masyarakat dan upaya-upaya peningkatannya ke arah terdepan.

9. Partisipasi masyarakat

Kesadaran untuk ikut peran serta dalam banyak hal yang berhubungan dengan diri dan lingkungannya.

10. Kemandirian

Tindakan ikut serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ada dalam masyarakat dan dalam organisasi yang ada di lingkungannya sebagai rasa yang sama dan rasa kebersamaan terhadap mereka punya bersama.

11. Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal

Kearifan lokal atau *local wisdom* (kearifan setempat) dipahami sebagai gagasan setempat (*local*) yang bersifat arif, bijaksana, bernilai positif, mendarah daging dan diikuti oleh para anggota masyarakatnya. Keunggulan budaya masyarakat diikuti oleh kondisi geografis dalam arti luas membentuk kearifan lokal ini. Kearifan lokal sebagai produk masa lalu harus dijaga secara kontinu dan dijadikan sebagai pegangan hidup. Makna yang terkandung yang bernilai lokal terkandung di dalamnya suatu hal yang dianggap lebih luas (universal).

Kearifan lokal bersumber dari nilai-nilai pada agama, adat istiadat, petuah nenek moyang ataupun budaya yang ada di lingkungan sekitar. Terbangun dalam suatu komunitas masyarakat dalam kemampuan adaptif dengan wilayah sekitarnya, kearifan ini adalah perilaku positif manusia terkait membentuk hubungan dengan alam dan lingkungan yang telah ada semenjak zaman prasejarah hingga saat ini. (Wietoler dalam Akbar, 2006).

Budaya lokal atau budaya daerah secara umum dimaknai sebagai budaya yang berkembang berdasarkan budaya suku bangsa yang berada di daerah tersebut. Kemajuan bangsa dan keterkaitannya dengan teknologi membuat orang-orang lupa akan pentingnya tradisi atau kebudayaan dalam berperilaku dan bertindak mengelola lingkungannya, budaya lokal sering dianggap suatu hal yang ketinggalan zaman membuat perencanaan pembangunan tidak lagi turut melibatkan masyarakat.

Pemaknaan kearifan lokal dinilai masih rendah dalam pendidikan di Indonesia. Terdapat muatan lokal yang dipelajari di dunia pendidikan, namun hal tersebut masih terlalu formal dan bahasan terkait kearifan lokal terbilang kurang luas. Muatan lokal berisikan bahasa daerah dan tari yang ada di daerah tersebut. Sedangkan, tantangan dunia pendidikan terbilang rumit. Jika melihat kemajuan global di bidang sains dan teknologi, maka nampak jelas nilai-nilai lokal yang telah buram dan ditinggalkan.

Untuk itu diperlukan eksplorasi yang sangat luas terhadap kekayaan luhur budaya bangsa harus terus dilakukan.

Suatu kearifan lokal sejatinya bermakna banyak sekali sebuah keteladanan dan kebijaksanaan. Peningkatan kearifan lokal dalam pendidikan kita menjadi persoalan yang penting di mana hal tersebut sama dengan menjaga ketahanan nasional sebuah bangsa. Budaya nusantara yang beragam dan dinamis membuat sumber kearifan lokal tidak akan mati, karena di dalamnya terdapat kenyataan hidup (*living reality*) yang tidak dapat terlepas.

B. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan sebagai pendidikan nilai, budi pekerti, moral, perilaku atau kepribadian yang bertujuan untuk mempelajari keputusan mana yang baik dan buruk, bagaimana menjaga suatu hal yang baik serta mewujudkan kebaikan tersebut dalam berkehidupan di masyarakat dan alam. Oleh karena itu, bukan hanya itu, pendidikan karakter diharapkan menjadi suatu kebiasaan (*habituation*) diiringi adanya suatu pemahaman (kognitif) terkait yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai-nilai tersebut dan terakhir mampu melakukannya (psikomotor). Pendidikan karakter ini harus melibatkan aspek pengetahuan yang baik (*moral knowing*) dan juga merasakan dengan baik atau *loving good* (*moral feeling*) serta perilaku yang baik (*moral action*).

Pendidikan karakter menuntut pada kebiasaan atau kebiasaan yang kontinu harus dipraktikkan dan dilakukan. Intinya, pendidikan karakter bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, berdaya saing, berakhlak mulia, bermoral, toleran, bergotong royong, berjiwa cinta tanah air, berkembang secara cepat, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berlandaskan Pancasila. Pendidikan karakter berfungsi (1) mengembangkan kemampuan untuk melakukan hal yang baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku yang multikultur; (3) meningkatkan

peradaban bangsa yang berdaya saing secara global. Pendidikan karakter digarap melalui berbagai media yang terdiri atas keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, politik, pemerintah, sektor swasta, dan media massa.

Indonesia telah mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai pembentuk karakter dalam satuan pendidikan melalui program kerjanya masing-masing. Prakondisi pendidikan ini tentunya dilanjutnya hingga diperkuat ke dalam 18 nilai hasil kajian empirik di Pusat Kurikulum. The existing values atau nilai prakondisi ini antara lain takwa kepada agama, bersih, rapi, nyaman dan santun. Identifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, kultur, dan tujuan pendidikan nasional dalam rangka memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter ini mencakup: (1) Keagamaan, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Mandiri, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Disiplin, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Patriotik, (12) Menghargai Prestasi, (13) Komunikatif, (14) Tenteram, (15) Literasi Tinggi, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, & (18) Tanggung Jawab, Kemendiknas (2011:3).

Meskipun telah terdapat 18 nilai pembentuk karakter bangsa, namun satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangannya dengan cara melanjutkan nilai prakondisi yang diperkuat dengan beberapa nilai yang diprioritaskan dari 18 nilai di atas. Dalam implementasinya jumlah dan jenis karakter yang dipilih tentu akan dapat berbeda antara satu daerah atau sekolah yang satu dengan yang lain. Hal itu tergantung pada kepentingan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Di antara berbagai nilai yang dikembangkan, dalam pelaksanaannya dapat dimulai dari nilai yang esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah/wilayah, yakni bersih, rapi, nyaman, disiplin, sopan dan santun.

Proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif dan psikomotorik) dan fungsi totalitas

sosiokultural dalam konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Pengkategorian nilai didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakekatnya perilaku seseorang yang berkarakter merupakan perwujudan fungsi totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif dan psikomotorik) dan fungsi totalitas sosialkultural dalam konteks interaksi (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosialkultural dapat dikelompokkan dalam: (1) olah ati/hati (*spiritual & emotional development*); (2) olah pikir (*intellectual development*); (3) olah raga dan kinestetik (*physical & kinesthetic development*); dan (4) olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*). Proses itu secara holistik dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi.

C. Landasan Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal

a. Landasan Historis

Kearifan lokal dapat bersumber dari kebudayaan masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu. Dalam perspektif historis, kearifan lokal dapat membentuk suatu sejarah lokal. Sebab kajian sejarah lokal yaitu studi tentang kehidupan masyarakat atau khususnya komunitas dari suatu lingkungan sekitar tertentu dalam dinamika perkembangannya dalam berbagai aspek kehidupan. Wijda dalam (Koentjaraningrat, 1986). Awal pembentukan kearifan lokal dalam suatu masyarakat umumnya tidak diketahui secara pasti kapan kearifan lokal tersebut muncul. Pada umumnya terbentuk mulai sejak masyarakat belum mengenal tulisan (praaksara). Tradisi praaksara ini yang kemudian melahirkan tradisi lisan.

Secara historis tradisi lisan banyak menjelaskan tentang masa lalu suatu masyarakat atau asal-usul suatu komunitas. Perkembangan tradisi lisan ini dapat menjadi kepercayaan atau keyakinan masyarakat. Dalam masyarakat yang belum mengenal tulisan terdapat upaya untuk mengabadikan pengalaman masa lalunya melalui cerita yang disampaikan secara lisan dan terus menerus diwariskan dari generasi ke generasi. Pewarisan ini

dilakukan dengan tujuan masyarakat yang menjadi generasi berikutnya memiliki rasa kepemilikan atau mencintai cerita masa lalunya. Tradisi lisan merupakan cara mewariskan sejarah pada masyarakat yang belum mengenal tulisan, dalam bentuk pesan verbal yang berupa pernyataan yang pernah dibuat di masa lampau oleh generasi yang hidup sebelum generasi yang sekarang ini.

b. Landasan Psikologis

Secara psikologis pembelajaran berbasis kearifan lokal memberikan sebuah pengalaman psikologis kepada siswa selaku pengamat dan pelaksana kegiatan. Dampak psikologis bisa terlihat dari keberanian siswa dalam bertanya tentang ketidaktahuannya, mengajukan pendapat, persentasi di depan kelas, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan pemanfaatan lingkungan maka kebutuhan siswa tentang perkembangan psikologisnya akan diperoleh. Karena lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis, termasuk didalamnya adalah belajar. Terhadap faktor lingkungan ini ada pula yang menyebutnya sebagai empirik yang berarti pengalaman.

c. Landasan Politik dan Ekonomi

Secara politik dan ekonomi pembelajaran berbasis kearifan lokal ini memberikan sumbangan kompetensi untuk mengenal persaingan dunia kerja. Dari segi ekonomi pembelajaran ini memberikan contoh nyata kehidupan sebenarnya kepada siswa untuk mengetahui kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena pada akhirnya siswa dididik dan disiapkan untuk menghadapi persaingan global yang menuntut memiliki ketrampilan dan kompetensi yang tinggi di lingkungan sosial.

d. Landasan Yuridis

Secara yuridis pembelajaran berbasis kearifan lokal mengarahkan peserta didik untuk lebih menghargai warisan budaya Indonesia. Sekolah Dasar tidak hanya memiliki peran membentuk

peserta didik menjadi generasi yang berkualitas dari sisi kognitif, tetapi juga harus membentuk sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan tuntutan yang berlaku. Apa jadinya jika di sekolah peserta didik hanya dikembangkan ranah kognitifnya, tetapi diabaikan afektifnya. Tentunya akan banyak generasi penerus bangsa yang pandai secara akademik, tapi lemah pada tataran sikap dan perilaku. Hal demikian tidak boleh terjadi, karena akan membahayakan peran generasi muda dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran di Sekolah Dasar. Tak terkecuali dalam pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Dengan diintegrasikannya nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran di Sekolah Dasar diharapkan siswa akan memiliki pemahaman tentang kerifan lokalnya sendiri, sehingga menimbulkan kecintaan terhadap budayanya sendiri.

D. Penerapan Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal

Pembelajaran berbasis kearifan lokal dipadu dengan pembelajaran IPS sangatlah cocok. Hal ini sesuai dengan tujuan IPS yaitu agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di kehidupan siswa, sesuai dengan kemampuan belajarnya. Pembelajaran berbasis kearifan lokal untuk menanamkan pendidikan karakter dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara mengintegrasikan ke mata pelajaran, melalui mata pelajaran muatan lokal dan melalui pengembangan diri.

1. Mengintegrasikan ke Mata Pelajaran IPS

Mengintegrasikan ke mata pelajaran IPS bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai pendidikan karakter di mata pelajaran sehingga menyadari akan pentingnya nilai-nilai tersebut dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di

dalam maupun di luar kelas. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku.

Pada setiap mata pelajaran di SD sebenarnya telah memuat materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter di setiap mata pelajaran dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam kompetensi dasar (KD) yang sesuai yang terdapat dalam Standar Isi (Permendiknas No. 22 tahun 2006). Jumlah KD di setiap mata pelajaran yang dapat diintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter tentu berbeda, ada yang banyak dan ada yang sedikit. Selanjutnya kompetensi dasar yang dapat diintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter tersebut dikembangkan pada silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Sebagai contoh berdasarkan materi kelas IV standar kompetensi (Mengetahui sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi) dan kompetensi dasar (Mengetahui aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya). Nilai karakter yang dapat dimunculkan yaitu jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

2. Mengintegrasikan ke dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah atau disebut dengan kearifan lokal. Materi dipilih ditetapkan berdasarkan ciri khas, potensi dan keunggulan daerah, serta ketersediaan lahan, sarana prasarana, dan tenaga pendidik. Sasaran pembelajaran kearifan lokal adalah pengembangan jiwa kewirausahaan dan

penanaman nilai-nilai budaya sesuai dengan lingkungan. Nilai-nilai kewirausahaan yang dikembangkan antara lain inovasi, kreatif, berpikir kritis, eksplorasi, komunikasi, kemandirian, dan memiliki etos kerja. Nilai-nilai budaya yang dimaksud antara lain kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepekaan terhadap lingkungan, dan kerja sama.

Penanaman nilai-nilai kewirausahaan dan budaya tersebut diintegrasikan di dalam proses pembelajaran yang dikondisikan supaya nilai-nilai tersebut dapat menjadi sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat dilakukan dengan cara guru memberikan tugas secara berkelompok mengobservasi dan mengidentifikasi budaya atau sumber daya yang ada di lingkungan tempat tinggal. Melalui observasi langsung ke lingkungan guru memiliki beberapa tujuan untuk dimiliki siswa setelah kegiatan berlangsung. Nilai karakter dan kemampuan yang diharapkan yaitu jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

E. Melalui Kegiatan Pengembangan Diri

Kegiatan pengembangan diri meliputi beragam *kegiatan* ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat siswa, seperti Kegiatan ekstra kurikuler (kewiraan melalui pramuka dan Paskibraka, olahraga, seni, kegiatan ilmiah melalui olimpiade dan lomba mata pelajaran. Kegiatan pembiasaan (kegiatan rutin melalui upacara bendera dan ibadah bersama). Kegiatan terprogram melalui pesantren Ramadhan, buka puasa bersama, pelaksanaan Idul Qurban, keteladanan melalui pembinaan ketertiban pakaian seragam anak sekolah (PAS), pembinaan kedisiplinan, penanaman nilai akhlak mulia, penanaman budaya minat baca, penanaman budaya bersih di kelas dan lingkungan sekolah, penanaman budaya hijau. Kegiatan nasionalisme melalui perayaan hari kemerdekaan RI, peringatan hari pahlawan,

peringatan hari pendidikan nasional. Kegiatan *outdoor learning* dan *training* melalui kunjungan belajar dan studi banding.

Pembelajaran berbasis kearifan lokal merupakan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran *student centered* daripada *teacher centered*. Hal ini sejalan dengan pernyataan Suparno (dalam Darlia 2010: 2) bahwa belajar bukan sekedar kegiatan pasif menerima materi dari guru, melainkan proses aktif menggali pengalaman lama, mencari dan menemukan pengalaman baru serta mengasimilasi dan menghubungkan antara keduanya sehingga membentuk makna. Makna tercipta dari apa yang siswa lihat, dengar, rasakan, dan alami. Untuk guru, mengajar adalah kegiatan memfasilitasi siswa dalam mengkonstruksi sendiri pengetahuannya lewat keterlibatannya dalam

Terkait dengan pembelajaran nilai-nilai kearifan lokal di Sekolah Dasar Menurut Sutarno (2008: 7-6) ada empat macam pembelajaran berbasis budaya, yaitu:

1. Belajar tentang budaya, yaitu menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Budaya dipelajari dalam program studi khusus, tentang budaya dan untuk budaya. Dalam hal ini, budaya tidak terintegrasi dengan bidang ilmu.
2. Belajar dengan budaya, terjadi pada saat budaya diperkenalkan kepada siswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari pokok bahasan tertentu. Belajar dengan budaya meliputi pemanfaatan beragam untuk perwujudan budaya. Dalam belajar dengan budaya, budaya dan perwujudannya menjadi media pembelajaran dalam proses belajar, menjadi konteks dari contoh-contoh tentang konsep atau prinsip dalam suatu mata pelajaran, serta menjadi konteks penerapan prinsip atau prosedur dalam suatu mata pelajaran.
3. Belajar melalui budaya, merupakan strategi yang memberikan kesempatan siswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakannya

dalam suatu mata pelajaran melalui ragam perwujudan budaya.

4. Belajar berbudaya, merupakan bentuk mengejawantahkan budaya itu dalam perilaku nyata sehari-hari siswa. Misalnya, anak dibudayakan untuk selalu menggunakan bahasa krama inggil pada hari sabtu melalui Program Sabtu Budaya. Kearifan local adalah : mekanisme pengambilan keputusan, keterampilan local, sumberdaya local, dan tipe solidaritas Sosial. Perwujudannya tampak pada kecerdasan local yang ditransfer pada daya cipta, inovatif dan kreatifas untuk kemandirian local. Kearifan local mengambil sukma dan semangat dari nilai-nilai budaya yang telah disepakati secara Sosial. Kearifan local adalah suatu kondisi matang dan mantap yang terjadi dalam modal Sosial, biasanya dimiliki individu yang telah mengambil sukma masyarakatnya, itulah yang disebut indigenouse local, yaitu pribumi local.

Secara filosofis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (*indigenous knowledge systems*) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (*daily problem solving*). Dalam pengertian yang lebih luas, kearifan lokal dapat dipahami sebagai berikut:

“Local wisdom is the knowledge that discovered or acquired by local people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the understanding of surrounding nature and culture”.

Naritoom mengartikan kearifan lokal sebagai pengetahuan yang terakumulasi karena pengalaman-pengalaman hidup, dipelajari dari berbagai situasi di sekeliling kehidupan manusia

dalam suatu wilayah. Hal serupa dapat dilihat pada definisi yang dimunculkan dalam situs Wikipedia.com:

Traditional knowledge, indigenous knowledge, and local knowledge generally refer to the matured long-standing traditions and practices of certain regional, indigenous, or local communities. Traditional knowledge also encompasses the local, knowledge, and teachings of these communities. In many cases, traditional knowledge has been orally passed for generations from person to person. Some forms of traditional knowledge are expressed through stories, legends, folklore, rituals, songs, and even laws. Other forms of traditional knowledge are often expressed through different means.” (Sitasi dari Wikipedia, 2010)

Dari definisi-definisi itu, kita dapat memahami bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi. Beberapa bentuk pengetahuan tradisional itu muncul lewat cerita-cerita, legenda-legenda, nyanyian-nyanyian, ritual-ritual, dan juga aturan atau hukum setempat.

Kearifan lokal menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dengan cara itulah, kearifan lokal dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal. Hal itu dapat dilihat dari ekspresi kearifan lokal dalam kehidupan setiap hari karena telah terinternalisasi dengan sangat baik. Tiap bagian dari kehidupan masyarakat lokal diarahkan secara arif berdasarkan sistem pengetahuan mereka, dimana tidak hanya bermanfaat dalam aktifitas keseharian dan interaksi dengan sesama saja, tetapi juga dalam situasi-situasi yang tidak terduga seperti bencana yang datang tiba-tiba.

Berangkat dari semua itu, kearifan lokal adalah persoalan identitas. Sebagai sistem pengetahuan lokal, ia membedakan suatu masyarakat lokal dengan masyarakat lokal yang lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari tipe-tipe kearifan lokal yang dapat ditelusuri:

1. Kearifan lokal dalam hubungan dengan makanan: khusus berhubungan dengan lingkungan setempat, dicocokkan dengan iklim dan bahan makanan pokok setempat. (Contoh: Sasi laut di Maluku dan beberapa tempat lain sebagai bagian dari kearifan lokal dengan tujuan agar sumber pangan masyarakat dapat tetap terjaga).
2. Kearifan lokal dalam hubungan dengan pengobatan: untuk pencegahan dan pengobatan. (Contoh: Masing-masing daerah memiliki tanaman obat tradisional dengan khasiat yang berbeda-beda).
3. Kearifan lokal dalam hubungan dengan sistem produksi: Tentu saja berkaitan dengan sistem produksi lokal yang tradisional, sebagai bagian upaya pemenuhan kebutuhan dan manajemen tenaga kerja. (Contoh: Subak di Bali; di Maluku ada Masohi untuk membuka lahan pertanian, dll).
4. Kearifan lokal dalam hubungan dengan perumahan: disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut (Contoh: Rumah orang Eskimo; Rumah yang terbuat dari gaba-gaba di Ambon, dll).
5. Kearifan lokal dalam hubungan dengan pakaian: disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah itu.
6. Kearifan lokal dalam hubungan sesama manusia: sistem pengetahuan lokal sebagai hasil interaksi terus menerus yang terbangun karena kebutuhan-kebutuhan di atas. (Contoh: Hubungan Pela di Maluku juga berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pangan, perumahan, sistem produksi dan lain sebagainya).

F. Tantangan Kearifan Lokal

Bila ada sistem pengetahuan lokal, maka ada juga sistem pengetahuan global. Apabila sistem pengetahuan lokal merupakan kategori pembeda antara suatu komunitas lokal dengan komunitas

lokal yang lain, maka sistem pengetahuan global berupaya mengatasi semua pengetahuan lokal dan menjadikan semua masyarakat lokal terintegrasi ke dalam satu sistem pengetahuan saja. Apabila sistem pengetahuan lokal muncul dalam bentuk mitos-mitos tradisional, maka sistem pengetahuan global muncul pula dalam mitos-mitos modern. Salah satu mitos yang sangat terkenal, khususnya di negara-negara berkembang dan bekas jajahan adalah “pembangunan”. Mitos pembangunan muncul guna membungkus ideologi “ekonomi politik pembangunan” negara-negara maju.

Definisi tentang pembangunan akan terus mengalami perubahan, disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Tetapi pada umumnya, pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan dari kondisi yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Indikator-indikator yang menunjukkan suatu kondisi tidak baik tidak ditentukan begitu saja, tetapi ada prosesnya tersendiri. Dalam perspektif pembangunan secara umum, pembangunan ekonomi mendapatkan porsi yang lebih karena indikator kemajuan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun, untuk memahami pembangunan ekonomi, mesti melibatkan perspektif politik.

Hal itu disebabkan karena perumusan kebijakan pembangunan merupakan proses politik yang melibatkan beragam aktor – mulai dari negara, birokrat, politisi, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat hingga masyarakat itu sendiri – dengan beragam kepentingan pula, yang interaksinya bisa jadi saling berbenturan. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mengatasi konflik tersebut, para aktor dituntut melakukan berbagai negosiasi dan kompromi. Dengan demikian untuk memahami kebijakan pembangunan dengan benar perlu ditelusuri secara cermat perilaku, motivasi atau pun preferensi para aktornya sehingga diperoleh jawaban: siapa memperoleh apa, berapa banyak, mengapa dan dengan cara bagaimana dari

kebijakan pembangunan yang berlangsung di suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Dalam kerangka politik ekonomi pembangunan, kearifan lokal tidak mendapatkan tempat sama sekali karena telah disingkirkan oleh sistem pasar dan negara. Investasi demi pertumbuhan ekonomi negara adalah lebih penting daripada suatu tindakan berkelanjutan bagi masa depan manusia yang menjadi inti dari kearifan masyarakat lokal. Dalam beberapa kasus, bukan saja sistem pengetahuan lokal masyarakat yang terpinggirkan, tetapi juga masyarakat lokal secara fisik dipinggirkan atau direlokasi dengan alasan pembangunan. Selain itu, dengan alasan investasi pula, keamanan menjadi faktor penting dalam pembangunan. Struktur pengamanan dibangun sampai ke pelosok-pelosok negeri dengan melibatkan aparat-aparat negara yang cenderung tidak memahami cara-cara masyarakat lokal menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Masyarakat lokal yang terorganisir dengan baik dan mendapatkan tempatnya dalam sistem pemerintahan negara Indonesia adalah negeri (desa). Negeri telah lama menjadi basis pertempuran antara masyarakat vs negara, sosialisme vs kapitalisme. Secara sosio-historis, negeri-negeri pada umumnya berbasis ekonomi sosialis (prakteknya mendahului istilah). Kepemilikan tanah dikelola secara komunal dengan semangat egalitarian dan pemerataan. Hukum adat tidak mengenal kepemilikan pribadi yang mutlak, yang dapat menimbulkan ketimpangan dalam sistem masyarakat tradisional. Hak-hak ulayat atau petuanan adat atas tanah menjadi contoh penting bagaimana pengelolaan tanah itu dilakukan di negeri-negeri adat.

Masalah muncul ketika sistem desa di Jawa dipaksakan untuk diberlakukan di luar Jawa. Di Jawa, telah lama terjadi penundukkan kerajaan terhadap desa dan membuat ketimpangan ekonomi-politik. Cerita-cerita lokal yang bisa diketahui melalui legenda atau sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa desa sebagai wilayah dan komunitas lokal menjadi domain mutlak

kerajaan. Raja di Jawa adalah penguasa pribadi yang melakukan pengendalian dan pemilikan atas desa beserta seluruh isinya, terutama tanah dan penduduknya secara absolut. Raja memiliki hak penggunaan kekerasan dengan aparat-aparat kerajaan yang terlatih untuk melakukan tindakan represi terhadap desa. Para penguasa lokal tunduk kepada raja dan harus memberikan upeti karena semua wilayah itu adalah milik raja. Ketika sistem desa diperkenalkan ke luar Jawa, maka jiwa dan semangat sebagai klien terhadap patron itu pun terbawa ke sana. Campur tangan negara mulai nyata dan merubah hampir seluruh sistem pemerintahan adat, dengan hukum adat.

Kondisi itu menjadi basis yang kuat bagi kolonialisme mengembangkan sistem kapitalis dan mengeksploitasi tanah dan penduduk desa. Kolonialisme lah yang membawa sistem pengetahuan modern ke negara-negara jajahan, memperkenalkan dan mempraktekannya. Setelah terjadi dua kali perang dunia yang meluluhlantahkan segi-segi kemanusiaan, maka sistem pengetahuan modern yang menjadikan manusia dengan kemampuan rasionya sebagai tuan atas dirinya dan dunia pun mulai dikritik. Kritik-kritik itu datang karena ketidakmampuan rasio modern mengeliminasi kehancuran-kehancuran yang ditimbulkan akibat kepentingan di balik setiap penemuan-penemuan di bidang ilmu dan teknologi. Saat ini dunia kembali berhadapan dengan situasi lain, yaitu perubahan iklim yang tidak lagi menentu. Sekali lagi rasio modern yang menjadikan pembangunan sebagai salah satu proses penting mendapat tantangannya.

Dengan alasan pembangunan, lingkungan tempat hidup manusia diobrak-abrik, kota-kota baru dibangun, tambang-tambang baru dibuka, hanya untuk memenuhi nafsu konsumsi manusia. Pada tahap itulah, ketika manusia dengan rasio modernnya telah bingung berhadapan dengan alam karena sudah tidak mampu lagi menguasainya, kearifan lokal memperoleh tempatnya kembali. Keharmonisan dengan lingkunganlah yang dapat menjamin masa depan manusia. Hal itu tentu saja

telah dibuktikan lewat proses panjang kehidupan leluhur dalam komunitas-komunitas lokal dalam mensiasati alam lewat budaya yang arif dan bijaksana. Dalam beberapa kasus, konflik di Maluku misalnya, ketika kemampuan pengetahuan ilmiah dalam hubungan dengan manajemen konflik sepertinya sudah tidak mampu menemukan solusi terbaik, hanya kearifan lokal yang menjadi titik balik semua itu.

Sebagai sebuah contoh kearifan lokal **dalam masyarakat Suku Baduy**. Ada hal yang menarik dari masyarakat Baduy yaitu kearifan lokal mereka mengenai pandangan terhadap alam semesta. Masyarakat Baduy sangat menjaga keseimbangan dan keselarasan dengan alam. Maka dari itu, masyarakat Baduy (dalam) sangat menjaga ajaran tentang menjaga alam serta melestarikan. Hal tersebut yang menciptakan masyarakat Baduy hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Selain itu, masyarakat Baduy tidak mengeksploitasi alam, mereka menggunakan seperlunya yang ada di alam dan disertai dengan pelestarian.

Masyarakat Baduy memiliki kepercayaan bahwa alam adalah salah satu titipan maha kuasa yang harus dijaga dan dilestarikan. Hal itu sesuai dengan prinsip ajaran dan filosofis masyarakat Baduy yaitu “*lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung*”. Ada pula prinsip hidup lain masyarakat Baduy yang selaras dengan alam adalah *petatah-petitih masyarakat ada Baduy yaitu :*

*Gunung tak diperkenankan dilebur
Lembah tak diperkenankan dirusak
Larangan tak boleh di rubah
Panjang tak boleh dipotong
Pendek tak boleh disambung
Yang bukan harus ditolak
Yang jangan harus dilarang
Yang benar haruslah dibenarkan*

Nilai yang terkandung dalam aturan tersebut adalah konsep mengenai “tanpa perubahan apapun”. Banyak bukti yang memperlihatkan bahwa masyarakat Baduy hidup berdampingan dengan alam secara harmonis yaitu masyarakat Baduy sangat menjaga air agar selalu jernih dan bersih sehingga bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Saat mandi atau bersih-bersih, tidak boleh ada bahan kimia yang dipakai oleh masyarakat Baduy termasuk pengunjung. Hal itu untuk menjaga air agar tetap bersih dan jernih. Aliran sungai yang melintasi perkampungan tanah adat suku Baduy amat jernih, tidak ada sampah. Hal lain yang penting adalah masyarakat Baduy memiliki kelembagaan sosial yang memberikan pedoman berperilaku bagi masyarakat lokal maupun pendatang untuk mematuhi nilai-nilai adat. Masyarakat Baduy yang tidak memiliki kamar mandi maupun WC dirumah panggungnya, memiliki aturan untuk tidak membuang sampah, menggunakan sabun, deterjen dan bahan-bahan kimia lain yang dapat mengotori sungai. Selain itu, pembagian area-area dalam pemanfaatan sungai juga merupakan sebuah konsep dalam memperhatikan daya pulih air. Setiap kampung telah memiliki area-area khusus dalam pemanfaatan sungai. Area sungai untuk mandi, mencuci, buang air dan konsumsi memiliki areanya masing-masing sehingga masyarakat memperoleh air yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.

Praktik masyarakat Baduy yang menyesuaikan diri dengan alam juga terlihat dari cara membangun rumah. Bagian paling bawah dari rumah adalah batu sebagai penopang tiang-tiang utama rumah yang terbuat dari kayu. Tetapi, tidak seperti rumah pada umumnya, masyarakat Baduy tidak menggali tanah untuk pondasi. Batu hanya diletakan di atas tanah. Jika kontur tanah tidak rata, maka bukan tanah yang menyesuaikan sehingga diratakan, tetapi batu dan tiang kayu yang menyesuaikan. Jadi, panjang pendeknya batu mengikuti kontur tanah. Selain itu bahan bangunan rumah yang lain adalah bahan bangunan yang ramah terhadap alam. Bahan bangunan rumah masyarakat Baduy merupakan bahan yang bisa dan mudah diurai oleh tanah. Bahan

tersebut diantaranya dinding bilik bambu, atap dari ijuk dan daun pohon kelapa dan rangka rumah dari kayu alam yaitu kayu jati, kayu pohon kelapa dan kayu albasiah. Pada saat malam hari masyarakat Baduy tidak menggunakan listrik dan alat teknologi yang lain sebagai penerangan. Untuk aktivitas bepergian masyarakat Baduy lebih memilih berjalan kaki sesuai yang diajarkan.

Masyarakat Baduy menyimpan hasil panen padi huma di sebuah *leuit*, lumbung padi. *Leuit* dibangun di pinggiran tiap kampung. Setiap keluarga memiliki *leuit*. *Leuit* adalah wujud pemahaman masyarakat Baduy tentang ketahanan pangan. Kondisi adanya *leuit* membuat masyarakat Baduy tidak kekurangan bahan pangan. Selain itu, apabila masyarakat Baduy akan menggunakan kayu maka kayu yang akan dipakai adalah kayu yang telah kering dan tua. Kayu bakar tersebut diperoleh dari pohon yang sudah dimakan rayap atau batang pohon dan ranting yang jatuh terserak. Masyarakat Baduy tidak menebang pohon untuk kayu bakar. Kearifan lokal ini menjadikan Baduy dan hutan di sekitarnya hidup harmonis selama ratusan tahun.

G. Fungsi dan Bentuk Kearifan Lokal Dalam Masyarakat

1 Keragaman bangsa Indonesia dari sisi etnis, suku, budaya dan lainnya sejatinya juga menunjuk kepada karakteristik masing-masing. Pada saat yang sama, kekhasan itu pada umumnya memiliki kearifan yang pada masa-masa lalu menjadi salah satu sumber nilai dan inspirasi dalam merajut dan menapaki kehidupan mereka.

Sejarah menunjukkan, masing-masing etnis dan suku memiliki kearifan lokal sendiri. Misalnya saja (untuk tidak menyebut yang ada pada seluruh suku dan etnis di Indonesia), suku Batak kental dengan keterbukaan, Jawa nyaris identik dengan kehalusan, suku Madura memiliki harga diri yang tinggi, dan etnis Cina terkenal dengan keuletan. Lebih dari itu, masing-masing memiliki keakraban dan keramahan dengan lingkungan alam yang mengitari mereka.

Kearifan lokal itu tentu tidak muncul serta-merta, tapi berproses panjang sehingga akhirnya terbukti, hal itu

mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Keterujiannya dalam sisi ini membuat kearifan lokal menjadi budaya yang mentradisi, melekat kuat pada kehidupan masyarakat. Namun dari waktu ke waktu nilai-nilai luhur itu mulai meredup, memudar, kehilangan makna substantifnya. Lalu yang tertinggal hanya kulit permukaan semata, menjadi simbol yang tanpa arti. Bahkan akhir-akhir ini budaya masyarakat hampir secara keseluruhan mengalami reduksi, menampakkan diri sekadar pajangan yang sarat formalitas. Kehadirannya tak lebih untuk komersialisasi dan mengeruk keuntungan.

Banyak faktor yang membuat kearifan lokal dan budaya masyarakat secara umum, kehilangan geliat kekuatannya. Selain kekurangmampuan masyarakat dalam memaknai secara kreatif dan kontekstual kearifan lokal mereka, faktor lainnya adalah akibat arus globalisasi, dan kepentingan subjektif dari sebagian elit masyarakat.

Pada sisi itu bencana budaya mulai berkecambah dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak mampu lagi melihat, apalagi menyelesaikan secara arif persoalan yang menimpa mereka. Krisis demi krisis lalu menjadi bagian hidup bangsa.

Sirtha (2003) sebagaimana dikutip oleh Sartini (2004), menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi tersebut antara lain adalah:

- a. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam.
- b. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia.
- c. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

- d. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.

Menurut Prof. Nyoman Sirtha dalam “Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali” menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat maka fungsinya menjadi bermacam-macam. Dalam tulisan “Pola Perilaku Orang Bali Merujuk Unsur Tradisi”, antara lain memberikan informasi tentang beberapa fungsi dan makna kearifan lokal, yaitu:

- a. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam.
- b. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep *kanda pat rate*.
- c. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada pura Panji.
- d. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.
- e. Bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat.
- f. Bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian.
- g. Bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara Ngaben dan penyucian roh leluhur.
- h. Bermakna politik, misalnya upacara *ngangkuk merana* dan kekuasaan *patron client*
- i. (Balipos terbitan 4 September 2003)

Dari penjelasan fungsi-fungsi tersebut tampak betapa luas ranah kearifan lokal, mulai dari yang sifatnya sangat teologis sampai yang sangat pragmatis dan teknis.

Jim Ife (2002) menyatakan bahwa kearifan lokal terdiri dari enam dimensi yaitu :

1. Pengetahuan Lokal.

Setiap masyarakat dimanapun berada baik di pedesaan maupun pedalaman selalu memiliki pengetahuan lokal yang terkait dengan lingkungan hidupnya. Pengetahuan lokal terkait dengan perubahan dan siklus iklim kemarau dan penghujan, jenis-jenis fauna dan flora, dan kondisi geografi, demografi, dan sosiografi. Hal ini terjadi karena masyarakat mendiami suatu daerah itu cukup lama dan telah mengalami perubahan sosial yang bervariasi menyebabkan mereka mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi ini menjadi bagian dari pengetahuan lokal mereka dalam menaklukkan alam.

2. Nilai Lokal.

Untuk mengatur kehidupan bersama antara warga masyarakat, maka setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya. Nilai-nilai ini biasanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai ini memiliki dimensi waktu, nilai masa lalu, masa kini dan masa datang, dan nilai ini akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya.

3. Keterampilan Lokal.

Kemampuan bertahan hidup (survival) dari setiap masyarakat dapat dipenuhi apabila masyarakat itu memiliki keterampilan lokal. Keterampilan lokal dari yang paling sederhana seperti berburu, meramu, bercocok tanam sampai membuat industri rumah tangga. Keterampilan lokal ini biasanya hanya cukup dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing atau disebut dengan ekonomi subsisten. Keterampilan

lokal ini juga bersifat keterampilan hidup (life skill), sehingga keterampilan ini sangat tergantung kepada kondisi geografi tempat dimana masyarakat itu bertempat tinggal.

4. Sumber daya Lokal.

Sumber daya lokal ini pada umumnya adalah sumber daya alam yaitu sumber daya yang tak terbarui dan yang dapat diperbarui. Masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersilkan. Sumber daya lokal ini sudah dibagi peruntukannya seperti hutan, kebun, sumber air, lahan pertanian, dan permukiman. Kepemilikan sumber daya lokal ini biasanya bersifat kolektif atau communitarian.

5. Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal.

Menurut ahli adat dan budaya sebenarnya setiap masyarakat itu memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sebagai warga masyarakat. Masing masing masyarakat mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda –beda. Ada masyarakat yang melakukan secara demokratis atau “duduk sama rendah berdiri sama tinggi”. Ada juga masyarakat yang melakukan secara bertingkat atau berjenjang naik dan bertanggung turun.

Pendapat lain menyatakan bahwa bentuk kearifan lokal dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu kearifan lokal yang berwujud nyata (*tangible*) dan yang tidak berwujud (*intangible*).

a. Berwujud Nyata (Tangible)

Bentuk kearifan lokal yang berwujud nyata meliputi beberapa aspek berikut:

1. Tekstual

Beberapa jenis kearifan lokal seperti sistem nilai, tata cara, ketentuan khusus yang dituangkan ke dalam bentuk catatan tertulis seperti yang ditemui dalam kitab tradisional primbon, kalender dan prasi (budaya tulis di atas lembaran daun lontar).

Sebagai contoh, prasi, secara fisik, terdiri atas bagian tulisan (naskah cerita) dan gambar (gambar ilustrasi).

2. Bangunan/Arsitektural

Banyak bangunan-bangunan tradisional yang merupakan cerminan dari bentuk kearifan lokal, seperti bangunan rumah rakyat di Bengkulu. Bangunan rumah rakyat ini merupakan bangunan rumah tinggal yang dibangun dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat dengan mengacu pada rumah ketua adat. Bangunan vernakular ini mempunyai keunikan karena proses pembangunan yang mengikuti para leluhur, baik dari segi pengetahuan maupun metodenya (Triyadi dkk., 2010). Bangunan vernakular ini terlihat tidak sepenuhnya didukung oleh prinsip dan teori bangunan yang memadai, namun secara teori terbukti mempunyai potensi-potensi lokal karena dibangun melalui proses *trial & error*, termasuk dalam menyikapi kondisi lingkungannya.

3. Benda Cagar Budaya/Tradisional (Karya Seni)

Banyak benda-benda cagar budaya yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal, contohnya, keris. Keris merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang sangat penting. Meskipun pada saat ini keris sedang menghadapi berbagai dilemma dalam pengembangan serta dalam menyumbangkan kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya kepada nilai-nilai kemanusiaan di muka Bumi ini, organisasi bidang pendidikan dan kebudayaan atau UNESCO Badan Perserikatan Bangsa Bangsa, mengukuhkan keris Indonesia sebagai karya agung warisan kebudayaan milik seluruh bangsa di dunia. Setidaknya sejak abad ke-9, sebagai sebuah dimensi budaya, Keris tidak hanya berfungsi sebagai alat beladiri, namun sering kali merupakan media ekspresi berkesenian dalam hal konsep, bentuk, dekorasi hingga makna yang terkandung dalam aspek seni dan tradisi teknologi arkeometalurgi. Keris memiliki fungsi sebagai seni simbol jika dilihat dari aspek seni dan merupakan perlambang dari pesan sang empu penciptanya.

Ilustrasi lainnya adalah batik, sebagai salah satu kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari

budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Terdapat berbagai macam motif batik yang setiap motif tersebut mempunyai makna tersendiri. Sentuhan seni budaya yang terlukiskan pada batik tersebut bukan hanya lukisan gambar semata, namun memiliki makna dari leluhur terdahulu, seperti pencerminan agama (Hindu atau Budha), nilai-nilai sosial dan budaya yang melekat pada kehidupan masyarakat.

b. Tidak Berwujud (Intangible)

Selain bentuk kearifan lokal yang berwujud, ada juga bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun temurun yang dapat berupa nyanyian dan kidung yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Melalui petuah atau bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud lainnya, nilai sosial disampaikan secara oral/verbal dari generasi ke generasi.

H. Contoh Kearifan Lokal Dalam Masyarakat Indonesia

Elly Burhainy Faizal mencontohkan beberapa kekayaan budaya, kearifan lokal di Nusantara yang terkait dengan pemanfaatan alam yang pantas digali lebih lanjut makna dan fungsinya serta kondisinya sekarang dan yang akan datang. Kearifan lokal terdapat di beberapa daerah:

1. Papua, terdapat kepercayaan *te aro neweak lako* (alam adalah aku). Gunung Erstberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Dengan demikian maka pemanfaatan sumber daya alam secara hati-hati.
2. Serawai, Bengkulu, terdapat keyakinan *celako kumali*.
3. Kelestarian lingkungan terwujud dari kuatnya keyakinan ini yaitu tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak.
4. Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, terdapat tradisi *tana' ulen*. Kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat

adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat.

5. Masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat. Masyarakat ini mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa *bera*, dan mereka mengenal tabu sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah lingkungan.
6. 5. Masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung Dukuh Jawa Barat. Mereka mengenal upacara tradisional, mitos, tabu, sehingga pemanfaatan hutan hati-hati. Tidak diperbolehkan eksploitasi kecuali atas ijin sesepuh adat.
7. 6. Bali dan Lombok, masyarakat mempunyai *awig-awig*. Kearifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang profan.

Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata: kearifan (wisdom) dan lokal (local). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam disiplin antropologi dikenal istilah local genius.

Gobyah (2003), mengatakan bahwa kearifan lokal (local genius) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan

lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal erupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal.

Menurut Caroline Nyamai-Kisia (2010), kearifan lokal adalah sumber pengetahuan yang diselenggarakan dinamis, berkembang dan diteruskan oleh populasi tertentu yang terintegrasi dengan pemahaman mereka terhadap alam dan budaya sekitarnya. Kearifan lokal adalah dasar untuk pengambilan kebijakan pada level lokal di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan. Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Jadi ntuk melaksanakan pembangunan di suatu daerah, hendaknya pemerintah engenal lebih dulu seperti apakah pola pikir dan apa saja yang ada pada daerah yang menjadi sasaran pembangunan tersebut. Adalah sangat membuang tenaga dan biaya jika membuat tempat wisata tanpa memberi pembinaan kepada masyarakat setempat bahwa tempat wisata tersebut adalah “ikon” atau sumber pendapatan yang mampu mensejahterakan rakyat di daerah itu. Atau lebih sederhana ya, sebuah pembangunan akan menjadi sia-sia jika pemerintah tidak mengenal kebiasaan masyarakat atau potensi yang tepat untuk pembangunan didaerah

BAB 7

Prolog: INDONESIA THE NEXT GLOBAL POWER HOUSE

A. Indonesia The Next Global Power House

Krisis ekonomi global masih berlanjut, Indonesia-negara yang kaya dengan sumber daya alam dan juga budaya-saat ini tengah disorot oleh dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,2% per tahun di kurun 2000-2010, negara ini berada di peringkat ketiga dunia setelah China dan India. The McKinsey Global Institute dalam studinya baru-baru ini memprediksi bahwa Indonesia akan masuk dalam jajaran tujuh besar kekuatan ekonomi dunia pada 2030 nanti (McKinsey & Company, 2012).

Gejolak ekonomi di 2008 yang kemudian berkembang menjadi krisis global dalam waktu singkat, telah membuat negara-negara Barat mencatatkan penurunan pertumbuhan ekonomi paling tajam pasca perang Dunia II. Hal tersebut tentunya berlawanan dengan apa yang terjadi di belahan dunia lainya, yakni Asia, dengan perekonomian yang terus tumbuh mengagumkan dan mampu pulih dengan cepat dari guncangan krisis karena fundamental ekonomi yang telah diperkuat.

Pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan di kawasan Asia membuat berbagai perusahaan termuka dunia berlomba untuk mengambil peran aktif dan menuai keuntungan. Asia, dengan

dipimpin oleh China, menarik sebagian besar investasi langsung dari seluruh dunia. Penandatanganan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) di tahun 2002 telah memicu tren global baru yang menitikberatkan pentingnya Asia. Berlakunya perjanjian tersebut pada 1 Januari 2010, otomatis menempatkan ACFTA sebagai kawasan perdagangan bebas ketiga terbesar di dunia setelah European Economic Area (EEA) dan North American Free Trade Area (NAFTA) dan pertama berdasarkan jumlah penduduknya serta menjadikan kawasan ini sebagai kekuatan sentral dalam perekonomian dunia.

Tabel 7.1 : Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN, China dan India (2002-2012)

| No | Negara | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Rata2 |
|----|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1 | Indonesia | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.7 | 5.5 | 6.3 | 6.0 | 4.6 | 6.1 | 6.5* | 6.1* | 6.11 |
| 2 | Singapura | 4.2 | 4.6 | 9.2 | 7.4 | 8.7 | 8.8 | 1.7 | -1.3 | 14.7 | 4.9* | 2.1* | 6.50 |
| 3 | Thailand | 5.3 | 7.1 | 6.3 | 4.6 | 5.1 | 5.0 | 2.5 | -2.3 | 7.7 | 0.1* | 5.6* | 4.70 |
| 4 | Philipina | 3.7 | 4.9 | 6.7 | 4.8 | 5.3 | 6.7 | 4.2 | 1.1 | 7.6 | 4.0* | 4.9* | 5.39 |
| 5 | Malaysia | 5.4 | 5.8 | 6.8 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 4.9 | -1.5 | 7.2 | 5.1* | 4.4* | 5.65 |
| 6 | Myanmar | 12.1 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.1 | 11.7 | 3.6 | 5.1 | 5.4* | 5.5* | 6.2* | 10.39 |
| 7 | Vietnam | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 6.3 | 5.3 | 6.8 | 5.9* | 5.1* | 7.67 |
| 8 | Brunei Darussalam | 3.9 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | 4.4 | 0.2 | 1.9 | -1.7 | 2.6 | 2.2* | 2.7* | 1.62 |
| 9 | China | 9.1 | 10.0 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.1 | 9.6 | 9.2 | 10.4 | 9.2* | 7.9* | 11.36 |
| 10 | India | 4.6 | 6.9 | 7.6 | 9.1 | 9.6 | 10.0 | 7.0 | 5.9 | 10.1 | 6.9* | 4.9* | 8.26 |

Dalam konteks ini, Indonesia diakui sebagai salah satu bintang Asia yang sedang bersinar, bersama dengan China, India, Malaysia, Republik Korea, dan Thailand (Asian Development Bank Report, 2011). Menurut The Economist, Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang mampu bertahan dari krisis global karena memiliki stabilitas moneter dan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Shegyi, 2012, April). Menurutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 6,23% pada 2012 tidak menyurutkan keyakinan para pemimpin bisnis, bahwa ekonom akan meningkat kembali di tahun ini, dengan harapan bahwa resiliensi kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit konsumsi domestik dapat

mengimbangi penurunan ekspor Karena kondisi ekonomi global (Al Azhari,2013,April), Menurutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 6,23% menjadi 6,23% pada 2012 tidak menyurutkan keyakinan para pemimpin bisnis, bahwa ekonomi akan meningkat kembali di tahun ini, dengan harapan bahwa resiliensi kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit konsumsi domestik dapat mengimbangi penurunan ekspor karena kondisi ekonomi global (Al Azhari,2013,April). Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan pada rentang waktu 2004-2012. Rata-rata PDB berada di kisaran 5,5%, angka ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan era 1999-2004 di kisaran 3,9%. Semakin meningkatnya PDB Indonesia ini diperkuat juga oleh data Internasional Monetary Fund (IMF) yang pada 2009 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 6,5%. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura yang tercatat di angka 4,8% (Rahman,2012).

World Economic Forum yang digelar di Davos, Swiss akhir Januari 2012, juga memasukan Indonesia dalam “Trillion Dollar Club” karena berhasil membukukan PDB yang melampaui nilai 1 triliun dolar AS. Hal ini membuat posisi Indonesia sejajar dengan sejumlah negara lain, yaitu China, India, Rusia, Brazil, Korea, Meksiko, dan Turki (Shengyi, 2012, April). Kenaikan PDB Indonesia setiap tahun tersebut tentunya didukung oleh konsumsi domestik, ekspor, dan investasi dari 240 juta jiwa penduduk Indonesia yang hingga buku ini And baca, masih akan terus bertambah jumlah. Ketika sebagian besar negara berkekuatan menghalau dampak krisis eksternal yang terjadi, konsumsi rumah tangga Indonesia tetap naik setiap tahun dan mengantar Indonesia sebagai salah satu negara dengan konsumsi domestik terbesar di dunia.

Seiring dengan pertumbuhan PDB, kinerja ekspor tahunan Indonesia selama 2004-2011 menunjukkan tren yang

terus meningkat. Bahkan, pada 2011, ekspor Indonesia mencapai US\$203.49 miliar tertinggi sepanjang sejarah perekonomian Indonesia sebelum menurun karena terpengaruh krisis eropa seiring berkurangnya permintaan global dan harga komoditas (Rahman,2012). Selain kinerja kinclony yang ditunjukan PDB dan ekspor, Bursa efek Indonesia (BEI) juga terus masuk dalam jajaran pasar modal terbaik dunia selama delapan tahun terakhir. Bukan hanya itu, imbal hasil yang diberikan juga termasuk salah satu yang paling tinggi, termasuk dalam masa krisis. Kenaikan harga indeks Harga saham Gabunga (IHSG) secara kumulatif mencapai 452%, atau 57% per tahun. Laju kenaikan ini termasuk luar biasa, bahkan bbila dibandingkan dengan indeks saham negara anggota BRIC (Brazil, Rusia, India, dan China) yang mencatatkan pertumbuhan signifikan tersebut membuat Indonesia kini berada di bawah sorotan global dan kian mendapatkan perhatian dari mata duniaa Internasional

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, laporan Bank Dunia di 2010 menyebutkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia, atau masyarakat dengan pengeluaran antara US\$2-US\$20 per hari, bertambah sebanyak 7 juta orang pertahun. Konsumsi kelas menengah di Indonesia target pasar yang semakin menggiurkan bagi para pemaain ekonomi global, dan membuat Indonesia menjadi “darling” for the business investment.

Berdasarkan pandangan filosofis ini, harmano sosial merupakan tatanan sosial dalam masyarakat yang memiliki beragam budaya, sering ditunjukkan oleh perilaku menghindari konflik khas Indonesia dan pencarian akan konformitas. Konsep lain yang penting bagi masyarakat Indonesia adalah “Rasa” (sensitivitas), secara haarfiah diartikan sebagai indra seperti rasa di lidah, dan perasaan emosional, seperti kesedihan dan kebahagiaan, tetapi juga menunjukkan gaya sugestif komunikasi yang digunakan oleh orangng Indonesia dalam interaksi setiap hari.

Penerapan yang disempurnakan dari “rasa” (alus) adalah tingkat perilaku sosial yang sangat terhormat di

Indonesia, ditandai dengan berbicara lembut, gerakan halus dan kelembutan. Indonesia juga diakui sebagai masyarakat yang sangat religius, perilaku keagamaan sangat dianjurkan dan agama diperlakukan sebagai isu-isu sensitif dan halus. Penekanan pada hubungan juga merupakan karakter utama dari masyarakat, dalam arti bahwa keterkaitan satu sama lain sangat penting bagi masyarakat Indonesia.

Tak ayal, uraian tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki satu kunci dalam menghadapi era global yaitu sensitivitas antarbudaya. Lantas, pertanyaan pentingnya adalah: apakah kepekaan antar budaya yang berkembang secara alkitabiah dalam kemajemukan domestik ini dengan serta merta akan membuat orang Indonesia kompeten dalam persaingan global? pertanyaan ini menjadi menarik mengingat masih belum terwakilinya wajah Indonesia dalam ajang bisnis global, jika dibandingkan dengan talent dari China dan India yang sudah mulai mendunia.

Kompetensi mengelola keberagaman menjadi penting mengingat bahwa beberapa penelitian lintas budaya dalam organisasi menunjukkan bahwa perbedaan budaya tidak berkurang atau hilang dalam praktik organisasi global (Hofstede, House, dkk, dalam Tjirta, 2011), melainkan tampaknya justru meningkatkan kompleksitas bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Mau tidak mau, peran budaya justru semakin mendapat sorotan dalam dinamika praktik organisasi global. Pemahaman terhadap budaya dan variasi-variasi yang muncul karena budaya, menjadi tema sentral dalam bisnis global. Ketika informasi dan prediksi ekonomi akan diwujudkan dalam bentuk investasi, kemitraan, mobilisasi modal dan sumber daya, pemahaman tentang daya dan kejelian untuk melihat dampaknya pada perilaku ekonomi manusia, menjadi salah satu kunci keberhasilan persaingan global. Profesional Indonesia dalam Dimensi Budaya Global

B. Seluk Beluk Budaya dan Perilaku Manusia

Pertama, budaya terdiri atas sekumpulan nilai, norma, dan asumsi, yang disepakati dan diterima oleh kelompok. Akibatnya, budaya juga berperan sebagai pemberi arah untuk berpikir, merasa, dan bertindak pada kelompok penganutnya. Contohnya, nilai egaliter dan kebebasan individu sangat sentral dalam budaya AS, muncul dalam sistem politik demokratis liberalnya, sistem ekonomi pasar bebasnya, dan juga budayanya akademik di perguruan tinggi. Riuhnya mahasiswa berpendapat dan berdebat dalam diskusi, banyaknya pertanyaan muncul dalam kuliah di kelas, dan relaksnya mahasiswa memanggil dosennya dengan nama depan, merupakan wujud perilaku yang wajar bahkan diharapkan dari seorang mahasiswa dalam konteks masyarakat AS.

Kedua, budaya muncul melalui symbol dan artefak yang merupakan hasil karya manusia, seperti bahasa, kesenian, dan sebagainya. Mulai dari yang sangat konkret seperti tarian, pakaian daerah, hingga hasil karya yang simbolik dan sarat makna seperti bahasa sapaan orang Indonesia yang menggunakan 'Mas', 'Mbak', 'Dik', 'Bang' dengan makna hierarkis yang tidak selalu sama.

Ketiga, budaya terbentuk melalui hasil belajar dari proses sosialisasi kepada anggota baru. Isi budaya yang diiteruskan adalah yang dianggap penting karena sudah teruji keberhasilannya untuk mempertahankan eksistensi atau keunggulan kelompok. Maka, sebenarnya tidak ada budaya yang bersifat bawaan lahir. Jadi, jika kalau ada yang mengatakan bahwa budaya orang Indonesia "dari sananya" memang malas dan tidak disiplin, anda jangan percaya. Karena merupakan hasil belajar, budaya yang dirasakan tidak ada tipikal yang diubah melalui proses belajar pula. Praktik seperti ini banyak dilakukan oleh organisasi bisnis yang mengubah budaya organisasinya secara sistematis. Ketika Louis Gerstner mengambil alih IBM yang sudah hampir bangkrut karena menjadi terlalu lamban dan birokratis, perubahan budaya organisasi secara sistematis melalui pelatihan dan dukungan

sistem kerja lengkap dengan buku manual. Alhasil,, IBM dapat bangkit dan kembali eksis.

Budaya dengan wajah universal sekaligus wajah relative (Pedersen, 1994). Artinya, ada wilayah budaya yang akan ditemukan sama di kebanyakan kelompok masyarakat di belahan dunia manapun. Ada pula wajah budaya yang spesifik dan khas untuk kelompok tertentu, sehingga menyebabkan budaya juga dapat menjadi relative. Contohnya, konsep keluarga dikenal di hampir seluruh kelompok budaya di muka bumi ini. Diikuti dengan sejumlah nilai, emosi, dan norma yang biasa dikaitkan dengannya, misalnya rasa hormat, kedekatan, emosi sayang, dan peduli. Namun demikian, ruang lingkup keluarga bisa berbeda-beda antara satu kelompok dan kelompok lainya.

Pada kebanyakan budaya Asia seperti Indonesia, keanggotaan keluarga lebih luas daripada di budaya Eropa yang biasanya terfokus pada keluarga batih. Maka, ketika seorang Jerman menghadiri pernikahan Batak yang dihadiri oleh banyak anggota keluarga, ia mungkin sekali merasa heran dengan keriuhan dan ekspresi emosi yang terjadi karena perbedaan makna keluarga yang menyebabkannya tidak mengenali wajah budaya yang saat itu muncul.

Beragamnya wajah budaya yang muncul tidak saja membuatnya menjadi tidak mudah dikenali, namun juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Mengapa demikian ? kalau kita kembali ke awal pembahasan mengenai makna budaya, maka salah satu fungsi budaya adalah mengarahkan cara pikir, cara rasa, dan cara tindak, artinya, jika kita tidak saling kenal wajah budaya yang muncul maka kita juga tidak paham cara pikir, cara rasa, dan cara tindak yang mengikutinya. Maka, salah paham sering kali muncul.

Nah, para pembaca yang budiman, sekarang kita dapat memahami betapa sentralnya peran budaya dalam perilaku dan kehidupan kita sehari-hari. Dan ternyata tidak mudah untuk memahami budaya secara utuh. Mungkin itulah sebabnya ada

begitu banyak upaya dan pemikiran yang sudah dilakukan para pakar di berbagai bidang dan pemikiran yang sudah dilakukan para pakar di berbagai bidang untuk mencoba membangun pengertian budaya.

C. Indonesia di Tengah Budaya Global

Pada kenyataannya, tidak mudah bekerja sama dalam tim yang berbeda budaya. Kajian psikologi antarbudaya telah menunjukkan bukit-bukti beragam masalah yang timbul. Adler (2008) menyebutkan masalah-masalah komunikasi seperti kesalahpahaman, stereotip, prasangka, dan konflik antarpribadi.

Orang Indonesia yang berasal dari masyarakat dengan keberagaman budaya tinggi, ternyata juga tidak lepas dari masalah antarbudaya. Tjirta (2001). Mencatat adanya masalah dalam gaya kerja dan pemecahan masalah, Fremerey & Panggabean (2004) menunjukkan kesulitan dalam gaya komunikasi, hubungan atasan dan bawahan, dan dalam sikap kerja, sedangkan Murnyati T. (2008) menunjuk pada kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan akibat kurangnya rasa percaya.

Dinamika hubungan kerja sama antarbudaya seperti itu mendorong kajian-kajian untuk mengenali budaya kedalam organisasi. Para ahli ini umumnya mencoba untuk memilih budaya ke dalam dimensi yang dapat menjelaskan perbedaan perilaku kerja berbagai bangsa dibelahan dunia. Studi-studi ini membuktikan adanya peran budaya nasional dalam organisasi multinasional. Nah, pembaca sekalian, sekarang mari kita cermati dimensi-dimensi budaya tersebut. Sebagai catatan, akan ada banyak persamaan dimensi budaya yang dikemukakan oleh para ahli berikut ini.

D. Budaya sebagai Perangkat Lunak Benak Manusia

Dimensi budaya power distance sangat relevan untuk menggambarkan warna kepemimpinan dan hubungan antara atasan-bawahan dalam dunia kerja di masyarakat tertentu. Masyarakat dengan indeks power distance tinggi bersedia

menerima hierarki. Artinya dalam kelompok masyarakat seperti ini, perbedaan status dan hak dapat diterima tidaklah heran jika dalam masyarakat seperti ini rasa hormat dan krama sangat dipentingkan.

Dalam dunia kerja di masyarakat hierrarkis seperti ini, bawahan umumnya menerima jika atasannya memiliki otonomi, kewarganegaraan, dan hak yang lebih sebagai indikator dari power-nya yang lebih tinggi. Sebagai timbale baliknya, atasan juga diharapkan member perhatian pribadi atas prestasi, bahkan kesejahteraan bawahannya. Dengan kata lain, atasan diharapkan juga mengambil tanggung jawab atas bawahannya.

Status dan kekuasaan seseorang lebih banyak diperoleh berdasarkan keturunan atau relasi daripada berdasarkan prestasi. Senioritas sangat dihargai dan dipentingkan. Jika para pembaca merasa akrab dengan gambaran dunia kerja seperti ini, tidak usa heran. Indonesia memang salah satu negara dengan power distance kuat. Oleh karena itu, dalam banyak perusahaan sosial dan nonbisnis, warna hierarkis seperti ini sangat kental.

Sebaliknya, masyarakat dengan power distance rendah lebih mengharapkan kedudukan yang sejajar dan kurang nyaman dalam sisi hierarkis. Kelompok kerja seperti ini lebih mengharapkan adanya kesetaraan dan dialog yang sejajar.

Masyarakat individual bercirikan pemberian ruang besar pada ekspresi anggota-anggota. Dengan demikian, mereka tampil beda atau berbeda pendapat adalah sesuatu yang lumrah saja. Di samping itu, anggotanya diharapkan menyampaikan pendapat dan pemikirannya. Masyarakat ini lebih mementingkan kejujuran meskipun mungkin tidak enak didengar dan dapat menyakiti orang lain. Hidup dan kesejahteraan anggota adalah tanggung jawab pribadi mereka dan karenanya pencapaian prestasi pribadi dianggap penting. Tidak heran jika dalam masyarakat individual, semangat kompetitif lebih muncul dan lebih bias diterima.

Budaya organisasi dan perilaku kerja dari masyarakat individual ditandai dengan iklim yang kompetitif dan berdasarkan

sistem merit. Komunikasi kerja yang terjadi lebih lugas dan terbuka. Meskipun kerja tim tetap diutamakan, tetapi biasanya disertai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab jelas untuk setiap anggota tim.

Pada masyarakat komunal, hubungan antaranggota lebih erat dan dekat. Nilai harmoni dan keselarasan relasi sosial sangat dipentingkan. Individu yang terlalu menonjolkan kepentingan pribadi, bahkan hingga merusak relasi sosial, biasanya dipersepsikan kurang baik dan tidak jarang mendapat sanksi sosial. Kehidupan dan kenyamanan anggota menjadi tanggung jawab kelompok sebagai timbal balik dari loyalitas individu.

Dalam dunia kerja, sifat komunal tampil dalam iklim kerja yang akrab dan hangat. Untuk konteks Indonesia, hal ini dikenal dengan istilah 'kekeluargaan' yang dinilai positif. Penekanan pada tim kerja dalam kerja tugas pribadi. Sebagai masyarakat dengan salah satu nilai kolektivistik tertinggi dalam indeks Hofstede, ciri kekeluargaan sarat muncul dalam budaya organisasi dan perilaku kerja perusahaan lokasi ataupun perusahaan keluarga di Indonesia.

E. Budaya, Bahasa yang Tersirat

Bagi orang luar yang bukan anggota suatu kelompok budaya, budaya tujuan tersebut bagaikan memiliki kode rahasia yang harus dipecahkan dulu agar dapat terjalin relasi yang baik. Masalahnya, banyak dari kode ini yang sudah sedemikian mendarah daging bagi kelompok budaya tujuan sehingga dimunculkan begitu saja, alamiah, dan tanpa disadari. Jika sikap ini tetap muncul, maka rekan kerja kita dikantor akan cepat menangkap sesuatu yang salah, atau bias juga kita anggap kurang sopan.

Namun demikian, sikap ini tidak sedemikian mudahnya tidak dipahami oleh rekan kerja asing kita, karena nilai keselarasan dan senyum-sapa mungkin memang bukan bagian dari nilai budaya mereka. Akibatnya, mereka tidak dengan cepat memahami

pesan yang ingin kita sampaikan saat kita tidak melakukan senyum-sapa tersebut.

Sebaliknya, pada masyarakat yang relasi sosialnya tidak terlalu erat, individu memisahkan bidang-bidang kehidupannya dengan jelas. Akibatnya setiap kali ia menghadapi persoalan di bidang kehidupan yang berbeda, ia tidak bias mengandalkan informasi di bidang kehidupannya yang lain, karena jejaring sosialnya sama sekali berbeda.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Mudah ditebak, dengan cirri masyarakat komunalnya, budaya Indonesia tergolong high context, dengan gaya kerja polychromic, dan pembagian bidang kehidupan yang tumpang tindih satu sama lain (dapat dibaca secara mendetil dalam buku pemimpin dan perubahan, karya sebelum dari penulis). Gaya komunikasi orang Indonesia yang cenderung implicit dan sarat muatan nonverbal sering kali membuat pesan yang ingin disampaikan tidak mudah dipahami.

Penggalan penulis pada para pemimpin bisnis di Indonesia menunjukkan bahwa hampir semua aspek perubahan organisasi tidak mengendalikan perencanaan strategis yang detail. Rencana mereka juga sangat mungkin diubah untuk menyesuaikan dengan proses yang berjalan. Alih-alih mengandalkan langkah perubahan yang step by step, para pemimpin ini menyatakan bahwa perubahan organisasi lebih banyak dijalankan secara simulatan.

F. Budaya adalah Pemecatan Masalah

Dimensi pertama menggambarkan bagaimana individu mengelola aturan dan relasi dalam organisasi dan bisnis yang digambarkannya dalam dimensi universalism dan particularism. Budaya universalism mendasarkan banyak keputusan dan pemecahan masalah pada aturan yang berlaku atau dikenal dengan nama rule-based society. Fokusnya pada aturan adalah adanya dampak luas aturan tersebut pada banyak orang. Hampir tidak ada pengecualian untuk suatu aturan karena

dikhawatirkan pengecualian akan merusak tatanan yang sudah berjalan selama ini.

Budaya particularism lebih fokus pada pengecualian yang dapat diberikan dari suatu aturan di saat aturannya tersebut berbenturan dengan relasi. Pengecualian terutama dianggap lazim jika diberikan pada orang dekat seperti udara, relasi, teman, atau karabat. Dalam hal ini relasi lebih penting untuk dikaga dan karenanya peraturan harus dilakukan secara fleksibel. Dalam studinya, Indonesia adalah salah satu negara dengan budaya particularism tertinggi.

Dalam situasi kerja, ekspresi emosional adalah faktor yang berperan penting. Seberapa nyata ekspresi positif dan negara karyawan, menjadi penting bagi kelancaran komunikasi kerja tim, hubungan atasan-bawahan, dan juga pengelolaan organisasi.

Faktanya, setiap budaya juga memiliki kelazimannya ekspresi emosi individu yang diajarkan sejak kecil. Secara umum budaya-budaya Asia lebih menekankan pada pengendalian ekspresi emosi (terutama emosi negatif) daripada budaya Eropa Barat dan Amerika Utara. Masyarakat yang emosinya lebih terkontrol disebut *neutral culture* sedangkan masyarakat yang emosinya lebih ekspresif disebutkan *affective culture*.

G. Studi GLOBE : Budaya Kepemimpinan

Perilaku kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari latar belakang budaya pemimpin itu sendiri. Tidak dapat dimungkiri bahwa ilmu manajemen dan bisnis mengajarkan teori dan model kepemimpinan yang hampir seragam di seluruh dunia. Menariknya, tingkah laku para pemimpin bias sangat beragam di lapangan.

Tabel 7.2 Dimensi budaya GLOBE

| Dimensi Budaya | Pengertian |
|----------------------------|---|
| Uncertainty avoidance | Sejauh mana sebuah masyarakat atau kelompok mengandalkan norma sosial, ritual, atau prosedur guna menghindari ketidakpastian. |
| Power distance | Sejauh mana masyarakat dalam sebuah budaya bias menerima pembagian kekuasaan yang tidak setara. |
| Institutional collectivism | Sejauh mana praktik organisasi dan institusi sosial mendukung dan mementingkan pembagian komunal terhadap resources yang dimiliki dan tindakan-tindakan kelompok. |
| In-group collectivism | Sejauh mana anggota masyarakat menampilkan harga diri, loyalitas dan kohesivitas dalam organisasi dan keluarga |
| Gender egalitarians | Sejauh mana organisasi atau masyarakat meminimalkan perbedaan peran gender dan mengupayakan kesetaraan gender. |
| Assertiveness | Sejauh mana orang-orang dalam sebuah masyarakat bersifat determinan, asertif, konfrontatif, dan agresif dalam relasi sosial mereka. |
| Future orientation | Sejauh mana masyarakat cenderung mengembangkan perilaku yang berorientasi pada masa depan, seperti misalnya melakukan perencanaan, investasi, dan menunda penghargaan diri. |
| Performance orientation | Sejauh mana masyarakat menaruh perhatian pada hal-hal terkait dengan peningkatan prestasi atau keunggulan dari pada anggotanya |
| Humane orientation | Sejauh mana sebuah masyarakat terdorong untuk mengembangkan tindakan yang adil, altruistik, tulus, menaruh perhatian, dan berbuat baik terhadap orang lain |

Jika Anda mendapat kesan para pakar tersebut seolah menyederhanakan manusia, simplistik, atau bahan menanamkan stereotip di kepala Anda, maka perlu penulis luruskan. Kesan

seperti itu bias saja muncul karena upaya pengekasan budaya yang berlawanan.

Hendaknya dicamkan bahwa semua temuan dimensi budaya didasarkan pada analisis kelompok. Jadi temuan-temuan ini menggambarkan karakteristik kelompok masyarakat, bukan individu yang berbeda pola dengan kelompoknya.

H. Budaya Standar sebagai Sistem Orientasi dan Karakteristik Inti

Bak orang yang masuk hutan belantara dan tidak tahu pangkal dan ujung dari hutan tersebut, maka adanya kompas penunjuk jalan tertentu mmenolongnya keluar dari ketersesatan. Demikian pula fungsi sistem orientasi ini yang akan menjadi patokan manakah seseorang memasuki “hutan belantara” sebuah budaya asing yang sama sekali tidak dikenalnya. Sistem orientasi ini akan menjadi kompas baginya, agar tidak “tersesat” dalam budaya baru itu. Ia akan menunjukkan perilaku mana yang bisa diterima masyarakat tersebut, dan perilaku mana yang mungkin memunculkan sanksi sosial. Memahami sistem orientasi dari sebuah budaya berarti mengenali dengan baik bagaimana cara-cara mempersepsi, berpikir, merasakan, dan bertindak dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, orang yang maasuk dalam sebut.

Budaya standar pada dasarnya adalah karakteristik inti dari sebuah budaya nasional (Thomas, 1999). Karakteristik ini dibentuk dan dikembangkan melalui penanaman nilai, norma, dan kebiasaan sejak awal kehidupan seorang anak. Karena itu, besar dan tumbuh dalam sebuah budaya akaan melahirkan cara-cara berpikir, merasakan, dan bertindak yang khas kultur tersebut. Seseorang yang besar dalam budaya Indonesia sangat paham harus menemui dan berdiskusi dengan siapa ketika mmembahas pernikahan, juga siapa yang akandiundang yang sangat mungkin akan tersinggung dan kecewa kalau tidak ikut diundang dalam acara tersebut .

Akan tetapi, perlu penulis catatan disini kalau budaya standar tidak berbicara pada perilaku individual, melainkan tindakan yang sifatnya umum. Pada hakikatnya ia merupakan karakteristik hasil abstraksi dan generalisasi. Karena itu, sangat boleh jadi ketika membaca ilustrasi tersebut, atau bagian tentang budaya standar Indonesia, Anda merasa “kayaknya enggak gue banget dech”. Atau anda merasa hanya sebagian saja dari gambaran tersebut yang cocok dengan karakteristik handai talon Anda ini.

Sebagai ilustrasi, sebagian masyarakat Indonesia tidak terbiasa dengan kritik, apalagi disampaikan secara langsung dan di depan umum. Wajaarlah bila kritik halus masih bias diterima, asalkan tidakdisampaikan di depan khalayak ramai dan cara penyampaiannya juga tidak kasar, secara tidak langsung dan dipahami tidak bertujuan untuk mempermalukan orang yang dikritik. Jadi cara dan dimana kritikdisampaikan, merupakan area toleransi yang menentukan perilaku kritik bias diterima atau sebaliknya, akan ditolak alias mendapatkan sanksi sosial.

Budaya standar berbicara sesuatu yang khas (typical); bias dikatakan sebagai rata-rata sebuah masyarakat, bukan cirri individu demi individu. Ia bias dikatakan sebagai sebuah normalitas dari sebuah budaya nasional yang menampilkan perilaku khas, typical, normal, wajar, atau lazim pada masyarakat lain bias saja tampak aneh, tidak umum, kuno, atau sering diekspresikan dengan pernyataan.

Bab 8

MENGUKUR MODAL SOSIAL: Alternatif Pengukuran dan Tantangannya

A. Pengantar

Tulisan ini hadir ditengah kekusaran para peneliti, terutama peneliti-peneliti ilmu sosial, yang mempertanyakan dapatkah modal sosial diukur dan bagaimana cara mengukurnya. Dalam berbagai macam studi, modal sosial dapat diukur dalam berbagai macam konteks dan disiplin keilmuan menjadi determinan ataupun konsekuensi dari berbagai fenomena sosial dan organisasional (Babb, 2005; Brown, 2008; Burdine et al., 1999; Jones et al., 2009; Mummery et al., 2008). Meskipun telah muncul instrumentasinya, modal sosial tetap dipertanyakan dan dikritik tentang kompleksitas pengukurannya. Beberapa di antara kritikus menyatakan bahwa tidak ada cara yang kuat dan dapat diterapkan secara luas untuk mengukur modal sosial yang memungkinkan perbandingan antara konteks yang berbeda (Claridge, 2018b). Kritikus lain menyampaikan bahwa tidak ada instrument yang mengukur modal sosial secara universal karena ada masalah yang signifikan bagi teori modal sosial Ketika digunakan (van der Gaag & Webber, 2008a). Selain itu masalah lain yang muncul adalah unit analisis dan observasi yang dianggap tidak masuk akal sehingga tidak ada ukuran yang menghasilkan angka atau bagjan

sekumpulan angka yang mampu mendefinisikan kompleksitas modal sosial (Claridge, 2018a). Kritikus lain berpendapat bahwa tidak ada ukuran modal sosial yang diterima secara luas, dapat diterapkan secara luas yang valid, andal dan kokoh (Skačkauskienė & Bytaute, 2012). Alasannya adalah definisinya yang beragam, perbedaan level analisis dan kontes, permasalahan agregasi, distribusi dan ketimpangan, serta kausalitas yang kompleks.

Dalam berbagai macam studi ditemukan bahwa modal sosial tidak dapat diukur kecuali modal sosial didefinisikan dengan jelas dari berbagai macam teori dataupun konteks penelitian (Claridge, 2018a). Modal sosial sebenarnya bukan tidak memiliki definisi yang disepakati bersamadan tidak memiliki konsistensi dalam pendefinisian, tetapi ada sejumlah studi yang mengungkap bahwa ada consensus tentang apa itu modal sosial (Franzen & Pointner, 2007; Villalonga-Olives & Kawachi, 2015). Oleh karena itu, modal sosial sangat dimungkinkan untuk diukur. Sebagai konsekuensinya, modal sosial ketika akan diukur memerlukan kualifikasi tentang definisi dari modal sosial. Setelah itu langkah yang penting untuk menanggapi kritik terhadap definisi modal sosial adalah mempertanyakan pemahaman tentang modal sosial agar mengurangi kebingungan yang akan timbul (Claridge, 2004a). Sebagai contoh adalah dengan melihat definisi modal sosial yang digunakan apakah menganut Bourdieu, Coleman, atau Putnam. Ini akan memberikan berbagai macam perspektif.

Inkonsistensi pendefinisian modal sosial membawa konsekuensi yang kompleks (Claridge, 2004b). Salah satu yang signifikan adalah banyak peneliti kemudian memiliki definisi sendiri atau membuat definisi sendiri dan kemudian dari definisi tersebut mereka membuat kerangka pengukuran mereka. Sebagai contoh, pendefinisian modal sosial sebagai jaringan sosial individu membuat modal sosial memungkinkan untuk diukur. Di lain sisi, ada berbagai definisi modal sosial sehingga tidak dimungkinkan untuk diukur. Studi lain mencoba mengukur modal sosial dengan mendefinisikannya sebagai kepercayaan (de Ulzurrun, 2002a).

Kritikus menilai ini membingungkan karena mungkin sekali (para) peneliti yang menggunakannya akan mengukur kepercayaan, bukan modal sosial itu sendiri (Skačkauskiene & Bytaute, 2012). Sebagai konsekuensi, telah hadir berbagai macam definisi modal sosial dan pengukurannya tetapi di antara studi-studi tersebut mungkin tidak memenuhi syarat dari pengukuran modal sosial yang andal, kuat dan valid.

B. Pengukuran modal sosial di level individual, kelompok dan komunitas

Modal sosial dalam berbagai macam studi disebutkan sebagai konsep payung yang mencakup hampir semua aspek sosialitas dan organisasi sosial. Oleh karena itu, ada perspektif yang berbeda dalam berbagai macam studi tentang definisi modal sosial (Claridge, 2018c). Dalam literatur, telah tersedia berbagai macam pengukuran modal sosial yang dihasilkan dari definisi teoritis serta tingkat dan konteks penelitian. Beberapa di antaranya secara tegas menyebutkan level yang berbeda yaitu individu, kelompok dan komunitas.

Di level individu, focus utama dari pengukuran modal sosial adalah pada jumlah dan kualitas hubungan sosial di antara individu (Claridge, 2018c). Analisis di level ini dapat mencakup berbagai macam aspek seperti niat baik dan reputasi individu. Tetapi, secara umum faktor yang berkaitan dengan aspek sosial organisasi dan pengaruh normative tidak dipertimbangkan. Oleh karena itu, apabila fokusnya adalah pada status, dan kekuasaan di antara individu maka sifat-sifat kolektifitas umumnya tidak dipertimbangkan dalam analisis di level individu (van der Gaag & Webber, 2008b). Dalam level ini, berbagai macam studi telah mengumpulkan modal sosial untuk mengukur modal sosial yang lebih tinggi (tingkatan modal sosial satu individu dengan yang lain).

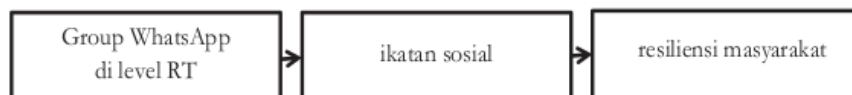
Sementara itu di level kelompok, modal sosial cenderung digunakan untuk mengukur keterhubungan sosial dan sifat-sifat kolektivitas seperti norma kepercayaan dan timbal balik (Claridge, 2018c). Ini juga bergantung pada perspektif teoritis yang mana

studi-studi dapat memasukkan determinan yang berhubungan dengan aspek sosial organisasi dan pengaruh normatif. Kemudian, di level komunitas, modal sosial didefinisikan sebagai entitas yang dimiliki secara kolektif. Di dalam kolektifitas tersebut terdapat beberapa indikator seperti kepercayaan umum, norma, keterlibatan individu dan partisipasi sosial dan politik.

Dari ketiga level analisis tersebut, modal sosial dapat dikonseptualisasikan dalam level yang berbeda bergantung pada penelitian dan perspektif teoritis yang diambil. Seorang peneliti harus secara tegas menunjukkan di level mana studi tersebut dilaksanakan baik itu individual, kelompok ataupun komunitas (Claridge, 2018c). Sebagai konsekuensinya, landasan teori yang digunakan tentu akan berbeda. Dengan berpijak pada salah satu level maka dimungkinkan akan lebih mudah untuk mewakili modal sosial di level mana yang akan diukur (Chamlee-Wright & Storr, 2011). Hasil dari pengukuran modal sosial dapat dikualifikasikan dengan bagaimana modal sosial didefinisikan.

C. Determinan, struktur dan konsekuensi modal sosial

Kebingungan selanjutnya adalah apa yang diukur antara sumber, bentuk atau konsekuensi. Kebingungan lain adalah tentang apakah suatu studi diperbolehkan mengukur determinan, struktur atau konsekuensi modal sosial. Dalam studi-studi terkini tentang modal sosial, ketiganya dimungkinkan dan relevan untuk dipahami dalam konteks tertentu (Mishra, 2020). Bagian ini memberikan penjelasan tentang perbedaan di antara ketiganya. Secara umum, determinan modal sosial dapat menghasilkan struktur tertentu yang dapat menghasilkan konsekuensi tertentu. Yang harus dipahami adalah aspek kausalitas siklik, relasional atau bahkan timbal balik (Ahlborg et al., 2022). Dalam menguji determinan, struktur dan konsekuensi dapat diberikan contoh sebagai berikut:



Sebuah masyarakat memiliki group WhatsApp di tingkat RT di mana setiap anggota masyarakat bertemu secara virtual dan membangun ikatan sosial antar anggota masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19. Ikatan sosial dapat memfasilitasi resiliensi masyarakat karena anggota masyarakat dapat berbagi secara luring sumber daya yang mereka miliki dalam situasi kelangkaan barang di masa pandemi COVID-19. Group WhatsApp dalam hal ini dapat mempromosikan modal sosial. Namun, hubungan semacam ini mungkin terlalu menyederhanakan kompleksitas modal sosial karena ada banyak faktor yang berkontribusi pada ikatan dan resiliensi masyarakat dan ada kausalitas yang kompleks.

Dalam contoh hubungan tersebut, modal sosial dapat diukur dengan mengumpulkan informasi tentang Group WhatsApp RT, jumlah orang yang berpartisipasi, berapa lama mereka menghabiskan waktu untuk berinteraksi satu sama lain, dan berapa lama mereka melakukan interaksi tersebut dalam satuan waktu tertentu. Informasi ini akan membantu memahami berkerjanya modal sosial dalam konteks tertentu. Namun, informasi tersebut memberikan sedikit informasi tentang hasil modal akhir yang dalam hal ini adalah resiliensi masyarakat.

Kemudian informasi lain yang perlu dikumpulkan adalah ikatan sosial sebagai salah satu struktur modal sosial. Dalam hal ini keberadaan dan kualitas hubungan antar anggota masyarakat dapat dipetakan. Sayangnya, hal ini hanya sedikit memberitahu tentang tingkat resiliensi masyarakat karena ada faktor lain yang berkontribusi pada perilaku kolaboratif.

Ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa salah satu informasi yang bermakna untuk diukur adalah tingkat resiliensi masyarakat sebagai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, hubungan antara determinan, struktur dan konektivitas bersifat kondisional yang melibatkan kausalitas yang kompleks yang berarti bahwa pengukuran determinan atau struktur modal sosial tidak menjamin hasil yang diinginkan (Claridge, 2018a).

Jika suatu studi tidak berusaha untuk memahami atau mengubah modal sosial maka studi tersebut hanya akan mengukur konsekuensi dari modal sosial yang logis (Claridge, 2018a). Ini adalah jika konsekuensi ini hanya semata-mata dikaitkan dengan modal sosial bukan faktor lain. Oleh karena itu, peneliti tidak dapat membuat atribusi ini dengan mengukur resiliensi masyarakat bukan mengukur modal sosial. Untuk memahami atau mengukur modal sosial, penting untuk memahami determinan, struktur dan konsekuensi modal sosial. Ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dengan kaya proses modal sosial dalam konteks kepentingan (Claridge, 2018a).

D. Konteks dalam studi modal sosial

Dalam studi modal sosial konteks adalah kunci (Bankston III, 2004; Catts, 2007; Fujisawa et al., 2013; Lucini, 2013). Dalam hal ini, konteks akan membedakan bagaimana modal sosial digunakan secara berbeda pada tingkat analisis yang berbeda. Dalam konteks yang berbeda, faktor sosial dan aspek sosial organisasi yang penting dan bermanfaat dalam studi bisa saja sangat berbeda. Konteks dalam hal ini penting misalnya berkaitan dengan modal sosial bridging ataupun bonding ataupun linking (Catts, 2007; Kang & Shen, 2016). Dalam konteks organisasi tertentu penggunaan keduanya di dalam level analisis yang sama akan menjadi suatu masalah. Oleh karena itu penting untuk secara komprehensif memahami penggunaannya. Ini adalah karena manfaat produktif elemen modal sosial tertentu berasal dari nilai kekhasan dalam konteks atau lingkungan di mana modal sosial digunakan (Catts, 2007; Claridge, 2018a). Untuk itu, tidak ada jaminan bahwa elemen modal sosial dapat digunakan dengan sama untuk berbagai macam konteks yang berbeda.

Contoh lain adalah kepercayaan. Kepercayaan sangat bergantung pada konteks. Dalam berbagai macam studi kepercayaan memiliki beberapa dimensi seperti trustor (individu atau kolektif), trustee (individu atau kolektif), aspek perilaku dan keadaan tertentu. Pertanyaan tentang kepercayaan akan

sulit dijawab dan bergantung pada konteks. Ketika pertanyaan diajukan secara umum, akan sulit bagi individu responden untuk mengumpulkan beragam pemikiran, perasaan dan pengalaman tentang kepercayaan (Claridge, 2018a).

E. Pengukuran Modal Sosial

Modal sosial tidak dapat diukur secara langsung tetapi dapat disimpulkan dari determinan atau manifestasinya. Determinan dalam studi modal sosial didefinisikan sebagai faktor-faktor yang berdampak pada interaksi sosial dan memungkinkan terjadinya modal sosial. Manifestasi adalah hasil (outcome) dari modal sosial (Day, 2002). Modal sosial dalam berbagai macam studi diukur dengan menggunakan indikator atau proksi yang secara teoritis berkaitan dengan modal sosial.

Pendekatan sebelumnya banyak mengukur modal sosial dengan menggunakan satu indikator seperti kepercayaan sampai dengan menggunakan indeks (van der Gaag & Webber, 2008a). Sebagian besar peneliti mendefinisikan modal sosial sebagai suatu konstruk yang multidimensi sehingga beberapa indikator harus diperkerjakan. Oleh karena itu, sebaiknya modal sosial didefinisikan dengan lebih dari satu indikator dan pengukuran modal sosial harus dikaitkan dengan dasar-dasar teoritis dari konsep modal sosial. Titik awal yang baik untuk mengukur modal sosial adalah dengan mendefinisikan modal sosial. Ini bergantung pada preferensi teoritis dari penelitian.

F. Pengukuran modal sosial dengan perspektif jaringan

Dalam pengukuran modal sosial dikenal tiga konstruk yaitu bonding, bridging, dan linking. Modal sosial bonding didefinisikan sebagai ikatan sosial di antara individu dalam kelompok sosial yang sama atau dengan orang lain yang biasanya memiliki identitas sosial yang mirip. Modal sosial bridging adalah ikatan sosial yang menghubungkan satu orang sama lain melintasi batas-batas tertentu seperti ras, kelas atau agama. Sementara itu modal sosial linking adalah ikatan sosial dengan mereka yang

memiliki kekuasaan yang memberikan seseorang kapasitas untuk mendapatkan akses ke sumber daya, ide dan informasi dari Lembaga formal di luar komunitas (Claridge, 2018a)

Tabel 1. Klasifikasi pengukuran modal sosial

| | Ikatan Kuat | Ikatan Lemah |
|---------------------------------|---|--|
| Ikatan bonding (horizontal). | Teman dekat atau keluarga dekat dengan karakteristik sosial yang mirip, mis. kelas sosial atau agama | Anggota dengan minat atau karakteristik sosial yang sama dalam asosiasi sukarela |
| Ikatan penghubung (horizontal). | Teman dekat atau keluarga dekat dengan karakteristik sosial yang berbeda, mis. usia, jenis kelamin atau etnis | Kenalan dan anggota dengan karakteristik sosial yang berbeda dalam asosiasi sukarela |
| Menghubungkan (Vertikal) ikatan | Tutup rekan kerja dengan posisi hierarki yang berbeda | Kolega jauh dengan posisi hierarkis yang berbeda dan ikatan antara warga negara dan pegawai negeri |

Sumber: (Claridge, 2018a)

G. Pengukuran modal sosial dengan perspektif struktur sosial

Selain jaringan, studi-studi lain menggunakan perspektif struktur sosial. Perspektif ini terdiri dari structural, kognitif dan relasional (Claridge, 2018a). Modal sosial structural merupakan elemen struktur sosial yang menciptakan peluang untuk relasi sosial dari tujuan produktif. Modal sosial kognitif mencakup norma, nilai sikap dan keyakinan bersama yang membuat individu cenderung melakukan Tindakan kolektif yang saling menguntungkan. Sementara itu modal sosial relasional didasarkan pada karakteristik hubungan sosial antar indivify dan umumnya digambarkan sebagai trust dan trustworthiness. Ketiga perspektif ini dapat diperluas untuk memasukkan indicator potensial untuk setiap jenis modal sosial (Claridge, 2018a).

Pengukuran modal sosial bergantung pada level analisis baik di tingkat individu, kelompok dan atau organisasi serta komunitas dan nasional). Studi lain juga menegaskan apakah peneliti tertarik untuk menyelidiki sumber, bentuk atau konsekuensi dari modal sosial. Sebagai catatan, langkah penyelidikan modal sosial di level nasional mungkin kurang relevan atau tidak ada relevansinya di tingkat organisasi sehingga perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa langkah tersebut sesuai untuk tingkat analisis tertentu (Claridge, 2018a).

H. Level analisis

Dalam studi modal sosial, tingkatan analisis akan mendefinisikan instrument penelitian yang digunakan. Jenis pengukuran akan bergantung pada skala minat. Meskipun begitu, umumnya, modal sosial dibagi menjadi level mikro (individu), meso (kelompok atau organisasi), dan makro (komunitas atau nasional). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing level analisis.

I. Level komunitas atau nasional

Pertama adalah modal sosial di level komunitas atau nasional. Dalam tingkat ini, modal sosial didefinisikan sebagai sumber daya di level masyarakat sehingga modal sosial adalah modal yang dimiliki secara kolektif. Di level ini ada tantangan serius yang berkaitan dengan ketersediaan data, oleh karena itu, langkah-langkah di tingkat makro sering menggunakan data sekunder dari data-data yang ada yang tidak dikumpulkan secara khusus untuk mengukur modal sosial. Sebagai konsekuensinya, penelitian modal sosial tidak terikat dengan teori melainkan yang paling cocok dengan teori (Claridge, 2018a).

Item dalam indicator ini adalah berasal dari dimensi structural yang termasuk kepercayaan (umum dan kelembagaan), trustworthiness, karakteristik structural jaringan (kepadatan jaringan, ikatan kuat, ikatan lemah, ikatan intra-komunitas), keanggotaan asosiasi dan keterlibatan masyarakat, dan kegiatan sukarela. Ukuran yang digunakan untuk menggambarkan modal

sosial relasional difokuskan pada hubungan sosial, kohesi sosial dan interaksi sosial. Ukuran yang digunakan untuk modal sosial kognitif menekankan pada norma sipil, timbal balik, kepercayaan, dukungan sosial, ikatan afektif dan tujuan kolektif (Claridge, 2018a).

J. Pengukuran modal sosial di level organisasi dan kelompok

Kedua adalah pengukuran modal sosial di level organisasi dan kelompok. Dalam studi modal sosial, konteks kelompok adalah sangat penting. Ini adalah karena struktur hierarki sebagian besar kelompok atau organisasi, peran kepemimpinan eksekutif dalam menciptakan budaya di level organisasi dan kelompok. Budaya yang dimaksud di sini adalah bagian dari dimensi kognitif modal sosial. Sayangnya studi-studi sebelumnya banyak yang tidak menaruh perhatian pada aspek structural dan relasional. Peneliti-peneliti sebelumnya melewatkan dimensi kognitif yang padahal dimensi ini sangat penting mempengaruhi Tindakan individu yang menghasilkan hasil yang produktif. Catatan lain di level ini adalah alat pengukuran modal sosial generic memungkinkan peneliti menanyakan hubungan dengan supplier. Tetapi, pengukuran ini mungkin relevan untuk semua jenis organisasi. Memahami sifat kelompok merupakan kegiatan dan tujuannya akan menentukan aspek-aspek modal sosial yang penting dan data apa yang relevan (Claridge, 2018a).

Dimensi struktural meliputi: karakteristik struktural jaringan (mis. tautan jaringan, sentralitas jaringan, kepadatan jaringan, keragaman jaringan, ukuran jaringan, frekuensi jaringan, redundansi jaringan, jaringan kelembagaan, dll.), ikatan jaringan (ikatan kuat, ikatan lemah, ikatan pejabat pemerintah, ikatan kekuatan, ikatan ikatan, ikatan penghubung, ikatan penghubung, lubang struktural, dll.), keanggotaan asosiasi dan hubungan kelembagaan, dan memercayai. Dimensi relasional meliputi: koneksi sosial dan ikatan dengan, kenalan dekat (misalnya anggota keluarga, dan rekan kerja), dan, berbagai pemangku kepentingan eksternal (misalnya eksekutif dari bisnis lain, anggota

dewan, pemimpin politik, pejabat birokrasi pemerintah, dan tokoh masyarakat), kepercayaan antarpribadi, dan memercayai. Dalam studi modal sosial kognitif telah diselidiki, sebagian besar berbasis sikap dan nilai dan termasuk: norma, nilai, dan kewajiban bersama, timbal balik, tujuan dan misi bersama, dan sikap dan keyakinan (Claridge, 2018a).

K. Pengukuran modal sosial di level individu

Ketiga adalah ukuran di level individu. Pada umumnya, pengukuran modal sosial di level individu diukur dengan survei kuisisioner menggunakan indikator yang memanfaatkan hubungan sosial, jaringan sosial dan dukungan sosial. Dimensi modal sosial structural meliputi: tingkat kepercayaan, struktur dan posisi jaringan sosial (misalnya sentralitas jaringan, ukuran jaringan, kepadatan jaringan, sentralitas keantaraan, homogenitas/heterogenitas jaringan, homofili/heterofili, kendala jaringan, kekuatan ikat, lubang struktural, dll.), jumlah keanggotaan jaringan, keanggotaan asosiasi dan partisipasi sosial koneksi dan hubungan sosial (misalnya ikatan ikatan, ikatan penghubung, ikatan penghubung, konektivitas, dll.), dan kuantitas atau volume sumber daya sosial. Dimensi relasional meliputi: interaksi sosial, hubungan sosial, jaringan sosial, dukungan sosial, kohesi sosial, dan pergaulan. Modal sosial kognitif meliputi: kepercayaan umum dan interpersonal, tujuan bersama, budaya bersama, timbal balik, perasaan aman, dan pandangan multikulturalisme untuk mengukur toleransi individu terhadap keragaman (Claridge, 2018a).

Catatan Penutup

Tantangan dalam kuantifikasi studi modal sosial

Oprasionalisasi yang subyektif

Masalah lain adalah pengoperasionalisasian modal sosial yang subyektif. Ada berbagai macam dimensi atau pertanyaan atau pernyataan dalam modal sosial yang berkaitan dengan opini, perasaan dan keyakinan. Ini adalah terutama pada dimensi kognitif dari modal sosial yang bersifat pra-reflektif

karena seringkali membutuhkan beberapa refleksi untuk dapat diartikulasikan. Jumlah refleksi ini dapat mempengaruhi respon karena keyakinan awal responden mungkin berbeda dengan kesimpulan akhir setelah refleksi situasi yang mendalam (Claridge, 2018a; de Ulzurrun, 2002b; Skačkauskiene & Bytaute, 2012).

Agregasi faktor

Masalah lain adalah agregasi faktor. Dalam hal ini modal sosial tidak dapat diperlakukan sebagai variabel tunggal karena secara umum dimensi modal sosial memiliki kausalitas yang kompleks dan multi arah. Dalam situasi ini, mengumpulkan faktor-faktor untuk menyederhanakan analisis dapat mengakibatkan hilangnya makna modal sosial dan bahkan mengacaukan hasil analisis (Claridge, 2018a; de Ulzurrun, 2002b; Skačkauskiene & Bytaute, 2012).

Heterogenitas dan ketidaksetaraan

Modal sosial tidak terdistribusi secara merata di antara individu ataupun kelompok. Ini adalah karena asumsi bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam suatu komunitas atau kelompok yang terdiri dari berbagai individu yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi dan yang lain memiliki modal sosial yang lebih rendah. Tingkat heterogenitas dan ketidaksetaraan yang dihasilkan dapat menjadi aspek penting dari modal sosial tetapi biasanya hilang dengan pendekatan pengukuran yang mengumpulkan tanggapan atau mencari informasi. Untuk penggunaan instrument modal sosial di dalam kelompok sasaran tertentu mungkin tidak penting tetapi bagi kelompok yang lain penting untuk memahami dan mengkualifikasikan modal sosial kepada kelompok tersebut. Dalam kasus di mana heterogenitas menjadi penting, pendekatan yang berbeda untuk mengukur modal sosial harus diperkerjakan (Claridge, 2018a; de Ulzurrun, 2002b; Skačkauskiene & Bytaute, 2012).

Hubungan nonlinier

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah memperhatikan hubungan antar variabel apakah linear, nonlinear atau curvilinear. Salah satu alasannya adalah karena modal sosial bergantung pada waktu dan konteks maka aspek modal sosial tertentu mungkin tidak akan berkerja dengan baik dalam konteks dan waktu yang berbeda. Oleh karena itu ada potensi berbagai ambang batas atau titik kritis yang membuat hubungan menjadi tidak linear. Pengukuran modal sosial tidak boleh mengasumsikan bahwa salah satu aspek lebih baik. Ini berarti bahwa hubungan linear akan selalu baik karena pemeriksaan efek lengkung akan membantu peneliti memahami bagaimana suatu hubungan dapat berubah pada rentang variabel independent dan dependen (Claridge, 2018a; de Ulzurrun, 2002b; Skačkauskiene & Bytaute, 2012).

Perubahan arah kausalitas

Suatu variabel yang menjadi predictor modal sosial mungkin tidak mengarah pada pembalikan tingkat modal sosial setelah dihilangkan. Ini adalah karena proses sosial seringkali memiliki cerita sendiri dan menciptakan konsekuensi bagi proses-proses lain yang ketika penyebab aslinya dihilangkan tidak akan Kembali kekeadaan semula. Ini mungkin terjadi pada asumsi sebab-akibat simetris di mana peneliti disasarkan pada pengamatan satu faktor yang menurun bahkan dihadapan aspek lain yang tingkatnya tinggi. Sebagai konsekuensi, peneliti mungkin salah menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau hubungannya negative (Claridge, 2018a; de Ulzurrun, 2002b; Skačkauskiene & Bytaute, 2012).

Proksi modal sosial

Aspek modal sosial cenderung tidak dapat diamati secara langsung sehingga peneliti cenderung menggunakan indicator yang dapat diukur atau diyakini memiliki hubungan kausal dengan aspek modal sosial yang diukur. Dengan kata lain, apa yang diukur dianggap menunjukkan keberadaan modal sosial. Padahal, modal

sosial dikatakan diukur dengan proksi karena proksi berdiri untuk aspek modal sosial yang ingin diukur. Kualitas proksi sangat bergantung pada hubungan teoritis dan praktis dengan aspek modal sosial yang sedang dicoba untuk diukur (Claridge, 2018a; de Ulzurrun, 2002b; Skačkauskiene & Bytaute, 2012).

Pengukuran modal sosial dalam beberapa studi menggunakan satu indikator tunggal. Ini dibarkan karena klaim bahwa faktor tersebut berkaitan erat dengan modal sosial bahkan modal sosial tidak dapat hadir tanpanya. Sebagai contoh, indikator kepercayaan diasumsikan bahwa ketika ada kepercayaan maka ada modal sosial karena kepercayaan menjadi dasar Tindakan kolektif. Pendekatan proksi tunggal telah banyak dikritik karena asumsi yang digunakan adalah asumsi yang menunjukkan adanya jaringan dan karakteristik relasional yang positif seperti kepercayaan dan rasa memiliki. Studi-studi dalam hal ini memberikan bukti tentang kepercayaan tetapi memberikan kontribusi yang terbatas pada modal sosial itu sendiri.

Penggunaan proksi tunggal merupakan penyederhanaan yang berlebihan karena pengukuran penyulingan ke satu pertanyaan akan mengasalkan agregasi dari faktor-faktor yang memiliki hubungan kompleks dengan banyak di antaranya yang memiliki kausalitas siklik, relasional atau timbal balik. Beberapa pengukuran harus dipertimbangkan memiliki manfaat lengkung di mana suatu instrument yang lebih banyak belum tentu lebih baik. Penyederhanaan pengukuran modal sosial akan mengaburkan detail dari modal sosial tersebut. Simplifikasi yang berlebihan tersebut akan menimbulkan bias kognitif. Bias kognitif ini akan mengacaukan hasil. Bias kognitif ini meliputi bias karena efek pemingkaan, perhatian, negative, optimism, refresif, dan keinginan sosial. Dengan kata lain, berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi jawaban yang berkaitan dengan pengalaman sendiri,

Bab 9

MODAL SOSIAL DAN RESILIENSI MASYARAKAT PERKOTAAN

A. Latar Belakang

Bencana alam dan non alam menyebabkan kerusakan finansial yang masif dan juga berdampak pada berbagai permasalahan sosial. Untuk itu, membangun resiliensi masyarakat atau kapasitas mereka untuk membangun kembali kehidupan dan pulih dari bencana adalah penting dan merupakan kebutuhan medesak (S. Islam et al., 2020; X. A. Zhang & Shay, 2019; X. A. Zhang & Sung, 2021a). Dalam situasi bencana, modal sosial atau investasi dalam hubungan antarindividu, komunitas dan jaringan sosial merupakan sumber dalam membangun resiliensi masyarakat (Maselko et al., 2011; Villalonga-Olives & Kawachi, 2015; X. A. Zhang & Sung, 2021a). Ikatan semacam ini adalah suatu perekat yang memicu komunitas yang sedang dalam situasi penuh tekanan dan merupakan salah satu jalan keluar untuk membangun kembali komunitas (Cai, 2017; Guo et al., 2018; Yang & Wu, 2020).

Dalam situasi pandemi COVID-19, modal sosial di satu sisi merupakan kerangka untuk menyatukan masyarakat dan di sisi lain menjadi vektor yang menyancam masyarakat karena merupakan sumber bencana dalam kasus penularan virus antar manusia (Hizbaron et al., 2021a; Liu et al., 2021; X. A. Zhang

& Sung, 2021a). Modal sosial menjadi vektor yang mengancam komunitas, memutar balikkan logika tradisional modal sosial dan resiliensi masyarakat. Pandemi COVID-19 mengharuskan masyarakat melakukan isolasi sosial untuk beberapa waktu dan membatasi diri ke sumber daya sosial (Hizbaron et al., 2021b; Mouter et al., 2021; Yogev, 2021). Mengikuti protokol kesehatan dengan membatasi jarak fisik dan sosial serta melakukan karantina berarti mengarahkan pada hubungan dan sumber daya sosial yang biasanya digunakan untuk membangun ketahanan masyarakat selama bencana menjadi suatu ancaman dalam pandemic (Mouter et al., 2021; Priyono et al., 2020; Tetep, 2021a).

Untuk itu, masyarakat mencoba membangun ketahanannya yang biasanya dilakukan dengan interaksi fisik menjadi interaksi virtual (Hizbaron et al., 2021a; Yogev, 2021). Ini dalam literatur disebut sebagai modal sosial virtual (online) yang dapat mengimbangi absennya modal sosial tradisional ketika pertemuan fisik dilarang melalui berbagai macam peraturan (Tetep, 2021a; X. A. Zhang & Sung, 2021a). Dalam hal ini, terjadi keterbatasan literatur, terutama di negara-negara berkembang, tentang bagaimana masyarakat membangun resiliensi untuk memelihara dan berinvestasi dalam modal sosial virtual (Catts, 2007; Wilson, 2006; X. A. Zhang & Sung, 2021a). Belum banyak studi dilakukan utamanya untuk mengeksplorasi bagaimana individu mendapatkan keuntungan dari modal sosial virtual melalui keterlibatan di situasi krisis yang tidak memungkinkan mereka untuk mempertahankan jaringan sosial tradisional. Sistem sosial yang ada telah menjadi bagian penting dari bagaimana komunitas membangun dan mendefinisikan diri mereka dan memberikan dukungan timbal balik (X. A. Zhang & Sung, 2021a). Kemudian, pertanyaan yang muncul adalah apakah modal sosial virtual dan keterlibatan masyarakat secara virtual menggantikan modal sosial tradisional dan interaksi antar individu? Kemudian, bagaimana modal sosial dan keterlibatan melalui jaringan sosial yang terjadi di dalam ruang virtual mampu membangun resiliensi masyarakat?

jika demikian, pandemi COVID-19 menyediakan ruang yang lebar untuk menguji fenomena semacam ini.

Penelitian ini mengisi ruang yang kosong tentang penelitian modal sosial dan resiliensi masyarakat karena penelitian-penelitian sebelumnya banyak dilakukan di setting negara maju (Maselko et al., 2011; Norris et al., 2008; Villalonga-Olives & Kawachi, 2015; X. A. Zhang & Sung, 2021a), dalam satu waktu terutama periode setelah bencana terjadi. Pandemi ini menyediakan ruang untuk mengisi kekosongan tersebut karena periode krisis yang berjalan lama (X. A. Zhang & Sung, 2021a). Juga, memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi modal sosial virtual yang banyak secara praktis ditemukan dalam arena pandemi COVID-19 bukan bencana alam maka tidak begitu mengganggu infrastruktur termasuk infrastruktur komunikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan modal sosial tradisional dan virtual dalam situasi pandemi COVID-19 dan bagaimana keduanya mampu membangun resiliensi masyarakat.

B. Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis Penelitian

1. Resiliensi Masyarakat

Resiliensi masyarakat menggambarkan kemampuan kolektif lingkungan atau suatu area (geografis) untuk menghadapi suatu stresor dan secara efisien melanjutkan kehidupan sehari-hari melalui kerjasama (Caldwell & Boyd, 2009; Kerr, 2018; X. A. Zhang & Shay, 2019). Kaitannya dengan bencana resiliensi masyarakat merupakan prediktor dari upaya untuk mengatasi kerugian dan pemulihan dari dampak bencana (Gheuens et al., 2019; Kwok et al., 2018; Marome & Shaw, 2021; Pagano et al., 2018). Untuk mencapai resiliensi, masyarakat harus membangun dan memelihara kemitraan dengan otoritas pengelolaan bencana, masyarakat dan organisasi serta memberdayakan aksi lokal melalui modal sosial (Aldrich & Meyer, 2015; R. Islam & Walkerdien, 2014; Moreno et al., 2019). Selain itu, upaya untuk memanfaatkan dan memperkuat infrastruktur dan jaringan dan aset sosial yang ada harus dilakukan.

Dalam literatur, resiliensi resingkali dibagi menjadi tiga yaitu absorbtif, adaptif dan transformatif (Archer et al., 2020). Kapasitas absorbtif meliputi berbagai strategi manajemen resiko individu/rumah tangga untuk memoderasi atau mengatasi dampak suatu guncangan terhadap mata pencaharian dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Kemudian, kapasitas adaptif membicarakan tentang kapasitas individu atau rumah tangga untuk belajar dengan menggabungkan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki untuk menanggapi suatu guncangan dengan proaktif (Archer et al., 2020). Sedangkan kapasitas transformatif adalah kapasitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung yang dilakukan dengan investasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur, mekanisme perlindungan sosial, pemberian layanan dasar dan kebijakan/peraturan yang merupakan kondisi yang diperlukan untuk perubahan sistemik. (Archer et al., 2020).

2. Modal Sosial Tradisional dan Virtual

Modal sosial merupakan sumber daya yang berwujud atau tidak berwujud, tertanam dalam suatu jaringan sosial (Bourdieu, 2008). Investasi dalam modal sosial dan memelihara hubungan sosial dapat dicairkan pada saat seorang individu membutuhkannya. Modal sosial *bonding* dan *bridging* merupakan dua jenis modal sosial yang telah diterapkan dalam penelitian-penelitian sosial (Cai, 2017; Doerfel & Haseki, 2015; Grube & Storr, 2014; Smiley et al., 2018). Modal sosial *bonding* mendiskusikan tentang ikatan yang kuat seperti antar keluarga, teman dan tetangga yang ditandai dengan tingkat kepercayaan dan dukungan (Billett, 2012; Guillen et al., 2011). Sementara itu modal sosial *bridging* mengacu pada suatu ikatan yang lemah yang terjadi pada ikatan di antara kolega dan kenalan yang menjembatani latar belakang yang berbeda (Hawkins & Maurer, 2010; Pinho, 2013; Poecze & Strauss, 2020). Modal sosial juga ditemukan dalam ruang-ruang virtual dan telah diuji tentang bagaimana cara memanfaatkannya, menumbuhkannya dan juga

mempertahkannya (Catts, 2007; Nieminen et al., 2008; Wilson, 2006; X. A. Zhang & Sung, 2021a). Modal sosial virtual mampu memprediksi keterlibatan masyarakat dan partisipasi politik dan juga kesejahteraan yang lebih tinggi (Freeman, 2013; Mouter et al., 2021; Yun & Opheim, 2012).

3. Perumusan Hipotesis Penelitian

Modal sosial yang terjadi dalam ruang virtual dan difasilitasi oleh media sosial mungkin akan menghubungkan modal sosial yang telah terbentuk di masyarakat dan menjadi prediktor dari resiliensi masyarakat (Hofmann et al., 2013a; MacNamara, 2013; X. A. Zhang & Sung, 2021a). Secara praktis, masyarakat membentuk ruang-ruang virtual seperti Whatsapp Group untuk memfasilitasi informasi dan bantuan dalam situasi pandemi COVID-19. Ruang-ruang virtual tersebut sebenarnya telah ada sebelum pandemi COVID-19 dan kemudian dimanfaatkan karena keharusan untuk meminimalisasi pertemuan tatap muka bahkan antar anggota keluarga. Untuk itu, kami berargumen bahwa modal sosial bonding yang difasilitasi oleh modal sosial akan sama-sama mengasalkan norma bersama dan kepercayaan sosial secara virtual dalam komunitas yang dekat. Selain itu, kepemilikan rasa bersama dapat juga meningkatkan keterlibatan aktivitas (Hofmann et al., 2013b, 2013a; Zheng et al., 2020a). Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: modal sosial yang diikat oleh media sosial mempengaruhi resiliensi masyarakat secara positif dan signifikan

Peran media sosial dalam situasi bencana telah dieksplorasi secara luas dalam literatur (Conroy & Evans-Cowley, 2005; Forti et al., 2014; Shim & Park, 2016; Yadav et al., 2021). Media sosial memungkinkan kelompok yang jauh dari lokasi bencana untuk memberikan dukungan moral, finansial dan informasi kepada kelompok yang sedang mengalami bencana (Santoso, 2017). Selain itu, modal sosial bonding yang terjadi di ruang virtual terfasilitasi oleh adanya kelompok sosial yang mau terlibat dan berpartisipasi

dalam kegiatan yang berhubungan dengan komunitas. Oleh karena itu, kami memformulasikan hipotesis berupa:

H2: modal sosial yang dijembatani oleh media sosial mempengaruhi resiliensi masyarakat secara positif dan signifikan

Modal sosial telah dikonfirmasi menjadi penentu dari resiliensi masyarakat dalam berbagai bencana (Blackmon et al., 2018; Hikichi et al., 2017; Lo & Chan, 2017). Modal sosial bonding dan bridging sangat penting untuk mencapai resiliensi masyarakat dan penting untuk memfasilitasi kesiapsiagaan dan pemulihan dengan cara yang berbeda. Modal sosial bonding dibangun dari keluarga, teman dan tetangga dan mereka adalah kelompok yang memberikan dukungan dan kepercayaan sosial dalam situasi bencana (Dutta, 2017; Kawamoto & Kim, 2016; Lim & Nakazato, 2018). Lebih lanjut, mereka adalah kelompok pertama yang memberikan dukungan sosial, informasi dan bantuan pribadi sebelum pihak luar memberikannya. Selanjutnya modal sosial bonding yang tinggi akan menciptakan saluran komunikasi untuk menumbuhkan kepercayaan dan norma bersama di antara anggota masyarakat; menjadi penting dari ketahanan masyarakat (Kawamoto & Kim, 2016; O'Sullivan et al., 2015; Sari & Soesilo, 2020). Berdasarkan argumen tersebut, kami merumuskan hipotesis:

H3: modal sosial yang diikat oleh aktivitas luring mempengaruhi resiliensi masyarakat secara positif dan signifikan

Modal sosial bridging sebagai satu ikatan yang lemah kemudian hadir setelah modal sosial bonding difasilitasi oleh anggota keluarga, teman dan tetangga (Kawamoto & Kim, 2016; Kerr, 2018; Maselko et al., 2011; Yila et al., 2013). Pihak eksternal memberikan informasi dan sumber daya untuk proses pemulihan bencana; terjadi di jaringan sosial di dalam komunitas namun mungkin tersedia dan mungkin juga tidak (Santoso, 2020). Modal sosial bridging menyatukan masyarakat; melintasi batas demografi, politik dan sosial. Ini secara akumulatif akan membantu mengatasi masalah yang lebih luas (Birhanu et al., 2017; Lim & Nakazato, 2018; Wickes et al., 2015). Modal

sosial jenis ini difasilitasi dengan adanya kolaborasi antar aktor. Modal sosial bridging dapat diterjemahkan dalam ikatan dengan kelompok dan organisasi lokal dan nasional. Dari argument tersebut, kami mengembangkan hipotesis berupa:

H4: modal sosial yang dijembatani oleh aktivitas luring mempengaruhi resiliensi masyarakat secara positif dan signifikan

Modal sosial bonding dan birdging yang terjadi di ruang virtual akan mempengaruhi keterlibatan masyarakat di media sosial (Djuric et al., 2020; Villalonga-Olives & Kawachi, 2015; X. A. Zhang & Sung, 2021a). Aktivitas-aktivitas digital telah terekam dengan baik di media sosial karena masyarakat tidak hanya menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi namun juga digerakkan dalam aktivitas substantif seperti menandatangani petisi online memberikan bantuan melalui crowdfunding (Villalonga-Olives & Kawachi, 2015). Ini dilakukan tidak hanya dalam lingkup tetangga, anggota keluarga dan teman (bonding) tetapi juga komunitas yang memiliki perbedaan demografis, pilihan politik dan geografis juga. Keterlibatan di ruang virtual tersebut kemudian akan memfasilitasi pembangunan resiliensi masyarakat melalui pemberian dukungan materiil maupun non-materiil dan juga pertukaran informasi/ Oleh karena itu, kami memformulasikan hipotesis berupa:

H5: modal sosial yang diikat oleh media sosial mempengaruhi keterlibatan masyarakat di media sosial

H6: modal sosial yang dijembatani oleh media sosial mempengaruhi keterlibatan masyarakat di media sosial

H7: modal sosial yang dijembatani oleh media sosial mempengaruhi resiliensi masyarakat secara positif dan signifikan dimoderasi oleh keterlibatan masyarakat di media sosial

C. Kesimpulan

Tidak seperti studi modal sosial dalam bencana alam, pandemi COVID-19 berlangsung dalam jangka waktu yang lama sehingga berbagai jenis modal sosial dapat diprioritaskan

dan dihidupkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat. Pembangunan ketahanan di awal pandemic ditandai dengan pemanfaatan sumber daya efektif dari semua jenis ikatan, online dan offline, ikatan dan jembatan. Sebaliknya, di tengah pandemi, ketahanan masyarakat semata-mata ditentukan oleh ikatan yang kuat, terutama yang dijalin di media sosial. Ini menyiratkan bahwa waktu yang lama yang dihabiskan dalam situasi pandemic dengan ketidakmampuan untuk mengembangkan hubungan tatap muka menemoatkan lebih banyak tekanan pada Kesehatan mental. Akibatnya, mereka beralih lebih banyak ke keterlibatan daring dengan ikatan yang kuat untuk mengatasi dan membimbing ketidakmampuan untuk bertemu langsung.

Hasil dalam studi ini menambahkan perkembangan teoritis modal sosial dalam konteks modal sosial untuk beberapa alasan. Pertama, berbagai jenis modal sosial mungkin berbeda sifatnya dan mengarah pada ketahanan masyarakat dengan cara yang berbeda. Orang yang menggunakan modal sosial, sebagai contoh, menggunakan modal sosial ikatan terutama untuk dukungan sosial tetapi dapat memanfaatkan modal sosial yang menjembatani untuk informasi dan sumber daya. Dalam situasi pandemic masyarakat akan memprioritaskan ikatan daripada menjembatani hubungan. Selain itu keterlibatan masyarakat di media sosial mungkin penting untuk memfasilitas ikatan dan menjembatani hubungan modal sosial di media sosial dengan ketahanan masyarakat. Kedua, sementara banyak studi modal sosial berfokus pada bagaimana orang berinvestasi dan memelihara modal sosial studi ini menyelidiki bagaimana modal sosial dimanfaatkan saat dibutuhkan.

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, studi ini merupakan studi cross-sectional. Studi selanjutnya dapat memperkerjakan penelitian longitudinal dan memperkerjakan variable lain sebagai predictor dari ketahanan masyarakat. Ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana modal sosial berkaitan dengan ketahanan masyarakat dalam jangka

panjang. Penelitian longitudinal dapat menangkap perubahan di antara masyarakat dengan ukuran yang sama. Kedua, penelitian ini menggunakan metode survey sehingga hubungan yang disajikan adalah hubungan korelasional bukan sebab-akibat. Meskipun penggunaan panah satu arah, jalur dalam SEM-PLS hanya menunjukkan hubungan korelasional antar variable. Sebagai contoh, keterlibatan masyarakat di media sosial mungkin dapat menjadi predictor dalam memelihara dan menumbuhkan modal sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla, Taufik. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Sebuah Pendekatan Kultural, dalam Edy Suandy
- Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social Capital and Community Resilience. *American Behavioral Scientist*, *59*(2), 254–269. <https://doi.org/10.1177/0002764214550299>
- Ahlborg, M. G., Nyholm, M., Nygren, J. M., & Svedberg, P. (2022). Current Conceptualization and Operationalization of Adolescents' Social Capital: A Systematic Review of Self-Reported Instruments. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(23). <https://doi.org/10.3390/ijerph192315596>
- Ali Aksar, I., Danaee, M., Maqsood, H., & Firdaus, A. (2020). Women's social media needs and online social capital: Bonding and bridging social capital in Pakistan. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, *30*(8), 989–1012. <https://doi.org/10.1080/10911359.2020.1790461>
- Archer, D., Marome, W., Natakun, B., Mabangyang, P., & Phanthuwongpakdee, N. (2020). The role of collective and individual assets in building urban community resilience. *International Journal of Urban Sustainable Development*, *12*(2), 169–186. <https://doi.org/10.1080/19463138.2019.1671425>
- Beedasy, J., Samur Zúñiga, A. F., Chandler, T., & Slack, T. (2020). Online community discourse during the Deepwater

- Horizon oil spill: an analysis of Twitter interactions. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 51. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101870>
- Billett, P. (2012). Indicators of youth social capital: The case for not using adult indicators in the measurement of youth social capital. *Youth Studies Australia*, 31(2), 9–15.
- Birhanu, Z., Ambelu, A., Berhanu, N., Tesfaye, A., & Woldemichael, K. (2017). Understanding resilience dimensions and adaptive strategies to the impact of recurrent droughts in Borana Zone, Oromia Region, Ethiopia: A grounded theory approach. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(2). <https://doi.org/10.3390/ijerph14020118>
- Blackmon, B. J., Cochran, D. M., Rehner, T. A., Lee, J., & Lee, J. Y. (2018). An exploration of posttraumatic growth, loneliness, depression, resilience, and social capital among survivors of Hurricane Katrina and the Deepwater Horizon Oil Spill. *Journal of Community Psychology*, 47(2), 356–370. <https://doi.org/10.1002/jcop.22125>
- Bourdieu, P. (2008). The Forms of Capital. In *Readings in Economic Sociology*. <https://doi.org/10.1002/9780470755679.ch15>
- Babb, P. (2005). Measurement of social capital in the UK. In *Statistics, Knowledge and Policy: Key Indicators to Inform Decision Making* (Vol. 9789264009). <https://doi.org/10.1787/9789264009011-en>
- Bankston III, C. L. (2004). Social capital, cultural values, immigration, and academic achievement: The host country context and contradictory consequences. *Sociology of Education*, 77(2), 176–179. <https://doi.org/10.1177/003804070407700205>
- Brown, K. M. (2008). Community sport/recreation members and social capital measures in Sweden and Australia. In *Sport and Social Capital*. <https://doi.org/10.4324/9780080569727>
- Burdine, J. N., Felix, M. R. J., Wallerstein, N., Abel, A. L., Wiltraut, C. J., Musselman, Y. J., & Stidley, C. (1999). Measurement of

- social capital. In *Annals of the New York Academy of Sciences* (Vol. 896). <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1999.tb08151.x>
- Cai, Y. (2017). Bonding, bridging, and linking: photovoice for resilience through social capital. *Natural Hazards*, 88(2), 1169–1195. <https://doi.org/10.1007/s11069-017-2913-4>
- Caldwell, K., & Boyd, C. P. (2009). Coping and resilience in farming families affected by drought. *Rural and Remote Health*, 9(2), 1088.
- Carter, E. D., & Cordero, M. L. (2022). Salir Adelante: Social capital and resilience during the Covid-19 pandemic in Argentina. *Health and Place*, 77. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2022.102870>
- Catts, R. (2007). Quantitative indicators of social capital: Measurement in a complex social context. In *Social Capital Lifelong Learning and the Management of Place: An International Perspective* (pp. 15–28). Routledge Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9780203945537>
- Chu, H., Liu, S., & Yang, J. Z. (2021). Together we survive: the role of social messaging networks in building social capital and disaster resilience among minority communities. *Natural Hazards*, 106(3), 2711–2729. <https://doi.org/10.1007/s11069-021-04562-7>
- Conroy, M. M., & Evans-Cowley, J. (2005). Informing and interacting: The use of E-government for citizen participation in planning. *Journal of E-Government*, 1(3), 73–92. https://doi.org/10.1300/J399v01n03_05
- Coram, V., Louth, J., Tually, S., & Goodwin-Smith, I. (2021). Community service sector resilience and responsiveness during the COVID-19 pandemic: The Australian experience. *Australian Journal of Social Issues*. <https://doi.org/10.1002/ajs4.167>
- Catts, R. (2007). Quantitative indicators of social capital: Measurement in a complex social context. In *Social Capital Lifelong Learning and the Management of Place: An International*

- Perspective* (pp. 15–28). Routledge Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9780203945537>
- Chamlee-Wright, E., & Storr, V. H. (2011). Social capital, lobbying and community-based interest groups. *Public Choice*, 149(1–2), 167–185. <https://doi.org/10.1007/s11127-011-9834-7>
- Claridge, T. (2004a). Definitions of Social Capital. *Social Capital Research*.
- Claridge, T. (2004b). Evolution of Social Capital. *Social Capital Research, 2000*.
- Claridge, T. (2018a). Can social capital be measured? *Social Capital Research*.
- Claridge, T. (2018b). Criticisms of social capital theory: and lessons for improving practice. *Social Capital Research*.
- Claridge, T. (2018c). Explanation of the different levels of social capital: individual or collective? *Social Capital Research*.
- Dauner, K. N., & Wilmot, N. A. (2022). Did States With More Social Capital Pre-pandemic Offer Mental Health Protection During the COVID-19 Pandemic? A Cross-Sectional View. *Frontiers in Public Health*, 10, 947569. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.947569>
- Djuric, M., Filipovic, J., & Komazec, S. (2020). Reshaping the Future of Social Metrology: Utilizing Quality Indicators to Develop Complexity-Based Scientific Human and Social Capital Measurement Model. *Social Indicators Research*, 148(2), 535–567. <https://doi.org/10.1007/s11205-019-02217-6>
- Doerfel, M. L., & Harris, J. L. (2017). The communication and social network flows approach for disruption preparedness. *WIT Transactions on the Built Environment*, 173, 21–32. <https://doi.org/10.2495/DMAN170031>
- Doerfel, M. L., & Haseki, M. (2015). Networks, disrupted: Media use as an organizing mechanism for rebuilding. *New Media and Society*, 17(3), 432–452. <https://doi.org/10.1177/1461444813505362>

- Dutta, S. (2017). Creating in the Crucibles of Nature's Fury: Associational Diversity and Local Social Entrepreneurship after Natural Disasters in California, 1991–2010. *Administrative Science Quarterly*, 62(3), 443–483. <https://doi.org/10.1177/0001839216668172>
- Day, R. E. (2002). Social capital, value, and measure: Antonio Negri's challenge to capitalism. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 53(12), 1074–1082. <https://doi.org/10.1002/asi.10111>
- de Ulzurrun, L. M. D. (2002a). Associational membership and social capital in comparative perspective: A note on the problems of measurement. *Politics and Society*, 30(3), 497–523+363. <https://doi.org/10.1177/0032329202030003005>
- de Ulzurrun, L. M. D. (2002b). Associational membership and social capital in comparative perspective: A note on the problems of measurement. *Politics and Society*, 30(3). <https://doi.org/10.1177/0032329202030003005>
- Forti, Y., Bechkoum, K., Turner, S., & Ajit, S. (2014). The adoption of e-Government in Arab countries: The case of Libya. *Proceedings of the European Conference on E-Government, ECEG, 2014-Janua*, 319–327.
- Freeman, J. (2013). Local E-Government and Citizen Participation: Case Studies from Australia and Italy. In *E-Government Success around the World: Cases, Empirical Studies, and Practical Recommendations* (pp. 235–258). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-4173-0.ch012>
- Fuchs, C. (2014). Social Media and the Public Sphere. *TripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society*, 12(1), 57–101. <https://doi.org/10.31269/triplec.v12i1.552>
- Franzen, A., & Pointner, S. (2007). Social Capital: Concepts and measurement | Sozialkapital: Konzeptualisierungen und messungen. *Kolner Zeitschrift Fur Soziologie Und Sozialpsychologie*, 59(SUPPL. 47).

- Fujisawa, Y., Hamano, T., Ishida, Y., & Edirippulige, S. (2013). What means “participation” as a measure of social capital in Japanese Neighborhoods context? In *Social Capital: Theory, Measurement and Outcomes*.
- Gallina, J., Munro, P. G., Smith, T. F., Melo Zurita, M. de L., Thomsen, D. C., & Cook, B. (2017). Living with disasters: social capital for disaster governance. *Disasters*, 42(3), 571–589. <https://doi.org/10.1111/disa.12257>
- Geertz, E. *The Interpretation of Culture*, New York: Basic Book Inc, 1973,
- Goodenough, W. *Culture Language and Society*. Reading, MA: Addison Wesley M. Pub. No. 7,1971.
- Gheuens, J., Nagabhatla, N., & Perera, E. D. P. (2019). Disaster-risk, water security challenges and strategies in Small Island Developing States (SIDS). *Water (Switzerland)*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/w11040637>
- Grube, L., & Storr, V. H. (2014). The capacity for self-governance and post-disaster resiliency. *Review of Austrian Economics*, 27(3), 301–324. <https://doi.org/10.1007/s11138-013-0210-3>
- Guillen, L., Coromina, L., & Saris, W. E. (2011). Measurement of Social Participation and its Place in Social Capital Theory. *Social Indicators Research*, 100(2), 331–350. <https://doi.org/10.1007/s11205-010-9631-6>
- Guo, Y., Zhang, J., Zhang, Y., & Zheng, C. (2018). Examining the relationship between social capital and community residents’ perceived resilience in tourism destinations. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(6), 973–986. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1428335>
- Hair, J., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2013). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). In *Long Range Planning* (Vol. 46, Issues 1–2). <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.002>
- Hamid (ed), *Menyikapkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Adity Media, 1999.

- Hawkins, R. L., & Maurer, K. (2010). Bonding, bridging and linking: How social capital operated in New Orleans following Hurricane Katrina. *British Journal of Social Work*, 40(6), 1777–1793. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcp087>
- Hikichi, H., Tsuboya, T., Aida, J., Matsuyama, Y., Kondo, K., Subramanian, S. V., & Kawachi, I. (2017). Social capital and cognitive decline in the aftermath of a natural disaster: a natural experiment from the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami. *The Lancet Planetary Health*, 1(3), e105–e113. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(17\)30041-4](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(17)30041-4)
- Hizbaron, D. R., Ruslanjari, D., & Mardiatno, D. (2021a). Amidst covid-19 pandemic: An adaptive disaster governance in Yogyakarta, Indonesia. *Social Sciences*, 10(3). <https://doi.org/10.3390/socsci10030092>
- Hizbaron, D. R., Ruslanjari, D., & Mardiatno, D. (2021b). Amidst covid-19 pandemic: An adaptive disaster governance in Yogyakarta, Indonesia. *Social Sciences*, 10(3). <https://doi.org/10.3390/socsci10030092>
- Hofmann, S., Beverungen, D., Räckers, M., & Becker, J. (2013a). What makes local governments' online communications successful? Insights from a multi-method analysis of Facebook. *Government Information Quarterly*, 30(4), 387–396. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.013>
- Hofmann, S., Beverungen, D., Räckers, M., & Becker, J. (2013b). What makes local governments' online communications successful? Insights from a multi-method analysis of Facebook. *Government Information Quarterly*, 30(4), 387–396. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.013>
- Hwang, H., & Kim, K.-O. (2015). Social media as a tool for social movements: the effect of social media use and social capital on intention to participate in social movements. *International Journal of Consumer Studies*, 39(5), 478–488. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12221>

- Islam, R., & Walkerden, G. (2014). How bonding and bridging networks contribute to disaster resilience and recovery on the Bangladeshi coast. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 10(PA), 281–291. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2014.09.016>
- Islam, S., Chu, C., & Smart, J. C. R. (2020). Challenges in integrating disaster risk reduction and climate change adaptation: Exploring the Bangladesh case. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 47. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101540>
- Jdaitawi, A., Uren, V., & Rodriguez-Espindola, O. (2018). The role of social media in promoting resilience in postdisaster recovery context: The Syrian Crisis. In B. Nunes, A. Emrouznejad, D. Bennett, & L. Pretorius (Eds.), *27th Annual Conference of the International Association for Management of Technology: Towards Sustainable Technologies and Innovation, LAMOT 2018*. Aston Business School, Aston University. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85085668932&partnerID=40&md5=409e8498c5963570cc4cc84798e106a>
- Jdaitawi, A., Uren, V., & Rodriguez-Espindola, O. (2019). Communication over social media: Promoting resilience and enhancing recovery in refugee crises. In W. Popma & S. Francis (Eds.), *6th European Conference on Social Media, ECSM 2019* (pp. 127–134). Academic Conferences and Publishing International Limited. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85069971481&partnerID=40&md5=a21029e67cccd3b1841bcefb9121c6ad>
- Jones, N., Sophoulis, C. M., Iosifides, T., Botetzagias, I., & Evangelinos, K. (2009). The influence of social capital on environmental policy instruments. *Environmental Politics*, 18(4), 595–611. <https://doi.org/10.1080/09644010903007443>
- Jovita, H. D., Nashir, H., Mutiarin, D., Moner, Y., & Nurmandi, A. (2019). Social capital and disasters: How does social capital shape post-disaster conditions in the Philippines?

- Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 00(00), 1–16. <https://doi.org/10.1080/10911359.2018.1556143>
- Kang, S., & Shen, L. (2016). A quantitative measure for meal-mate social capital networks. *Proceedings - 12th International Conference on Intelligent Environments, IE 2016*, 124–131. <https://doi.org/10.1109/IE.2016.27>
- Kawamoto, K., & Kim, K. (2016). Social capital and efficiency of earthquake waste management in Japan. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 18, 256–266. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2015.10.003>
- Kawamoto, K., Tontisirin, N., & Yamashita, E. Y. (2021). The structural analysis of virtual social capital for Urban resilience in a Metropolitan Area: The case of Tokyo and Bangkok. *Nakbara: Journal of Environmental Design and Planning*, 20. <https://doi.org/10.54028/NJ202120101>
- Kerr, S. E. (2018). Social capital as a determinant of resilience. In *Resilience: The Science of Adaptation to Climate Change*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811891-7.00022-0>
- Kim, K., Jung, K., & Chilton, K. (2016). Strategies of social media use in disaster management: Lessons in resilience from Seoul, South Korea. *International Journal of Emergency Services*, 5(2), 110–125. <https://doi.org/10.1108/IJES-02-2016-0005>
- Koentjaraningrat Rintangan-rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Bhratara, 1969.
- Kluckhohn, C. *Mirror For Man*. USA: Wittlesey House, 1949.
- Kleden, Ignas. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Kun, Thomas S. *The Structure of Scidentific Revolution*. Terjemahan Tjun Surjaman dengan judul Peran Paradigma dalam Revolusi Sains. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1962.
- Kwok, A. H., Paton, D., Becker, J., Hudson-Doyle, E. E., & Johnston, D. (2018). A bottom-up approach to developing a neighbourhood-based resilience measurement framework.

- Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 27(2), 255–270. <https://doi.org/10.1108/DPM-07-2017-0169>
- Lim, S., & Nakazato, H. (2018). Co-evolving supportive networks and perceived community resilience across disaster-damaged areas after the Great East Japan Earthquake: Selection, influence, or both? *Journal of Contingencies and Crisis Management*, July. <https://doi.org/10.1111/1468-5973.12244>
- Liu, Z., Lin, S., Shen, Y., & Lu, T. (2021). Collaborative neighborhood governance and its effectiveness in community mitigation to COVID-19 pandemic: From the perspective of community workers in six Chinese cities. *Cities*, 116. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103274>
- Lo, A. Y., & Chan, F. (2017). Preparing for flooding in England and Wales: the role of risk perception and the social context in driving individual action. *Natural Hazards*, 88(1), 367–387. <https://doi.org/10.1007/s11069-017-2870-y>
- Lucini, B. (2013). Social capital and sociological resilience in megacities context. *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment*, 4(1), 58–71. <https://doi.org/10.1108/17595901311299008>
- MacNamara, J. (2013). Beyond voice: Audience-making and the work and architecture of listening as new media literacies. *Continuum: Journal of Media & Cultural Studies*, 27(1), 160–175. <https://doi.org/10.1080/10304312.2013.736950>
- Marome, W., & Shaw, R. (2021). COVID-19 response in Thailand and its implications on future preparedness. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3), 1–11. <https://doi.org/10.3390/ijerph18031089>
- Maselko, J., Hughes, C., & Cheney, R. (2011). Religious social capital: Its measurement and utility in the study of the social determinants of health. *Social Science and Medicine*, 73(5), 759–767. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.06.019>

- Merisalo, M., & Jauhiainen, J. S. (2021). Asylum-Related Migrants' Social-Media Use, Mobility Decisions, and Resilience. *Journal of Immigrant and Refugee Studies*, 19(2), 184–198. <https://doi.org/10.1080/15562948.2020.1781991>
- Moreno, J., Lara, A., & Torres, M. (2019). Community resilience in response to the 2010 tsunami in Chile: The survival of a small-scale fishing community. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 33, 376–384. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2018.10.024>
- Mouter, N., Hernandez, J. I., & Itten, A. V. (2021). Public participation in crisis policymaking. How 30, 000 Dutch citizens advised their government on relaxing COVID-19 lockdown measures. *PLoS ONE*, 16(5 May). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250614>
- Mishra, S. (2020). Social networks, social capital, social support and academic success in higher education: A systematic review with a special focus on 'underrepresented' students. *Educational Research Review*, 29. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.100307>
- Mummery, W. K., Lauder, W., Schofield, G., & Caperchione, C. (2008). Associations between physical inactivity and a measure of social capital in a sample of Queensland adults. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 11(3), 308–315. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2007.06.002>
- Murphy, B. L. (2007). Locating social capital in resilient community-level emergency management. *Natural Hazards*, 41(2), 297–315. <https://doi.org/10.1007/s11069-006-9037-6>
- Nandy, M., Lodh, S., & Tang, A. (2021). Lessons from Covid-19 and a resilience model for higher education. *Industry and Higher Education*, 35(1), 3–9. <https://doi.org/10.1177/0950422220962696>
- Neuman, W. L. (William L. (2014). *Social research methods : qualitative and quantitative approaches*. Allyn & Bacon.

- Nieminen, T., Martelin, T., Koskinen, S., Simpura, J., Alanen, E., Härkänen, T., & Aromaa, A. (2008). Measurement and socio-demographic variation of social capital in a large population-based survey. *Social Indicators Research*, 85(3), 405–423. <https://doi.org/10.1007/s11205-007-9102-x>
- Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. *American Journal of Community Psychology*, 41(1–2), 127–150. <https://doi.org/10.1007/s10464-007-9156-6>
- Nurunnabi, M. (2020). Recovery planning and resilience of SMEs during the COVID-19: experience from Saudi Arabia. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 16(4), 643–653. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85095945149&doi=10.1108%2FJAOC-07-2020-0095&partnerID=40&md5=621799493fd01b62440fdb6bbbc2da01>
- O’Sullivan, T. L., Corneil, W., Kuziemy, C. E., & Toal-Sullivan, D. (2015). Use of the Structured Interview Matrix to Enhance Community Resilience Through Collaboration and Inclusive Engagement. *Systems Research and Behavioral Science*, 32(6), 616–628. <https://doi.org/10.1002/sres.2250>
- Pagano, A., Pluchinotta, I., Giordano, R., & Fratino, U. (2018). Integrating “hard” and “soft” infrastructural resilience assessment for water distribution systems. *Complexity*, 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/3074791>
- Palembang, B. K. (2022). *Kota Palembang dalam Angka 2021*.
- Pangabean, hana. Tjitra hora & murniarti J.(2014).kearifan lokal keunggulan global.jakarta:Ellexmedia komputindo
- POTENSI MODAL SOSIAL PADA BUDAYA LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Prof. Dr. Abu Hamid (jurnal)
- Pinho, J. C. (2013). The e-SOCAPIT scale: A multi-item instrument for measuring online social capital. *Journal of*

- Research in Interactive Marketing*, 7(3), 216–235. <https://doi.org/10.1108/JRIM-May-2012-0020>
- Poecze, F., & Strauss, C. (2020). Social capital on social media—concepts, measurement techniques and trends in operationalization. *Information (Switzerland)*, 11(11), 1–16. <https://doi.org/10.3390/info11110515>
- Priyono, A., Moin, A., & Putri, V. N. A. O. (2020). Identifying digital transformation paths in the business model of smes during the covid-19 pandemic. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(4), 1–22.
- Rahill, G. J., Ganapati, N. E., Clerisme, J. C., & Mukherji, A. (2014). Shelter recovery in urban Haiti after the earthquake: the dual role of social capital.[Erratum appears in *Disasters*. 2014 Oct;38(4):ii]. *Disasters*, 38(1), 73–93. <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=med8&AN=24601933%0Ahttp://sfx.library.cdc.gov/cdc?sid=OVID:medline&id=pmid:24601933&id=10.1111%2Fdisa.12051&issn=0361-3666&isbn=&volume=38&issue=1&spage=S73&pages=S73-93&date=2014&title=>
- Santoso, A. D. (2017). Tweeting in Disaster Area: An Analysis of Tweets during 2016 Mayor Floods in Indonesia. *Policy & Governance Review*, 1(3), 178. <https://doi.org/10.30589/pgr.v1i3.55>
- Santoso, A. D. (2020). Tweets flooded in bandung 2016 floods: Connecting individuals and organizations to disaster information. *Indonesian Journal of Geography*, 51(3), 242–250. <https://doi.org/10.22146/IJG.34767>
- Sari, D. A. P., & Soesilo, T. E. B. (2020). Measuring Community Resilience to the Tsunami Disaster (Study of Sukarame Village, Carita District, Pandeglang Regency). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 448(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/448/1/012092>
- Shim, J., & Park, J.-H. (2016). Public Participation and Trust in Government: The Case of the Korean Financial Regulatory

- Agency. *Public Performance and Management Review*, 40(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/15309576.2016.1177554>
- Smiley, K. T., Howell, J., & Elliott, J. R. (2018). Disasters, local organizations, and poverty in the USA, 1998 to 2015. *Population and Environment*, 40(2), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11111-018-0304-8>
- Soedjatmoko. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1984.)
- Skačkauskienė, I., & Bytautė, S. (2012). Social capital definition and measurement problems | Socialinio kapitalo apibrėžties ir matavimo problematika. *Business: Theory and Practice*, 13(3), 208–216. <https://doi.org/10.3846/btp.2012.22>
- Takeda, S. (2022). Continuation of Festivals and Community Resilience during COVID-19: The Case of Nagahama Hikiyama Festival in Shiga Prefecture, Japan. *International Journal of Japanese Sociology*, 31(1), 56–66. <https://doi.org/10.1111/ijjs.12132>
- Tang, X. (n.d.). *The Impact of Social Capital on Information Exchange and Well-Being in Virtual Communities*. 5–29.
- Taylor, B. M., Wells, G., Howell, G., & Raphael, B. (2012). The role of social media as psychological first aid as a support to community resilience building . *The Australian Journal of Emergency Management*, 27(1), 20–26.
- Tetep. (2021a). Social Capital and Digital Media Literacy Transformation from The Perspective of Social Science in The Era of Covid-19 Pandemic. *Review of International Geographical Education Online*, 11(3), 1186–1197. <https://doi.org/10.33403/rigeo.800561>
- Tetep. (2021b). Social Capital and Digital Media Literacy Transformation from The Perspective of Social Science in The Era of Covid-19 Pandemic. *Review of International Geographical Education Online*, 11(3), 1186–1197. <https://doi.org/10.33403/rigeo.800561>
- Villalonga-Olives, E., & Kawachi, I. (2015). The measurement of bridging social capital in population health research.

- Health and Place*, 36, 47–56. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2015.09.002>
- Villalonga-Olives, E., Kawachi, I., & Hernández-Aguado, I. (2021). Social capital during the first wave of the covid-19 outbreak: The case of the island of menorca. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(23). <https://doi.org/10.3390/ijerph182312720>
- van der Gaag, M., & Webber, M. (2008a). Measurement of individual social capital: Questions, instruments, and measures. In *Social Capital and Health* (pp. 29–49). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-0-387-71311-3_2
- van der Gaag, M., & Webber, M. (2008b). Measurement of individual social capital: Questions, instruments, and measures. In *Social Capital and Health*. https://doi.org/10.1007/978-0-387-71311-3_2
- Villalonga-Olives, E., & Kawachi, I. (2015). The measurement of social capital. *Gaceta Sanitaria*, 29(1), 62–64. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2014.09.006>
- Wickes, R., Zahnow, R., Taylor, M., & Piquero, A. R. (2015). Neighborhood Structure, Social Capital, and Community Resilience: Longitudinal Evidence from the 2011 Brisbane Flood Disaster. *Social Science Quarterly*, 96(2), 330–353. <https://doi.org/10.1111/ssqu.12144>
- Williams, D. (2006). On and off the 'Net: Scales for Social Capital in an Online Era. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 11(2), 593–628. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2006.00029.x>
- Williamson, W., & Ruming, K. (2015). Social media adoption and use by Australian capital city local governments. In *Social Media and Local Governments: Theory and Practice* (Vol. 15). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17722-9_7
- Williamson, W., & Ruming, K. (2016). Social media adoption and use by Australian capital city local governments. In *Public*

- Administration and Information Technology* (Vol. 15). https://doi.org/10.1007/978-3-319-17722-9_7
- Wilson, L. (2006). Developing a model for the measurement of social inclusion and social capital in regional Australia. *Social Indicators Research*, 75(3), 335–360. <https://doi.org/10.1007/s11205-004-2527-6>
- Xie, L., Pinto, J., & Zhong, B. (2022a). Building community resilience on social media to help recover from the COVID-19 pandemic. *Computers in Human Behavior*, 134. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107294>
- Xie, L., Pinto, J., & Zhong, B. (2022b). Building community resilience on social media to help recover from the COVID-19 pandemic. *Computers in Human Behavior*, 134. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107294>
- Xu, W., Xiang, L., Proverbs, D., & Xiong, S. (2021). The influence of covid-19 on community disaster resilience. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.3390/ijerph18010088>
- Yadav, J., Saini, A. K., & Yadav, A. K. (2021). Designing conceptual model and statistical validation for Government-citizen participation model in Indian context. *International Journal of Information Technology (Singapore)*, 13(2), 637–645. <https://doi.org/10.1007/s41870-020-00563-0>
- Yang, A. H., & Wu, J. S.-H. (2020). Building a disaster-resilient community in taiwan: A social capital analysis of the meizhou experience. *Politics and Governance*, 8(4), 386–394. <https://doi.org/10.17645/pag.v8i4.3106>
- Yila, O., Weber, E., & Neef, A. (2013). The role of social capital in post-flood response and recovery among downstream communities of the BA river, Western Viti Levu, Fiji Islands. In *Community, Environment and Disaster Risk Management* (Vol. 14, Issue 2013). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S2040-7262\(2013\)0000014010](https://doi.org/10.1108/S2040-7262(2013)0000014010)
- Yogev, D. (2021). Social capital transformation and social control: what can we learn from the changing style in

- communication between religious communities and the police during COVID-19. *Policing and Society*. <https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1965141>
- Yuan, R., & Ngai, S. S.-Y. (2016). Agentic personality as mediator of social capital on developmental outcomes in the transition to adulthood: Evidence from Shanghai, China. *Journal of Adolescence*, *46*, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2015.10.013>
- Yun, H. J., & Opheim, C. (2012). New technology communication in American state governments: The impact on citizen participation. In *Handbook of Research on E-Government in Emerging Economies: Adoption, E-Participation, and Legal Frameworks* (pp. 573–590). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-0324-0.ch029>
- Zhang, L., Zhao, J., Liu, J., & Chen, K. (2020). Community disaster resilience in the covid-19 outbreak: Insights from shanghai's experience in china. *Risk Management and Healthcare Policy*, *13*, 3259–3270. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S283447>
- Zhang, X. A., Borden, J., & Kim, S. (2018). Understanding publics' post-crisis social media engagement behaviors: An examination of antecedents and mediators. *Telematics and Informatics*, *35*(8), 2133–2146. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.07.014>
- Zhang, X. A., & Shay, R. (2019). An Examination of Antecedents to Perceived Community Resilience in Disaster Postcrisis Communication. *Journalism and Mass Communication Quarterly*, *96*(1), 264–287. <https://doi.org/10.1177/1077699018793612>
- Zhang, X. A., & Sung, Y. H. (2021a). Communities Going Virtual: Examining the Roles of Online and Offline Social Capital in Pandemic Perceived Community Resilience-Building. *Mass Communication and Society*, *00*(00), 1–27. <https://doi.org/10.1080/15205436.2021.1974046>

- Zhang, X. A., & Sung, Y. H. (2021b). Communities Going Virtual: Examining the Roles of Online and Offline Social Capital in Pandemic Perceived Community Resilience-Building. *Mass Communication and Society*. <https://doi.org/10.1080/15205436.2021.1974046>
- Zhang, X. A., & Sung, Y. H. (2021c). Communities Going Virtual: Examining the Roles of Online and Offline Social Capital in Pandemic Perceived Community Resilience-Building. *Mass Communication and Society*. <https://doi.org/10.1080/15205436.2021.1974046>
- Zheng, F., Khan, N. A., & Hussain, S. (2020a). The COVID 19 pandemic and digital higher education: Exploring the impact of proactive personality on social capital through internet self-efficacy and online interaction quality. *Children and Youth Services Review*, 119. <https://doi.org/10.1016/j.chidyouth.2020.105694>
- Zheng, F., Khan, N. A., & Hussain, S. (2020b). The COVID 19 pandemic and digital higher education: Exploring the impact of proactive personality on social capital through internet self-efficacy and online interaction quality. *Children and Youth Services Review*, 119. <https://doi.org/10.1016/j.chidyouth.2020.105694>
- <http://imrodili.blogspot.co.id/2009/01/kearifan-lokal-sebagai-modal-sosial.html>
- <https://achellheyya.wordpress.com/2011/09/08/modal-sosial-dan-budaya-lokal/>
- <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nXslKXH50ysJ:https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/29/memupuk-institusi-lokal-dan-modal-sosial-dalam-kehidupan-bermasyarakat/+&cd=4&hl=en&ct=clnk>

Pengukuran Modal Sosial

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

kangebink.blogspot.com

Internet Source

5%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5%

Exclude bibliography On